KEBIJAKAN REVOLUSI HIJAU DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERTANIAN PADI DI KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 1979-1998

SKRIPSI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:
Izza Ilma Maula Zain
NIM: 214104040005

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN HUMANIORA
JUNI 2025

KEBIJAKAN REVOLUSI HIJAU DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERTANIAN PADI DI KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 1979-1998

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Humaniora (S.Hum)
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora
Program Studi Sejarah dan Peradaban Islam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:
Izza Ilma Maula Zain
NIM: 214104040005

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN HUMANIORA
JUNI 2025

KEBIJAKAN REVOLUSI HIJAU DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERTANIAN PADI DI KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 1979-1998

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Humaniora (S.Hum)
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora
Program Studi Sejarah dan Peradaban Islam

Oleh:
Izza Ilma Maula Zain
NIM: 214104040005

Disetujui Pembimbing:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Muhammad Arif Mustaqim, S.Sos., M.Sosio.
NIP. 198711182023211000

KEBIJAKAN REVOLUSI HIJAU DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERTANIAN PADI DI KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 1979-1998

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu

persyaratan memperoleh gelar Sarjana Humaniora (S.Hum)

Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora

Program Studi Sejarah dan Peradaban Islam

Hari: Selasa

Tanggal: 24 Juni 2025

Tim Penguji

Ketua	Sekretaris
Dr. Akhiyat, S.Ag., M.Pd.	M. Al Qautsar Pratama, S.Pd., M.Hum.
NIP. 197112172000031001	NIP. 199404152020121005

Anggota:

1. Dr. Win Ushuluddin, M.Hum. ( )
2. Muhammad Arif Mustaqim, S.Sos., M.Sosio. ( )

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Menyetujui
Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora

Dr. Ahmad Asror, M.Ag.
NIP. 197406062000031003

MOTTO

وَهُوَ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاۤءِ مَاۤءً فَاَخْرَجْنَا بِهٖ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَاَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُّخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُّتَرَاكِبًاۚ وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَّجَنّٰتٍ مِّنْ اَعْنَابٍ وَّالزَّيْتُوْنَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَّغَيْرَ مُتَشَابِهٍۗ اُنْظُرُوْٓا اِلٰى ثَمَرِهٖٓ اِذَآ اَثْمَرَ وَيَنْعِهٖۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكُمْ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿٩٩﴾

"Dialah yang menurunkan air dari langit lalu dengannya Kami tumbuhkan segala macam tumbuhan. Maka, darinya Kami mengeluarkan tanaman yang menghijau. Darinya Kami mengeluarkan butir yang bertumpuk (banyak). Dari mayang kurma (mengurai) tangkai-tangkai menjuntai. (Kami menumbuhkan) kebun-kebun anggur. (Kami menumbuhkan pula) zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya pada waktu berbuah dan menjadi masak. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang beriman" **(QS. Al-An'am: 99)***

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an, Terjemah dan Tafsir untuk Wanita, (Bandung: Penerbit Jabal, 2010), 140

PERSEMBAHAN

Karya ini penulis persembahkan kepada civitas akademik Program Studi Sejarah dan Peradaban Islam Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dan insan cita yang peduli kepada Kebijakan Revolusi Hijau dan dampaknya Terhadap Pertanian Padi khususnya di Kabupaten Banyuwangi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Segenap puji syukur penulis sampaikan kepada Allah Swt, karena atas limpahan nikmat, rahmat, hidayah, ridho dan karunia-Nya kepada kita. Serta shalawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Agung Muhammad Saw yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang yang penuh dengan nuansa islami, ilmu pengetahuan dan berperadaban. Seluruh proses penelitian, penulisan, serta penyusunan skripsi yang berjudul "Kebijakan Revolusi Hijau dan Dampaknya Terhadap Pertanian Padi di Kabupaten Banyuwangi Tahun 1979-1998" dapat terselesaikan dengan lancar.

Kesuksesan dan keberhasilan dalam penulisan skripsi ini dapat penulis peroleh karena dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan rasa terimakasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan Program Sarjana.
2. Bapak Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora beserta seluruh jajaran Dekanat yang lain atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk menjadi mahasiswa dari Program Studi Sejarah dan Peradaban Islam pada Program Sarjana Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

3. Bapak Dr. Win Usuluddin, M.Hum., selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember atas bimbingan dan motivasi yang diberikan selama proses perkuliahan.
4. Bapak Dr. Akhiyat, S.Ag., M.Pd., selaku Koordinator Program Studi Sejarah dan Peradaban Islam atas motivasi, bimbingan serta diskusi-diskusi yang menarik dan membangun selama proses perkuliahan.
5. Bapak Muhammad Arif Mustaqim, S.Sos., M.Sosio., selaku Dosen Pembimbing dari penulis yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam membimbing serta memberikan motivasi dan mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini dan dapat menyelesaikannya dengan tepat waktu. Tanpa bimbingan, arahan serta motivasi dari beliau penulisan skripsi ini tidak akan selesai.
6. Kepada Bapak dan Ibu penulis, Bapak Muh. Zaenuri dan Ibu Winarti terimakasih atas segala dukungan serta doa yang tidak pernah berhenti diberikan kepada penulis, kepada saudara penulis yang telah memberikan dukungan serta mbah dan keluarga besar yang menjadi penyemangat penulis selama menempuh pendidikan.
7. Seluruh pegawai lingkungan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember atas informasi-informasi yang telah diberikan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

8. Seluruh narasumber yang telah bersedia membantu memberikan informasi mengenai data yang dibutuhkan penulis dalam proses penelitian skripsi, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Terimakasih kepada sahabat serta teman teman Program Studi Sejarah dan Peradaban Islam Angkatan 21 terutama Kelas SPI 2, telah menemani masa-masa perkuliahan dengan segala ceritanya. Kepada ICIS UIN KHAS Jember yang sudah memberikan tempat kepada penulis untuk menyalurkan bakat, minat serta memberikan pengalaman organisasi yang sangat berkesan. Kepada teman teman PPME NURIS 2 yang telah membersamai hari-hari penulis. Serta kepada semua teman-teman penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Akhirnya tiada balasan yang dapat penulis berikan kecuali doa, semoga segala aman baik yang telah dilakukan mendapat balasan yang sebaik-baiknya dari Allah Swt. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Atas segala kekurangan dan kekhilafan yang ada, sepenuh hati penulis memohon maaf sebesar besarnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 20 Mei 2025

Izza Ilma Maula Zain
Nim: 214104040005

ABSTRAK

Izza Ilma Maula Zain, 2025. *Kebijakan Revolusi Hijau dan Dampaknya Terhadap Pertanian Padi di Kabupaten Banyuwangi Tahun 1979-1998.*

Revolusi Hijau merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan produksi bahan pangan, khususnya di negara-negara yang sedang berkembang lewat modernisasi pertanian yang terlaksana di Indonesia pada masa Orde Baru. Wilayah-wilayah Indonesia yang menjadi sasaran Revolusi Hijau salah satunya adalah Kabupaten Banyuwangi yang memiliki luas area yang besar.

Penelitian ini memiliki dua fokus yakni: 1. Bagaimana pelaksanaan Revolusi Hijau di Kabupaten Banyuwangi Tahun 1979-1998? 2. Bagaimana dampak Revolusi Hijau terhadap pertanian padi di Kabupaten Banyuwangi Tahun 1979-1998?. Penelitian ini memiliki dua tujuan yaitu: 1. Untuk mengetahui pelaksanaan Revolusi Hijau di Kabupaten Banyuwangi tahun 1979-1998 2. Untuk menjelaskan dampak dari Revolusi Hijau terhadap pertanian padi di Kabupaten Banyuwangi tahun 1979-1998.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah dengan beberapa tahapan, yaitu: pemilihan topik penelitian, heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Sumber primer yang dimiliki berupa data dari Badan Pusat Statistika, kebijakan dari pemerintah, serta koran yang terbit ditahun yang sama. Sumber sekunder yang dimiliki berupa buku, artikel ilmiah, skripsi terdahulu serta hasil wawancara.

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa pelaksanaan dari Revolusi Hijau di Kabupaten Banyuwangi terlaksana lewat panca usaha tani yang berisi pembibitan unggul, irigasi yang baik, pengolahan tanah, pemupukan yang tepat, serta pemberantasan hama secara intensif. Petani juga mendapatkan kredit serta penyuluhan dari lembaga pemerintah selama masa produksi padi. Dampak yang dihasilkan oleh Revolusi Hijau di Kabupaten Banyuwangi adalah, dampak positif berupa kenaikan hasil produksi padi dan pengetahuan petani yang meningkat. Sementara dampak negatif yang dirasakan petani adalah perubahan pada lembaga kemasyarakatan dan sistem sosial serta keadaan sosial ekonomi petani yang ikut berubah.

Kata Kunci: Revolusi, Padi, Banyuwangi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH. ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN……

HALAMAN SAMPUL DALAM……..

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING……..…….....ii

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI……iii

MOTTO.....iv

PERSEMBAHAN.....v

KATA PENGANTAR.....vi

ABSTRAK.....ix

DAFTAR ISI.....x

DAFTAR TABEL.....xii

DAFTAR GAMBAR.....xiii

BAB I PENDAHULUAN.....1

A. Konteks Penelitian.....1

B. Fokus Penelitian.....7

C. Ruang Lingkup Penelitian.....7

D. Tujuan Penelitian.....8

E. Manfaat Penelitian.....8

F. Studi Terdahulu.....9

G. Kerangka Konseptual.....16

H. Metodologi Penelitian.....21

I. Sistematika Pembahasan.....26

BAB II PELAKSANAAN REVOLUSI HIJAU DI INDONESIA.....28

A. Sejarah Revolusi Hijau.....28

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Kebijakan Revolusi Hijau di Indonesia.....32

C. Pelaksanaan Revolusi Hijau di Indonesia 42

BAB III PELAKSANAAN REVOLUSI HIJAU DI KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 1979-1998 50

A. Gambaran Umum Kabupaten Banyuwangi.....50

B. Kondisi Sosial Masyarakat Kabupaten Banyuwangi 54

C. Pelaksanaan Revolusi Hijau di Kabupaten Banyuwangi 58

BAB IV DAMPAK REVOLUSI HIJAU PADA PERTANIAN PADI DI KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 1979-1998 71

A. Dampak Positif 74

B. Dampak Negatif 80

BAB V PENUTUP.....95

A. Kesimpulan.....95

B. Saran.....96

DAFTAR PUSTAKA.....97

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....103

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Hasil Produksi Padi Nasional Tahun 1982-1990…….45

Tabel 2.2 Harga Padi pada Tahun 1985-1995 (Rp./100 Kg.)……..……...47

Tabel 3.1 Pekerja Petani dan Buruh Tani di Kabupaten Banyuwangi berdasarkan Kecamatan Terbesar Tahun 1990……..…….57

Tabel 3.2 Hasil Padi di Kabupaten Banyuwangi Tahun 1979-1995……68

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Foto Presiden Soeharto dan Ibu Negara melakukan panen raya di Lokasi Transmigrasi Tanah Miring III Manokwari, Irian Jaya Papua pada 7 Mei 1994……46

Gambar 3.1 Pengurus Kelompok Tani "Karya Tani" di Kecamatan Gambiran…62

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Revolusi Hijau merupakan upaya untuk mengatasi masalah kelaparan global akibat pertumbuhan penduduk yang lebih cepat daripada pertumbuhan pangan. Revolusi Hijau sendiri bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pertanian secara signifikan melalui penerapan teknologi modern terutama di negara modern yang rawan krisis pangan. Revolusi Hijau merupakan ide dari Norman Ernest Borlaug yang prihatin terhadap ancaman kelaparan global akibat pesatnya perkembangan penduduk dan tidak diimbangi dengan produksi pangan yang cukup. Pada tahun 1940-an Borlaug melakukan penelitiannya tentang varietas bibit gandum baru di Meksiko setelah negara tersebut mengalami kemerosotan yang parah pada sektor pertanian. Borlaug berhasil menyempurnakan penelitiannya dengan menyilangkan varietas gandum lokal dari Meksiko dan Jepang dengan hasil tanaman gandum yang tahan serangan hama serta menyerap pupuk dengan baik. Keberhasilan Borlaug tersebut kemudian diikuti dengaan produksi gandum yang melonjak naik di Meksiko.[1]

Keberhasilan Borlaug di Meksiko kemudian dilirik oleh berbagai peneliti di banyak negara. Pada tahun 1960 ditengah terjadinya perang di Pakistan dan India, kedua negara tersebut juga mengalami permasalahan yang

[1] Norman E. Borlaug, "The Green Revolution Revisited and The Road Ahead," Special 30 Anniversary Lecture, The Norwegian Noble Institute, Oslo, September 8, 2000.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

sama dengan Meksiko yakni kekurangan bahan pangan. Borlaug kemudian membantu kedua negara tersebut dengan penuh usaha dalam mengimpor dan menanam benih gandum dari Meksiko, dalam satu musim kemudian hasil gandum mengalami peningkatan yang pesat. Setelah berakhirnya perang kemudian kedua negara tersebut dapat mencapai swasembada pada tanaman gandum, Pakistan mencapai swasembada pada tahun 1968. Kelonjakan produksi tanaman pangan di Asia pada tahun 1960 tersebut lebih dikenal dengan sebutan Revolusi Hijau yang merupakan proses penggabungan ilmu pengetahuan pertanian dengan teknologi modern.[2] Para ilmuwan yang dilatih Borlaug di Meksiko dan Asia kemudian menyebarkan temuannya ke berbagai negara di dunia, dari hal tersebut didapatka hasil yang sama yakni peningkatan hasil produksi pangan. Secara lebih lanjut berdampak pada ketahanan pangan dan mengurangi angka kematian akibat kelaparan.[3]

Ketahanan pangan adalah kondisi ketika semua orang mendapatkan akses yang sama terhadap kebutuhan pangan dengan aman untuk memenuhi kebutuhan fisiknya atau lainnya agar dapat melakukan kehidupan secara baik dan sehat. Hal tersebut berarti ketahanan pangan merupakan salah satu Hak Asasi Manusia yang harus terpenuhi, karena dengan terpenuhinya pangan maka kelaparan dapat terhindarkan. Hal tersebut menjadi salah satu tugas negara dalam memenuhi pangan dengan cara mengembangkan fasilitas untuk

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[2] Norman E. Borlaug, "Wheat Breading and its Impact on World Food Supply," Third International Wheat Genetic Symposium, Australian Academy of Science, Canberra, August 5-9, 1968

[3] "Norman E. Borlaug Ph.D Biography" Academy of Achievement, diakses pada 25 Juni, 2025, https://achievement.org/achiever/norman-e-borlaug/

menaikkan produksi pangan, mengatur perdangan pangan dan menjadi lembaga penyumbang pangan sehingga masyarakatnya dapat memenuhi pangan sendiri setelah mendapat dukungan dari negara. Revolusi Hijau kemudian diharapkan memenuhi hak atas pangan melalui peningkatan hasil pertanian dan stabilitas pasokan pangan. Meskipun disisi lain Revolusi Hijau berkontribusi terhadap hak pemenuhan pangan, upaya pewujudan pangan sebagai hak asasi harus tetap memperhatikan keadilan distribusi, akses sumber daya, dan kedaulatan masyarakat.[4]

Indonesia menjadi salah satu negara pelaksana Revolusi Hijau di dunia. Setelah berbagai krisis ekonomi, pangan dan kelaparan pada awal tahun 1960, Indonesia kemudian mulai menerapkan Revolusi Hijau sebagai solusi untuk menaikkan produksi pangan mereka. Pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto menjadikan stabilisasi dan pembangunan ekonomi politik sebagai landasan pemerintahannya, dengan menekankan pentingnya manajemen, keterampilan teknis, dan pembangunan ekonomi. Setelah situasi krisis teratasi, pemerintah mulai fokus melaksanakan program pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.[5]

Permasalahan pada periode sebelumnya yang membuat Indonesia mengalami krisis beras membuat pemerintah sadar akan pentingnya ketersediaan pangan. Industri dan pertanian menjadi prioritas pemerintah Orde

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[4] Henry Bernstein dan Dianto Bachriadi, *Tantangan Kedaulatan Pangan*, (Bandung: ARCBooks, 2014), 3

[5] Nova Anisa dan Siti Tiara Maulia, "Peran Pemerintah Orde Baru dalam Pembangunan Nasional", *Jurnal Causa* Vol. 4 No. 7 Tahun 2024: https://doi.org/10.3783/causa.v4i7.3706

Baru guna mendukung pembangunan pertanian. Pembangunan pertanian yang dilakukan oleh pemerintah juga bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup para petani. Hal tersebut mendorong pemerintah untuk melaksanakan modernisasi pertanian yang kemudian dikenal dengan sebutan "Revolusi Hijau".[6] Pemerintah Orde Baru kemudian mengambil langkah untuk memasukkan Revolusi Hijau ke dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA) yang dicanangkan pada tahun 1969. Konsep Revolusi Hijau juga dikenal melalui program Bimbingan Massal (Bimas), Intensifikasi Massal (Inmas) dan dikembangkan lebih jauh lewat Intensifikasi Khusus (Insus) untuk membantu petani meningkatkan produktivitas lahannya. Gerakan Bimas terdiri dari tiga komponen utama: penerapan teknologi yang sering disebut sebagai Panca Usaha Tani, penerapan kebijakan harga sarana dan hasil reproduksi, dan ketersediaan kredit dan infrastruktur.

Revolusi Hijau di Indonesia merupakan periode penting dalam sejarah pertanian yang terjadi pada masa Orde Baru. Revolusi Hijau di Indonesia merupakan tonggak penting dalam sejarah pertanian. Program ini berhasil meningkatkan produksi pangan dan mencapai swasembada beras. Revolusi Hijau berhasil meningkatkan produksi beras secara signifikan. Pada tahun 1984, Indonesia berhasil mencapai swasembada beras untuk pertama kalinya, dengan produksi mencapai 27,7 juta ton[7]. Dengan mempertimbangkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[6] Aris Agus Styawan, "Pengaruh Revolusi Hijau Terhadap Perubahan Sosial Ekonomi Petani Kabupaten Karanganyar Tahun 1969-1998", *Jurnal Kalpataru* Vol.8 No. 1, 2022: 87 https://doi.org/10.31851/kalpataru.v8i2.8971

[7] Jihan Nasywa Azahra dkk, "Revolusi Hijau Masa Orde Baru", *Jurnal Sindoro Cendikia Pendidikan* Vol. 5 No. 3 Tahun 2024: 3 https://doi.org/10.9644/sindoro.v5i3.3999

produksi padi dan beras yang merupakan makanan pokok di masyarakat kita dan berperan penting terhadap ketahanan pangan di Indonesia. Gerakan Revolusi Hijau di Indonesia melalui Bimas mulai memberikan pengaruh terhadap kenaikan produksi secara nasional.

Revolusi Hijau yang dilakukan oleh pemerintah melahirkan swasembada pangan beras seperti yang disebutkan sebelumnya, tetapi dalam keberlanjutannya Revolusi Hijau ini ternyata membawa dampak yang sebaliknya. Salah satunya adalah masalah petani sebagai pelaku utama dari program ini tidak kunjung mendapat nasib baik. Padahal petani sebagai aktor penting haruslah mendapat keuntungan berlipat dari hasil pertaniannya. Hal ini merupakan sebuah keresahan dari petani-petani yang memiliki lahan kecil, karena dalam bertani membutuhkan modal yang besar para petani lahan kecil ini hanya bekerja semampunya dan hasilnya pun cukup untuk mempertahankan hidupnya saja. Berbanding terbalik dengan petani yang memiliki lahan luas serta modal yang besar, mereka memiliki akses yang lebih mudah untuk mendapatkan teknologi pertanian terbaru untuk lahan mereka dan tentunya memiliki hasil yang lebih guna dijual maupun memenuhi kebutuhan hidup.[8]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Salah satu daerah terdampak kebijakan Revolusi Hijau adalah Jawa Timur yang menjadi lumbung padi nasional. Produksi beras wilayah Jawa Timur meningkat dari 3 juta ton pada tahun 1968 menjadi 7,7 ton pada tahun

[8] Hikmah Rafika Mufti, "Kebijakan Pangan Pemerintah Orde Baru dan Nasib Kaum Petani Produsen Beras Tahun 1969-1988" (Skripsi Universitas Indonesia 2009), hlm 6

1988.[9] Wilayah Eks-Karisidenan Besuki sebagai salah satu daerah penghasil beras terbesar di Jawa Timur, pada masa Revolusi Hijau juga mendapatkan suatu dorongan untuk meningkatkan produksi khususnya padi.[10] Dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur, Kabupaten Banyuwangi menjadi salah satu kabupaten utama penghasil padi.

Kabupaten Banyuwangi dulunya merupakan bagian dari wilayah Kerajaan Blambangan yang kemudian dalam perkembangannya menjadi bagian wilayah karisidenan Besuki yang letaknya berada di ujung timur pulau Jawa.[11] Pada masa penjajahan VOC Kabupaten Banyuwangi menjadi salah satu wilayah dengan perkebunan yang aktif. Bukan hanya sektor perkebunan saja, sektor pertanian di Kabupaten Banyuwangi juga banyak menghasilkan produk tanaman yang unggul. Tanaman padi di Banyuwangi salah satu yang menjadi sorotan dalam sektor pertanian. Pelaksanaan program Revolusi Hijau di Kabupaten Banyuwangi memiliki dampak yang beragam terhadap masyarakat petani maupun lingkungan persawahan itu sendiri. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti mengenai **"Kebijakan Revolusi Hijau dan Dampaknya terhadap Pertanian Padi di Kabupaten Banyuwangi Tahun 1979-1998".** Penelitian ini diharapkan memberikan pemaparan yang lengkap

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[9] Nurvianto dan Agus Trilaksana, "Intensifikasi Pertanian Tanaman Padi dalam Rangka Swasembada Beras Provinsi Jawa Timur Tahun 1969-1984", *Jurnal AVATARA* Vol. 2 No. 3, 2014, 599

[10] Ahmad Rizal Kurniawan Dkk, "Green Revolution in Wuluhan Sub-district Jember Regency 1969-1998", *Jurnal Historica* ISSN No. 2252-4673 Vol. 5 No. 2 Tahun 2021, 163

[11] Wiwin Indiarti, "Masa Lalu Masa Kini Banyuwangi, International Conference Indonesia: Art & Urban Culture", Universitas Sebelas Maret, 2016

dan jelas mengenai pelaksanaan Revolusi Hijau di Kabupaten Banyuwangi serta dampak-dampak yang didapatkan dari pelaksanaan program ini.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah yang dibahas pada penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Revolusi Hijau di Kabupaten Banyuwangi tahun 1979-1998?
2. Bagaimana dampak dari kebijakan Revolusi Hijau terhadap pertanian padi di Kabupaten Banyuwangi tahun 1979-1998?

C. Ruang Lingkup Penelitian

1. Batasan Temporal

   Batasan waktu yang peneliti ambil adalah tahun 1979-1998. Karena pada tahun ini kebijakan dari Revolusi Hijau mulai merata dilaksanakan di daerah-daerah Kabupaten Banyuwangi. Serta penggunaan pupuk dan teknologi pertanian sudah digunakan, karena pada tahun ini juga pertanian Indonesia mengalami kenaikan yang signifikan, lebih tepatnya pada Pelita III-IV (Pembangunan Lima Tahun). Pada perkembangan selanjutnya mulai mengalami penurunan pada Pelita V sampai Pelita VI.

2. Batasan Spasial

   Penelitian ini berfokus pada pertanian padi di Kabupaten Banyuwangi secara garis besar yang lebih ditekankan pada kecamatan-kecamatan besar di Kabupaten Banyuwangi dengan hasil produksi padi dan beras yang melimpah. Pada tahun 1980 juga pabrik-pabrik padi sudah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

banyak yang berdiri di kecamatan-kecamatan besar Banyuwangi, diantaranya ada Kecamatan Pesanggaran, Kecamatan Singojuruh, Kecamatan Gambiran, Kecamatan Rogojampi, Kecamatan Srono, dan Kecamatan Tegaldlimo.

D. Tujuan Penelitian

Dari gambaran rumusan masalah diatas, adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Revolusi Hijau di Kabupaten Banyuwangi tahun 1979-1998
2. Untuk mengetahui dampak dari kebijakan Revolusi Hijau terhadap pertanian padi di Kabupaten Banyuwangi tahun 1979-1998

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis maupun secara praktis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan untuk menambah wawasan serta pengetahuan sejarah mengenai kebijakan Revolusi Hijau yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Penelitian yang berjudul "Kebijakan Revolusi Hijau dan Dampaknya Terhadap Pertanian Padi di Kabupaten Banyuwangi Tahun 1979-1998" ini diharapkan memberikan wawasan baru mengenai pelaksanaan kebijakan Revolusi Hijau yang terdapat di Kabupaten Banyuwangi serta dampaknya terhadap pertanian padi. Penelitian ini juga diharapkan bisa memberikan referensi yang kuat, menyempurnakan karya

ilmiah selanjutnya serta memperkaya wacana ilmiah mengenai Revolusi Hijau.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini membantu penulis untuk menambah wawasan dan memberikan pemahaman mengenai kajian Revolusi Hijau dan dampak pelaksanaannya pada petani.

b. Bagi Lembaga

Penelitian ini berupaya untuk memberikan wawasan serta pengetahuan bagi pembaca karya tulis ilmiah ini, khususnya para akademisi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, selain itu penelitian ini juga berkontribusi dalam pemikiran sejarah pertanian dan sosial, khususnya mengenai Revolusi Hijau.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat kepada masyarakat luas mengenai perubahan dalam sistem pertanian lewat Revolusi Hijau dalam tulisan ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

F. Studi Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan tulisan dari peneliti lain yang menjadi sumber rujukan dan referensi yang memiliki relevansi dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Adapun hasil penelitian terdahulu yang penulis cantumkan sebagai berikut:

1. Penelitian yang ditulis oleh Zahra Maulidya Hanifah dkk dengan judul "Pengaruh Revolusi Hijau pada masa Orde Baru di Indonesia" pada tahun 2024. Penelitian ini menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa Revolusi Hijau memberikan dampak positif berupa meningkatkan produksi pangan dan mengurangi kemiskinan dilingkungan masyarakat, sedangkan dampak negatif dari Revolusi Hijau adalah ketimpangan sosial, kerusakan, dan penuruan keanekaragaman hayati.[12] Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini membahas konsep dari Revolusi Hijau yang tejadi di Indonesia secara umum, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus pada dampak Revolusi Hijau pada pertanian padi di Kabupaten Banyuwangi secara khusus.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Aris Agus Styawan dengan judul "Pengaruh Revolusi Hijau Terhadap Perubahan Sosial Ekonomi Petani di Kabupaten Karanganyar Tahun 1969-1998" pada tahun 2022. Penelitian ini menggunakan metode sejarah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kehidupan sosial ekonomi petani Kabupaten Karanganyar tidak serta merta berubah menjadi petani komersil hanya dengan adanya penggunaan teknologi baru di dunia pertanian, sebagiannya memilih untuk tetap menggunakan cara tradisional.[13] Perbedaan penelitian ini dengan yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian ini mengedepankan dampak yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[12] Zahra Maulidya Hanifah dkk, "Pengaruh Revolusi Hijau pada masa Orde Baru di Indonesia", *Jurnal Sindoro* DOI: doi.org/10.9644/sindoro.v4i5.3317, Vol 5 No 3 Tahun 2024

[13] Aris Agus Styawan, "Pengaruh Revolusi Hijau Terhadap Perubahan Sosial Ekonomi Petani di Kabupaten Karanganyar Tahun 1969-1998," *Jurnal Kalpataru* Vol 8 No 1 E-ISSN: 2621-7058, 2022

dialami oleh petani sedangkan penulis lebih condong kepada pertanian padi yang dilakukan oleh petani. Penelitian yang dilakukan oleh Styawan dilakukan di tempat yang berbeda dengan tempat penelitian penulis, serta tahun yang diteliti oleh penulis lebih pendek daripada penelitian Styawan ini.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Deni Hartanto dengan judul "Pembangunan Pertanian di Kabupaten Simalungun pada masa Orde Baru" pada tahun 2021. Penelitian yang ditulis oleh Deni Hartanto ini berfokus pada pembangunan pertanian yang terjadi di Kabupaten Simalungun, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembangunan pertanian di Kabupaten Simalungun yang digerakkan oleh pemerintah mengalami kegagalan dan terjadi konversi lahan pertanian menjadi perkebunan.[14] Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah pada fokus penelitian. Penelitian ini berfokus pada pertanian secara umum dan pengalihan lahan pertanian menjadi lahan perkebunan. Sementara pada penelitian ini penulis berfokus pada Revolusi Hijau di pertanian padi saja. Lokasi yang dipilih oleh peneliti juga berbeda yakni di Kabupaten Banyuwangi.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Hajarani Sabrina Nurin dengan judul "REPELITA dalam Bidang Pertanian di Pacitan Tahun 1994-1998" pada tahun 2020. Penelitian yang dilakukan oleh Nurin berfokus pada

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[14] Deni Hartanto, "Pembangunana Pertanian di Kabupaten Simalungun pada masa Orde Baru," *Jurnal Mukadimah* ISSN: 2622-1373 Vol 5 No 2, 2021 https://doi.org/10.30743/mkd.v5i2

REPELITA yang merupakan salah satu program dari pemerintah. Hasil dari penelitian adalah kenaikan hasil produksi beberapa tanaman pokok seperti jagung, padi, dan kacang tanah. Lalu bencana kemarau dan krisis moneter menyebabkan penuruan hasil pertanian tersebut.[15] Perbedaan penelitian ini dengan yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian ini berfokus pada program REPELITA yang sudah tertera dalam peraturan presiden, sementara penulis berfokus pada program Revolusi Hijau. Meskipun penelitian ini juga membahas mengenai pertanian, tetapi penelitian yang dilakukan oleh Nurin cakupannya cukup luas yakni pada tanaman padi, jagung, dan kacang tanah, sementara penulis hanya berfokus pada pertanian padi.

5. Penelitian yang ditulis oleh Cici Paramida dan Etmi Hardi dengan judul "Revolusi Hijau dan Menyusutnya Benih Padi Junjuang di Nagari Pakan Raba'a (1998-2019)" pada tahun 2020. Hasil dari penelitian ini adalah benih padi jenis Junjuang mengalami penurunan minat oleh masyarakat semenjak adanya Revolusi Hijau, karena menghasilkan padi yang lebih sedikit.[16] Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian ini berfokus pada satu jenis padi saja yang sudah tidak memiliki banyak peminat, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis berfokus pada pertanian padi secara umum dan dampaknya terhadap petani.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[15] Hajarani Sabrina Nurin, "REPELITA dalam Bidang Pertanian di Pacitan Tahun 1994-1998," (Skripsi STKIP PGRI Pacitan, 2020), 5

[16] Cici Paramida dan Etmi Hardi, "Revolusi Hijau dan Menyusutnya Benih Padi Junjuang di Negeri Pakan Raba'a (1998-2019)," *Jurnal Kronologi* Vol 2 No 4 Tahun 2020 DOI: https://doi.org/10.24036/jk.v2i4

Adapun penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Kabupaten Banyuwangi dengan batasan temporal pada tahun 1979-1998.

6. Penelitian yang ditulis oleh Haryono Rinardi dkk dengan judul "Dampak Revolusi Hijau dan Modernisasi Teknologi Pertanian: Studi Kasus pada Budi Daya Pertanian Bawang Merah di Kabupaten Brebes" pada tahun 2019. Penelitian yang dilakukan oleh Rinardi dkk menghasilkan kesimpulan bahwa pertanian bawang merah di Kabupaten Brebes memiliki dampak negatif dari Revolusi Hijau. Budidaya bawang merah yang dilakukan sangat ketergantungan dengan pupuk pestisida, sementara harga pupuk yang dijual tidaklah murah kemudian menghasilkan petani yang memiliki kredit di KUD.[17] Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang hendak peneliti lakukan adalah objek penelitian. Penelitian ini berfokus pada pertanian bawang merah serta dampaknya terhadap keberlangsungan pertanian bawang merah di Kabupaten Brebes. Sementara penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus pada pertanian padi serta dampaknya pada masyarakat petani. Lokasi penelitian yang dilakukan oleh Rinardi dengan penulis juga berbeda, penulis melakukan penelitian di Kabupaten Banyuwangi sementara Rinardi di Kabupaten Brebes.
7. Penelitian yang dilakukan oleh Desma Yulia dengan judul "Revolusi Hijau Kebijakan Ekonomi Pemerintah Bidang Pertanian di Kanagarian Selayo Tahun 1974-1998" pada tahun 2019. Hasil dari penelitian ini adalah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[17] Haryono Rinardi et al., "Dampak Revolusi Hijau Dan Modernisasi Teknologi Pertanian: Studi Kasus Pada Budi Daya Pertanian Bawang Merah Di Kabupaten Brebes," *Jurnal Sejarah Citra Lekha* 4, no. 2 (2019): 125–36, https://doi.org/10.14710/jscl.v4i2.21936.

pemerintah awalnya menggunakan pendekatan dengan tradisi *bakaua* untuk meyakinkan masyarakat mengenai Revolusi Hijau, pendekatan yang dilakukanpun berhasil dan petani meninggalkan cara tradisional dalam bertani. Hasilnya pertanian mereka mengalami peningkatan, namun setelah beberapa tahun berlalu petani di Kanagarian Selayo mengalami ketergantungan pada pupuk, benih, pestisida pada tanaman mereka.[18] Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian ini berfokus pada perubahan sistem pertanian yang terjadi di Kanagarian Selayo dari tradisional menuju teknologi, sedangkan penulis berfokus pada dampak dari Revolusi Hijau pada pertanian padi di Kabupaten Banyuwangi.

8. Penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Budi Nugroho dengan judul "Konstruksi Sosial Revolusi Hijau di Era Orde Baru" pada tahun 2018. Penelitian ini menggunakan pendekatan melalui perspektif konstruksi sosial Mary E. Pettenger, hasil dari penelitian ini adalah bahwa rezim Orde Baru memanfaatkan kekuasaan, penguasaan, norma sosial dalam usaha untuk menggalakkan mekanisme pertanian di Indonesia. Penggabungan dari hal-hal tersebut membentuk konstruksi sosial yang menyembunyikan berbagai kepentingan politik maupun pribadi didalamnya.[19] Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian ini berfokus pada aspek sosial dan mencoba menggali kepentingan para elit

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[18] Desma Yulia, "Revolusi Hijau Kebijakan Ekonomi Pemerintah Bidang Pertanian di Kanagarian Selayo Tahun 1974-1998" *Jurnal Historia* Vol 4 No 2 Tahun 2019 DOI: https://doi.org/10.33373/hstr.v4i2.1931

[19] Wahyu Budi Nugroho, "Konstruksi Sosial Revolusi Hijau di Era Orde Baru," *Jurnal SOCA* Vol 12 No 1 Tahun 2018 DOI: https://doi.org/10.24843/SOCA.2018.v12.i01.p04

politik dalam program Revolusi Hijau, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis berfokus pada aspek ekonomi dan sosial serta dampaknya terhadap petani. Perbedaan lainnya yang terdapat dalam penelitian ini adalah metode yang digunakan, metode yang digunakan oleh Nugroho adalah pendekatan perspektif konstruksi sosial Mary E. Pettenger sedangkan penulis menggunakan metode penelitian sejarah.

9. Penelitian yang ditulis oleh Lalilatul Muamaroh dengan judul "Pelaksanaan Program Bimbingan Massal (Bimas) Padi di Kabupaten Tulungagung Tahun 1984-1998" pada tahun 2017. Penelitian yang dilakukan oleh Lailatul Muamaroh mengangkat tema pelaksanaan program Bimas di Kabupaten Tulungagung. Hasil dari penelitian ini adalah program Bimas berhasil membawa swasembada beras tetapi masyarakat petani masih banyak yang tidak menerima perubahan teknologi pertanian dari tradisional ke modern.[20] Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah fokus pada penelitian ini pada pelaksanaan program Bimas saja meskipun juga membahas mengenai padi. Sementara penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus pada kebijakan pemerintah mengenai Revolusi Hijau.
10. Penelitian yang ditulis oleh Nurvianto dan Aus Trilaksana dengan judul "Intensifikasi Pertanian Tanaman Padi dalam Rangka Swasembada Beras Provinsi Jawa Timur Tahun 1969-1984" pada tahun 2014. Hasil dari

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[20] Lailatul Muamaroh, "Pelaksanaan Program Bimbingan Massal (Bimas) Padi di Kabupaten Tulungagung Tahun 1984-1998," *Jurnal Avatara* Vol 5 No 2, 2017

penelitian ini adalah faktor yang melatarbelakangi adanya intensifikasi pertanian adalah karena kurangnya produksi padi nasional. Pelaksanaan intensifikasi pertanian terdapat kendala oleh kinerja Bulog yang buruk tetapi masih berhasil meraih kenaikan produksi beras pada 1984 hingga target swasembada bisa terpenuhi.[21] Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian ini berfokus pada pertanian padi di provinsi Jawa Timur untuk memenuhi target swasembada beras serta tidak menyinggung mengenai Revolusi Hijau yang diangkat oleh penulis sebagai fokus utama, penulis juga berfokus pada Kabupaten Banyuwangi sebagai batasan spasial.

G. Kerangka Konseptual

Setiap penelitian memerlukan landasan berpikir untuk menjadi landasan pemecahan masalah yang akan diteliti. Kerangka konseptual atau kerangka berpikir memuat pikiran yang menjelaskan sudut pandang dalam sebuah penelitian. Kerangka konseptual berguna untuk menjelaskan keterkaitan setiap konsep yang muncul dari permasalahan yang akan diteliti.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

1. Revolusi Hijau

Revolusi Hijau adalah sebuah gerakan yang bertujuan untuk meningkatkan produksi pangan secara global melalui penerapan teknologi pertanian modern. Konsep dari Revolusi Hijau ini mencakup penggunaan benih unggul, pupuk kimia sintesis, pestisida dan mekanisme dalam

[21] Nurvianto dan Agus Trilaksana, "Intensifikasi Pertanian Tanaman Padi dalam rangka Swasembada Beras Provinsi Jawa Timur Tahun 1969-1984," *Jurnal AVATARA* Vol 2 No 3, 2014

pertanian untuk meningkatkan hasil panen secara signifikan. Gerakan ini muncul dari negara barat atas keresahan mereka mengenai pangan yang terus menyusut akibat Perang Dunia I. Pada tahun 1940 seorang agronomi bernama Norman Borlaug memulai penelitiannya di Meksiko setelah banyaknya masyarakat Meksiko yang kesulitan dengan lahan pertanian yang sedikit, tanaman yang banyak hama, dan hasil pertaniannya yang rendah.

Hasil penelitian dari Norman Borlaug kemudian menunjukkan hasil yang postif dimana gandum yang menjadi makanan pokok di Meksiko mengalami kelonjakan produksi. Keberhasilan ini merupakan ide dari Borlaug dalam menggambungkan varietas baru gandum yang dibuatnya dengan mekanisme baru teknologi pertanian. Produksi gandum yang ada pada saat itu bahkan lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan rakyat Mexico.[22] Karena keberhasilan Revolusi Hijau di Meksiko, gerakan ini kemudian menyebar di seluruh dunia pada 1950 dan 1960. Amerika Serikat yang awalnya menjadi negara yang mengimpor gandum di tahun 1940, karena Revolusi Hijau Amerika Serikat menjadi negara yang bisa memenuhi kebutuhan gandum di negaranya sendiri pada 1950, lalu menjadi pengekspor pada 1960.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Kebijakan mengenai pangan yang berkaitan dengan Revolusi Hijau sudah ada sejak akhir masa orde masa lama, seperti yang dijelaskan

[22] Amanda Briney, "History and Overview of the Green Revolution," diakses pada 23 Januari 2025, https://www.thoughtco.com/green-revolution-overview-1434948

sebelumnya Revolusi Hijau mulai menyebar di daerah Asia selatan pada tahun 1960. Indonesia pada tahun-tahun tersebut tengah mengalami kesulitan pangan, namun usaha-usaha yang dilakukan oleh Masa Pemerintah Soekarno tidak mengalami hasil yang berarti. Hal tersebut membuat pemerintah orde baru harus bekerja keras untuk menangani masalah tersebut.

Penerapan Revolusi Hijau terlaksana dalam program Bimbingan Massal (Bimas) yang dilakukan pada petani agar produktifitas pertanian membaik. Maka dilakukan pembibitan unggul pada pertanian, pemupukan, pengendalian hama serta penyakit tanaman, irigasi yang baik, dan perbaikan sistem bercocok tanam yang disebut sebagai Usaha Panca Tani.[23] Selain melaksanakan Bimas, pemerintah juga melakukan Intensifikasi Massal (Inmas) dan Intensifikasi Khusus (Insus).

Petani juga disediakan kredit khusus Bimas agar tidak khawatir mengenai modal. Kredit yang diberikan berasal dari Koperasi Unit Desa (KUD) yang memiliki tugas utama untuk mengatasi masalah produksi termasuk didalamnya kredit dan ketentuan bagi hasil, menyediakan saran produksi, serta pengolahan dan pemasaran hasil produk. Dari bantuan kredit tersebut petani dapat membeli benih yang unggul serta pestisida.[24] Revolusi Hijau identik dengan perubahan yang ada dalam sistem pertanian dengan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[23] Wahyu Dwi Ramadhani, "Mengatasi Masalah Dengan Transformasi Teknologi Di Sektor Pertanian Untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional Yang Berkelanjutan," *Journal of Economics Development Issues* 6, no. 2 (2023): 87–94, https://doi.org/10.33005/jedi.v6i2.143.

[24] Lailatul Muamaroh, "Pelaksanaan Program Bimbingan Massal (Bimas) Padi di Kabupaten Tulungagung Tahun 1984-1998," *Jurnal Avatara* Vol 5 No 2, 2017

adanya benih yang unggul, pupuk kimia sintesis yang mempercepat pertumbuhan tanaman, teknologi irigasi, serta penggunaan mesin dalam pertanian.

2. Perubahan Sosial

Perubahan sosial merupakan sebuah fenomena yang dialami oleh setiap lapisan masyarakat. Setiap manusia selama masa hidupnya pasti mengalami perubahan dalam berbagai aspek, seperti pada kehidupan sosial masyarakatnya, pergaulannya, maupun lingkungan hidupnya. Menurut Macionis perubahan sosial adalah perubahan dalam kehidupan bermasyarakat yang didasarkan pada pola berpikir dan perilaku dalam waktu tertentu. Sedangkan Soemardjan mendefinisikan perubahan sosial sebagai perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan didalam suatu masyarakat yang memengaruhi sistem sosialnya.[25]

Pelopor dari perubahan adalah seseorang atau sekelompok orang yang dipercayai oleh masyarakat sebagai pemimpin dari salah satu atau beberapa lembaga sosial. Ketika melakukan perubahan tersebut para pelopor ini memunginkan untuk mendapat pengaruh oleh tekanan sosial. Maka dari itu, perubahan tersebut sering menimbulkan perubahan sosial pada lembaga-lembaga lainnya. Lembaga-lembaga yang ada di masyarakat seperti lembaga ekonomi, politik, keagamaan, dan pendidikan memiliki keterikatan satusama lain, dari hal tersebut maka suatu perubahan penting yang terjadi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[25] Nanang Martono, *Sosiologi Perubahan Sosial Perspektif Klasik Moder Posmodern dan Poskoloial* (Depok: Rajawali Pers, 2018), 4

pada suatu lembaga memungkinkan untuk lembaga lainnya mengikuti perubahan tersebut.[26]

Selo Soemardjan dalam teori perubahan sosialnya menjelaskan bahwa perubahan sosial terjadi akibat faktor dari lembaga-lembaga yang ada dalam masyarakat seperti teknologi, nilai-nilai sosial dan struktur ekonomi. Revolusi Hijau yang mencakup penggunaan teknologi pertanian modern, seperti pupuk pestisida dan bibit unggul untuk meningkatkan hasil pertanian, dianggap sebagai perubahan dalam konteks pertanian. Teori perubahan sosial oleh Soemardjan dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana perubahan dalam dunia pertanian dapat mempengaruhi pola kehidupan petani tidak hanya dalam perekonomian namun juga dalam konteks sosial serta nilai-nilai kemasyarakatan lainnya.

Pada penelitian ini penulis mengambil tema sejarah pertanian dan sosial yang terjadi pada masyarakat petani padi. Perubahan sosial yang didasarkan pada Revolusi Hijau sebagai pemicu utama dari perubahan di masyarakat petani. Perubahan yang terjadi berdampak pada banyak bidang atau lembaga di masyarakat, mulai dari sosial masyarakat yang akhirnya membuat perbedaan antara petani satu dengan lainnya, ekonomi petani yang mengalami pasang surut, serta lingkungan pertanian yang beragam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[26] Selo Soemardjan, *Perubahan Sosial di Yogyakarta* (Jakarta: Komunitas Bambu, 2009) 448

H. Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah. Metode penelitian sejarah menurut Garraghan adalah suatu kumpulan yang sistematis berdasarkan prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang bertujuan untuk membantu dalam pengumpulan sumber dari sejarah, dalam menilai atau menguji sumber-sumber secara kritis, dan menyajikan hasilnya dala bentuk tulisan berdasarkan hasil yang sudah dicapai.[27]

Penelitian sejarah menurut Kuntowijoyo ada lima tahap, yaitu 1) pemilihan topik, 2) heuristik (pengumpulan sumber), 3) verifikasi (kritik sejarah, keabsahan sumber), 4) interpretasi, dan 5) historiografi (penulisan sejarah).[28] Berikut adalah penjelasan dari tahapan-tahapan yang perlu dilakukan dalam penelitian sejarah:

1. Pemilihan Topik

   Sebelum melakukan penelitian, langkah yang perlu dilakukan yakni menetukan topik penelitian. Topik yang sebaiknya dipilih adalah berdasarkan kedekatan emosional ataupun kedekatan intelektual. Penulis yang memiliki kedekatan intelektual terhadap topik yang diteliti lebih memudahkannya dalam melakukan penelitian.

   Revolusi Hijau sendiri merupakan sebuah program yang dilakukan oleh pemerintah dalam bidang pertanian untuk menaikkan taraf hidup masyarakat pada masa orde baru. Penulis tertarik untuk melakukan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[27] Wasino dan Endah Sri Hartatik, *Metode Penelitian Sejarah dari Riset hingga Penulisan* (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2018), 11

[28] Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Penerbit Tiara Wacana, 2013), 69

penelitian ini karena penulis ingin mengetahui pelaksanaan dari Revolusi Hijau ini di bidang pertanian padi khususnya di daerah Kabupaten Banyuwangi. Selain itu juga program Revolusi Hijau ini juga memberikan pengaruh sosial bagi para petani sebagai pelaku utamanya sehingga hal ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan.

Kedekatan intelektual yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan *research* terlebih dahulu untuk menentukan topik dan fokus penelitian. Berdasarkan penggunaan kedekatan tersebut penulis berharap mampu mendapatkan sumber dan data yang relevan berkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis. Penelitian ini didasarkan dengan pelaksanaan revolusi di seluruh wilayah Indonesia sesuai dengan instruksi dari pemerintah orde baru. Penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana implementasi Revolusi Hijau ini berjalan, melihat wilayah Indonesia yang beragam juga dampaknya pada masyarakat petani. Hal tersebut menjadikan topik ini menarik untuk ditelusuri dan diteliti.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2. Heuristik (Pengumpulan Sumber)

Penulusuran dan pengumpulan sumber sejarah perlu dilakukan karena ketika seorang sejarawan hendak menulis kisah masa lampau, usaha pertama yang dilakukan adalah mencari atau menemukan jejak-jejak yang ditinggalkan atau yang disebut sebagai sumber sejarah.[29] Pengumpulan sumber disebut juga dengan istilah heuristik. Dalam penelitian sejarah,

[29] Nina Herlina, *Metode Sejarah* (Bandung: Satya Historika, 2020), 7

sumber dibagi menjadi dua jenis, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Berikut sumber-sumber yang ditemukan oleh penulis:

a. Sumber Primer

Sumber primer dalam penelitian ini ditemukan dalam bentuk dokumen tertulis yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur serta koran-koran yang terbit di zaman yang sama dengan batasan temporal dalam penelitian. Selain itu sumber primer lainnya yang didapatkan penulis berupa sumber lisan. Sumber lisan dalam penelitian ini didapatkan dari wawancara dengan petani yang aktif bertani pada tahun 1979-1998.

b. Sumber Sekunder

Adapun sumber sekunder yang ditemukan oleh penulis berupa buku, jurnal, skripsi, artikel, dan sebagainya yang berkaitan dengan peneltian Revolusi Hijau yang dilakukan oleh penulis.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

3. Verifikasi (Kritik Sumber)

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Setelah melalui tahapan pengumpulan sumber atau data, langkah selanjutnya adalam melakukan verifikasi atau kritik keabsahan sumber yang ditemukan, baik sumber primer maupun sumber sekunder. Sumber yang telah ditemukan dan diverifikasi diantaranya dokumen tertulis dari Badan Pusat Statistika Kabupaten Banyuwangi dengan judul Kabupaten Banyuwangi dalam Angka Tahun 1980-1998 serta Koran yang terbit di tahun yang sama dengan batasan temporal penelitian ini dari Koran terbitan Jawa Post, Suara Karya, Berita Yudha dan Bali Post; foto; hasil wawancara

serta penelitian terdahulu berupa artikel ilmiah, jurnal, buku, dan skripsi/tesis. Tahapan dari verifikasi atau kritik sumber ada dua, diantaranya:

a. Kritik Eksternal, merupakan kritik yang dilakukan untuk menguji otentisitas dari sumber dilihat dari faktor luar yang diitemukan. Kritik ekstern dalam penelitian ini adalah penulis melakukan penelusuran terhadap sumber berupa dokumen dengan melihat bentuk kertas, dan ukuran. Kritik ekstern ini juga dilakukan untuk membuktikan keaslian dalam sumber artefak baik berupa foto, dokumen tertulis, dan sebagainya dilihat dari bahan, ukuran, dan bentuk sumber yang ditemukan.
b. Kritik Internal, merupakan kritik yang dilakukan untuk menguji isi dari sumber yang ditemukan. Kritik internal berkaitan dengan kredibilitas sumber agar dapat dipercaya. Kritik internal dilakukan dengan cara menguji isi dari sumber. Kritik internal yang penulis lakukan adalah dengan mencari kebenaran dan asal usul dari dokumen, Koran dan lainnya yang ditemukan oleh penulis.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

4. Interpretasi

Interpretasi yang dilakukan pada tahap ini adalah pada data yang berasa dari Badan Pusat Statistika Kabupaten Banyuwangi Tahun 1980-1998 serta Koran yang terbit di tahun yang sama dengan batasan temporal penelitian ini dari Koran terbitan Jawa Post, Suara Karya, Berita Yudha dan Bali Post serta pada data primer dan sekunder lainnya. Pada dasarnya

interpretasi sendiri merupakan proses dalam memecahkan masalah yang dilakukan melalui fakta-fakta dan bukti-bukti yang telah ditemukan dan diseleksi sebelumnya melalui kritik eksternal dan kritik internal. Interpretasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara mengolah fakta-fakta yang telah diperoleh serta diseleksi menggunakan referensi yang dijadian pokok pikiran sebagai kerangka dasar dalam penyusunan penelitian ini.

5. Historiografi (Penulisan Sejarah)

Tahapan terakhir dari metode yang dilakukan dalam penelitian sejarah adalah penulisan sejarah atau disebut juga historiografi. Historiografi merupakan tahapan penulisan hasil berdasarkan penafsiran dari fakta-fakta yang didapatkan dan usaha dalam merekonstruksi masa lampau yang bertujuan untuk memberikan jawaban dari permasalahan yang telah dirumuskan.[30] Dalam penelitiaan ini, penulis memaparkan hasil dari penelitian berdasarkan fakta, data dan sumber sejarah yang telah ditemukkan sehingga dapat menghasilkan penelitian dengan jelas sesuai sistematika penulisan skripsi yang benar dengan judul, yakni: "Kebijakan Revolusi Hijau dan Dampaknya Terhadap Pertanian Padi di Kabupaten Banyuwangi Tahun 1979-1998".

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[30] Lulu Liani, "Rubrik Moerangkalih dalam Surat Kabar Sipatahoenan Sebagai Sarana Edukasi pada Tahun 1935", (Skripsi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020), 17

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi dimulai dari bab pertama yakni pendahuluan sampai bab terakhir yakni penutup. Maka dibutuhkan uraian pembahasan yang sistematis untuk memaparkan hasil penelitian secara runtut guna mempermudah pembaca dalam memahami pembahasan yang telah dipaparkan oleh penulis. Adapun sistematika dari penelitian ini sebagai berikut:

1. **BAB I (Pendahuluan)**

   Bab ini terdiri dari beberapa hal, yakni latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian, manfaat penelitian, studi terdahulu, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

2. **BAB II (Pelaksanaan Revolusi Hijau di Indonesia)**

   Bab ini berisi deskripsi mengenai latar belakang Revolusi Hijau di Indonesia dan pelaksanaannya di daerah-daerah yang ada di Indonesia. Bab ini juga akan menjelaskan lebih lanjut mengenai kebijakan apa saja yang berkaitan dengan Revolusi Hijau.

3. **BAB III (Pelaksanaan Revolusi Hijau di Kabupaten Banyuwangi Tahun 1979-1998)**

   Dalam bab ini memuat pembahasan mengenai pelaksanaan dari Revolusi Hijau di Kabupaten Banyuwangi. Pembahasan pada bab ini

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

dimulai dari peraturan pelaksanaan Revolusi Hijau dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah hingga pemerintah desa.

4. **BAB IV (Dampak dari Revolusi Hijau pada Pertanian Padi di Kabupaten Banyuwangi Tahun 1979-1998)**

   Pada bab keempat ini akan dijelaskan mengenai dampak yang terjadi akibat pelaksanaan Revolusi Hijau di Kabupaten Banyuwangi. Dampak sosial maupun ekonomi yang dialami oleh masyarakat dan juga petani sebagai pelaku utama program ini. Serta dampak terhadap lingkungan tempat pelaksanaan dari Revolusi Hijau.

5. **BAB V (Penutup)**

   Pada bab terahir ini memuat kesimpulan serta saran. Kesimpulan berisi ringkasan seluruh hasil penelitian yang diperoleh melalui hasil analisis dan interpretasi data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

PELAKSANAAN REVOLUSI HIJAU DI INDONESIA

A. Sejarah Revolusi Hijau

Revolusi Hijau adalah sebuah gerakan yang bertujuan untuk meningkatkan produksi pangan secara global melalui penerapan teknologi pertanian modern. Konsep dari Revolusi Hijau ini mencakup penggunaan benih unggul, pupuk kimia sintesis, pestisida dan mekanisme dalam pertanian untuk meningkatkan hasil panen secara signifikan. Gerakan ini muncul dari negara barat atas keresahan mereka mengenai pangan yang terus menyusut akibat Perang Dunia I. Pada tahun 1940 seorang agronomi bernama Norman Borlaug memulai penelitiannya di Meksiko setelah banyaknya masyarakat Meksiko yang kesulitan dengan lahan pertanian yang sedikit, tanaman yang banyak hama, dan hasil pertaniannya yang rendah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Penelitian dari Norman Borlaug kemudian menunjukkan hasil yang postif dimana gandum yang menjadi makanan pokok di Meksiko mengalami kelonjakan produksi. Keberhasilan ini merupakan ide dari Borlaug dalam menggambungkan varietas baru gandum yang dibuatnya dengan mekanisme baru teknologi pertanian. Produksi gandum yang ada pada saat itu bahkan lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan rakyat Mexico.[31] Karena keberhasilan Revolusi Hijau di Meksiko, gerakan ini kemudian menyebar di seluruh dunia

[31] Amanda Briney, "History and Overview of the Green Revolution", updated on October 08, 2024 https://www.thoughtco.com/green-revolution-overview-1434948

pada 1950 dan 1960. Amerika Serikat yang awalnya menjadi negara yang mengimpor gandum di tahun 1940, karena Revolusi Hijau Amerika Serikat menjadi negara yang bisa memenuhi kebutuhan gandum di negaranya sendiri pada 1950, lalu menjadi pengekspor pada 1960.

Penelitian-penelitian kemudian dilakukan berkenaan dengan Revolusi Hijau untuk meningkatkan produksi pangan guna menumbuhkan populasi dunia, penelitian ini kemudian dibiayai oleh *Rockefeller Foundation* dan *Ford Foundation* serta para pemerintah dunia. Pada tahun 1963 kemudian di Meksiko berdiri sebuah institusi penelitian internasional yang disebut dengan "*The International Maize and Wheat Improvement Center*". Istilah Revolusi Hijau sendiri berasal dari Willia S. Gaud dari USAID (*United State Agency for International Development*) pada tahun 1968 setelah memperkenalkan teknologi baru dalam dunia pertanian yang memberikan kenaikan hasil produksi gandum.[32]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Negara di seluruh dunia kemudian mulai menerapkan gerakan Revolusi Hijau ini, salah satunya adalah India. Pertumbuhan penduduk yang pesat di India memerlukan pangan yang tercukupi untuk mencegak kelaparan massal. Borlaug dan *Ford Foundation* kemudian melakukan penelitian di India dan menghasilkan varietas padi baru yakni IR8, bibit padi baru ini terbukti menghasilkan padi yang lebih banyak jika mendapat pengairan dan pupuk yang baik. India saat ini merupakan salah satu negara dengan produksi padi

[32] Ann Raeboline Lincy Eliazer Nelson, Kavitha Ravichandran, and Usha Antony, "The Impact of the Green Revolution on Indigenous Crops of India," *Journal of Ethnic Foods* 6, no. 1 (2019): 1–10, https://doi.org/10.1186/s42779-019-0011-9.

terbanyak, penggunaan benih padi IR8 kemudian menyebar di daerah Asia dalam dekade tersebut.

Revolusi Hijau menghasilkan banyak benih unggul, benih unggul tersebut mampu menghasilkan 20% lebih banyak daripada sebelumnya dan lebih menyerap pupuk nitrogen. Hasil panen pun menjadi lebih singkat daripada sebelumnya, dengan hal tersebut juga maka musim panen meningkat menjadi 2-3 kali setiap tahun. Secara cepat, varietas baru yang dikenalkan, yakni IR-8 hanya butuh 130 hari untuk matang. Kemudian ada varietas baru lainnya seperti IR-72 yang hanya butuh 100 hari untuk matang, sementara varietas tradisioonal butuh 150 hingga 180 hari untuk matang.[33]

Varietas unggul padi yang sesuai untuk pertanian di iklim tropis yang ada di Asia Selatan didapatkan dari IRRI (*International Rice Research Institute*) di Filipina pada tahun 1960, berdasarkan genetik kerdil yang didapatkan dari China, Taiwan, dan Indonesia. Varietas paling terkenal yang dikenalkan oleh Revolusi Hijau di India adalah IR-8, dimana varietas ini dikembangkan berdasarkan pengalaman dari pengembangan varietas Norin Jepang. Hasil dari IR-8 di India sendiri adalah 5-10 ton per hektar. Revolusi Hijau berperan dalam penggunaan varietas unggul padi dan gandum dan pangaplikasiannya dalam pertanian yang melibatkan penggunaan pupuk kimia sintesis, pestisida, dan teknologi pertanian lainnya. Teknologi ini juga menjadi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[33] W. Paul Davies, "An Historical Perspective from the Green Revolution to the Gene Revolution," *Nutrition Reviews* 61, no. 6 II (2003), https://doi.org/10.1301/nr.2003.jun.s124-s134.

berdampak pada pertumbuhan pangan dari 2,4% per tahun sebelum 1965 menjadi 3,5% setelah 1965.[34]

Varietas padi baru yang memiliki kualitas bagus disebut dengan HYV (*high yielding variety*). Sementara padi yang terkenal di Indonesia berdasarkan hasil yang diperoleh Revolusi Hijau adalah padi jenis IR 36 dan IR 64. Sampai saat ini varietas padi jenis IR 64 masih diminati oleh masyarakat Indonesia karena rasanya yang enak, produktivitasnya tinggi serta dapat diterima oleh orang Indonesia. Tetapi, varietas padi HYV ini memiliki kekurangan yakni hanya berproduksi baik apabila lingkungan pertanian diubah, sawah yang menjadi lahan pertanian diberikan pupuk dengan dosis yang tinggi, irigasi yang baik, serta hama dan penyakit yang harus dikendalikan dengan pestisida.[35]

Meskipun terdapat lonjakan yang tinggi terhadap pangan di setiap negara yang mengimplementasikan program atau gerakan ini, disisi lain terdapat pula kelaparan yang tidak sepenuhnya teratasi. Amerika Selatan misalnya, sementara persediaan pangan meningkat hapir 8 persen, jumlah orang yang kelaparan juga meningkat, 19 persen. Asia selatan juga mengalami hal yang sama dimana terdapat 9 persen pangan per orang pada 1990, tetapi juga terdapat orang yang 9 persennya mengalami kelaparan. Jumlah persediaan pangan per orang meningkat tetapi yang menyebabkan masih adanya kelaparan adalah kegagalan dalam mengatasi ketidakseimbangan akses terhadap pangan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[34] Eliazer Nelson, Ravichandran, and Antony, "The Impact of the Green Revolution on Indigenous Crops of India."

[35] Roedhy Poerwanto dkk, Sejarah dan Perkembangan Revolusi Hijau, Revolusi Bioteknologi, dan Revolusi Hijau Lestari dalam *Merevolusi Revolusi Hijau*, ed Roedhy Poerwanto dkk (Bogor: IPB Press 2012), hlm 1-6

dan olahan pangan.[36]Petani dengan skala kecil tidak mampu untuk membeli pupuk, sementara disisi lain petani yang memiliki uang lebih bisa mendapatkan diskon dari pembelian pupuk dalam jumlah besar. Pemerintah juga berperan dalam hal ini subsidi kredit pada petani tidak sesuai sasaran, petani skala kecil tidak memperoleh subsidi kredit yang baik, sementara petani dengan skala yang lebih besar mendapatkan keuntungan yang lebih dengan adanya subsidi kredit ini.

Selain berdampak pada pelaku pertanian itu sendiri yakni para petani, Revolusi Hijau juga berdampak pada lingkungan sekitar. Melihat dari penggunaan pupuk kimia sintesis yang berlebihan membuat unsur alami hara yang terdapat dalam tanah terganggu. Varietas unggul yang dihasilkan memang memiliki hasil yang unggul juga tetapi disamping itu juga membutuhkan banyak perawatan salah satunya dari penggunaan pupuk kimia sintesis. Penggunaan pupuk kimia sintesis dalam Revolusi Hijau ini sangat tinggi sehingga menyebabkan penurunan unsur kimia alami dalam tanah dan meningkatkan alkalinitas dan salinitas dalam tanah yang memberikan dampak negatif dalam kesuburan tanah dan pertumbuhan tanaman.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Kebijakan Revolusi Hijau di Indonesia

Kebijakan mengenai pangan yang berkaitan dengan Revolusi Hijau sudah ada sejak akhir masa Pemerintah Soekarno, seperti yang dijelaskan

[36] Peter Rosset, "Lessons from the Green Revolutin", diakses pada 23 Januari 2025, https://towardfreedom.org/wp-content/uploads/2015/08/greenrevolution.pdf,

sebelumnya Revolusi Hijau mulai menyebar di daerah Asia selatan pada tahun 1960. Indonesia pada tahun-tahun tersebut tengah mengalami kesulitan pangan, namun usaha-usaha yang dilakukan oleh masa Pemerintah Soekarno tidak mengalami hasil yang berarti. Hal tersebut membuat pemerintah orde baru harus bekerja keras untuk menangani masalah tersebut.[37] Pemerintah orde baru kemudian mengambil langkah dengan merangsang pertumbuhan ekonomi lewat pembangunan di sektor pertanian. Presiden Soeharto pada pidato kenegaraan Presiden RI 16 Agustus 1988 menerangkan bahwa:

> "Garis-garis besar haluan Negara tahun 1983 menetapkan bahwa prioritas pembangunan bidang ekonomi dengan titik berat pada sektor pertanian. Pembangunan pertanian diarahkan untuk meningkatkan produksi pertanian guna memenuhi kebutuhan pangan dan kebutuhan industry dalam negeri serta meningkatkan ekspor, meningkatkan pendapatan petani, memperluas kesempatan kerja, mendorong pemerataan kesempatan berusaha."

Pemerintah orde baru kemudian bekerjasama dengan peneliti dari IPB (Institut Pertanian Bogor) untuk mengatasi permasalahan tersebut. Peneliti IPB kemudian merencanakan program Revolusi Hijau agar diimplementasikan di Indonesia. Rencana ini kemudian disambut baik oleh pemerintah, langkah selanjutnya yang diambil pemerintah adalah dengan membuat Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA) salah satunya untuk menangani permasalahan pangan di seluruh daerah Indonesia.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[37] Roedhy Poerwanto dkk, Sejarah dan Perkembangan Revolusi Hijau, Revolusi Bioteknologi, dan Revolusi Hijau Lestari dalam *Merevolusi Revolusi Hijau*, ed Roedhy Poerwanto dkk (Bogor: IPB Press 2012), 6

REPELITA pertama kali dimulai pada tahun 1969 yang tertera di dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1969 tentang Pengendalian Operasional Pembangunan Lima Tahun 1969-1973, REPELITA I bertujuan untuk menaikkan taraf hidup rakyat dengan sasaran utama pada pembangunan bidang pertanian.[38] Program ini dianggap memiliki keberhasilan yang kemudian menjadi alasan keberlangsungan REPELITA II-VI. REPELITA kemudian memasukkan Revolusi Hijau dalam programnya demi mencapai kemandirian pangan. Setiap lima tahun sebelum dimulainya program REPELITA selanjutnya, pemerintah mengeluarkan peraturan baru untuk menentukan arah dan fokus dari setiap REPELITA, tetapi meskipun setiap REPELITA memiliki arah dan fokus yang berbeda tujuannya tetap satu yakni pembangunan nasional.

Revolusi Hijau kemudian diimplementasikan disetiap REPELITA demi mencapai swasembada pangan sebagai salah satu cita-cita dari pembangunan nasional. Revolusi Hijau kemudian mulai berjalan di beberapa bagian di wilayah Indonesia, hasilnya berupa swasembada pangan pada tahun 1984 yang mengantarkan Presiden Soeharto menerima penghargaan dari *Food and Agriculture Organizatio* (FAO). Presiden Soeharto dalam agenda yang sama juga menyumbangkan padi pada korban kelaparan di Afrika, hal ini menegaskan bawah Indonesia merupakan negara yang dapat meningkatkan kemampuannya sendiri. [39]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[38] Rizki Rahmawati, "REPELITA : Sejarah Pembangunan Nasional Di Era Orde Baru," *ETNOHISTORI: Jurnal Ilmiah Kebudayaan Dan Kesejarahan* IX, no. 2 (2022): 36–42.

[39] Museum Kepresidenan, "Presiden Soeharto dan Swasembada Pangan," diakses pada 26 Januari 2025 https://museumkepresidenan.id/artikel/swasembada-pangan/

Penerapan Revolusi Hijau dalam REPELITA terwujud dalam program Bimbingan Massal (BIMAS) yang dilakukan pada petani agar produktifitas pertanian membaik. Maka dilakukan pembibitan unggul pada pertanian, pemupukan, pengendalian hama serta penyakit tanaman, irigasi yang baik, dan perbaikan sistem bercocok tanam yang disebut sebagai Usaha Panca Tani.[40] Selain melaksanakan BIMAS, pemerintah juga melakukan Intensifikasi Massal (INMAS) dan Intensifikasi Khusus (INSUS) dan lainnya.

1. REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun)

Peraturan pemerintah atau kebijakan mengenai bidang pertanian yang berkaitan dengan Revolusi Hijau sudah ada sejak masa Pemerintahan Soekarno dan lebih ditekankan pada masa orde baru. Pemerintah Orde baru membuat kebijakan untuk mendukung terlaksananya Revolusi Hijau di berbagai wilayah Indonesia, diantaranya kebijakan besar seperti REPELITA yang bertujuan untuk pembangunan nasional dan didalamnya mencakup peraturan pembangunan bidang pertanian. REPELITA pertama kali dilaksanakan pada 1 April 1969 berdasarkan Surat Keteputusan Presiden Republik Indonesia yang dikeluarkan di tahun yang sama. Hasil dari REPELITA pertama dapat dikatakan pemerintah berhasil dengan baik, pemerintah telah berhasil menurunkan inflasi sebesar 650% dalam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[40] Wahyu Dwi Ramadhani, "Mengatasi Masalah Dengan Transformasi Teknologi Di Sektor Pertanian Untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional Yang Berkelanjutan," *Journal of Economics Development Issues* 6, no. 2 (2023): 87–94, https://doi.org/10.33005/jedi.v6i2.143.

tahun 1966 menjadi 10% pada 1969/1970, hal tersebut juga berdampak pada kepercayaan masyarakat yang meningkat terhadap pemerintah.[41]

Pelaksanaan REPELITA pertama yang dianggap berhasil kemudian membuat pemerintah meneruskan program ini pada REPELITA II dan seterusnya, setiap program REPELITA memiliki tujuan dan sasaran yang berbeda tetapi memiliki satu fokus yakni pembangunan nasional. REPELITA II berfokus pada meneruskan program yang sudah ada pada REPELITA sebelumnya dan mempertahankannya. Pada REPELITA III yang terlaksana pada 1979-1984 baru terasa hasil yang memuaskan dari pelaksanaan REPELITA sebelumnya, yakni berupa swasembada beras pada tahun 1984. REPELITA kemudian berlanjut selama masa pemerintahan Orde Baru dan berakhir juga pada tahun 1998, tahun yang sama dengan berakhirnya pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2. BIMAS (Bimbingan Massal)

Selain itu pemerintah Orde Baru juga mengeluarkan beberapa peraturan atau kebijakan untuk mendukung pertanian, diantaranya penetapan program BIMAS (Bimbingan Massal) untuk mendukung peningkatan produksi pertanian khususnya pangan yang tertera dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 1969 Tentang Organisasi dan Tata Kerdja BIMAS.[42] Program BIMAS sendiri bertujuan

[41] Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia didepan Sidang DPR-GR 16 Agustus 1970 tentang Pelaksanaan Tahun Pertama REPELITA (1 April 1969 s/d 31 Maret 1970)

[42] "Keputusan Presiden No 95 Tahun 1969," BPK RI, diakses pada 25 April 2025 https://peraturan.bpk.go.id/Details/105484/keppres-no-95-tahun-1969

untuk meningkatkan produksi pertanian dan kesejahteraan petani dengan memberikan bimbingan teknis dalam penggunaan teknologi pertanian modern. Program BIMAS mendapatkan dukungan finansial dari pemerintah untuk menyediakan kredit dan fasilitas lainnya dalam bidang pertanian.

Program BIMAS dilaksanakan secara luas di berbagai daerah di Indonesia termasuk di tingkat desa, kecamatan, kabupaten, dan provinsi. Setiap wilayah pelaksanaan BIMAS biasanya dibagi dalam unit-unit desa yang disertai fasilitas pendukung seperti Koperasi Unit Desa (KUD), kios sarana produksi serta penyuluhan pertanian yang menjadi bagian dari program BIMAS.[43] Secara organisasi BIMAS memiliki satuan pelaksana di tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten, hal ini menunjukkan bahwa program ini berjalan di hampir semua daerah pertanian di Indonesia dan tidak terbatas pada satu wilayah saja.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Program BIMAS dalam tingkat desa dijalankan oleh Satuan Penggerak BIMAS Desa yang dipimpin oleh Kepala Desa sebagai ketua. Satuan ini bertugas untuk menggerakkan seluruh unsur dan petugas terkait dalam pelaksanaan program BIMAS, dan bertanggung jawab pada Satuan Penggerak BIMAS Kecamatan.[44] Petugas BIMAS, termasuk penyuluh pertanian dan mahasiswa yang diterjunkan bertugas memberikan

[43] "Perwujudan Panca Usaha Pertanian" BIMAS, diakses pada 25 April 2025 https://pengabdian.ugm.ac.id/2020/03/27/BIMAS/

[44] "Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1997 tentang Badan Pengendali Bimbingan Massal," BPK RI, diakses pada 25 April 2025, https://peraturan.bpk.go.id/Details/59618/keppres-no-40-tahun-1997

penyuluhan dan bimbingan kepada petani mengenai teknologi pertanian modern, cara pengolahan tanah, irigasi, pengendalian hama, serta penggunaan pupuk dan bibit unggul. Pada pelaksanaannya juga pada unit desa BIMAS didukung oleh beberapa sarana lain seperti Kios Sarana Produksi dan Koperasi Unit Desa (KUD) yang menyediakan kredit usaha tani serta kebutuhan pertanian seperti pupuk, pestisida, bibit, dan alat pertanian,.[45]

Intensifikasi pada tanaman padi kemudian diperluas, sehingga muncul istilah Intensifikasi massal (INMAS). Tahun 1979 kemudian INMAS dikembangkan menjadi tiga maca program yaikni Intensifikasi Massal (INMAS), Intensifikasi Umum (INMUM), dan Intensifikasi Khusus (INSUS). Hal tersebut kemudian mengarah pada mekanisme pasar bebas yang bisa disebut sebagai Revolusi Hijau. Revolusi Hijau sendiri merupakan gerakan pembangunan dunia pertanian lewat input modal secara besar-besaran yang ditunjang dengan barang-barang teknologi pertanian yang berasal dari impor serta kebutuhan pertanian lainnya seperti bibit, pupuk, pestisida dan obat-obatan kimia.[46] Kemudian untuk mendukung program-program diatas, dipersiapkan juga program berupa kelembagaan desa untuk menyediakan modal yang melalui KUT (Kredit Usaha Tani) atau KUD (Koperasi Unit Desa).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[45] Mengampu Ekonomi Masyarakat" Media Keuangan Kemenkeu, diakses pada 25 April 2025, https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/mengampu-ekonomi-masyarakat-desa

[46] Bonnie Setiawan, *Globalisasi Pertanian*, Institute for Global Justice, 2003, hlm. 42

Petani juga disediakan kredit khusus BIMAS agar tidak khawatir mengenai modal. Kredit yang diberikan berasal dari Koperasi Unit Desa (KUD) yang memiliki tugas utama untuk mengatasi masalah produksi termasuk didalamnya kredit dan ketentuan bagi hasil, menyediakan saran produksi, serta pengolahan dan pemasaran hasil produk. Dari bantuan kredit tersebut petani dapat membeli benih yang unggul serta pestisida. Tetapi kredit tersebut juga tidak memberikan dampak yang berarti bagi petani. Sebagian besar petani yang hasil panennya tidak mencukupi untuk membayar kredit tersebut menambah beban bagi petani.[47]

3. BULOG (Badan Urusan Logistik)

Pemerintah juga mengadakan BULOG (Badan Urusan Logistik) yang bertujuan untuk menjaga stabilitas harga beras dan penyediaan, penyimpanan serta distribusi beras demi menjaga stabilitas pangan. BULOG sendiri memiliki peran yang penting dalam mengelola rantai urusan logistik pangan. BULOG bertanggung jawab langsung pada presiden dan mempunyai wewenang untuk memonopoli pembelian pangan dari petani, koperasi maupun swasta. Tetapi dalam perkembangannya pada masa orde baru BULOG belum berhasil menjaga kestabilan harga beras menyebabkan krisis beras pada tahun 1972. Hal tersebut kemudian menjadikan kekacauan pada kelas menengah perkotaan yang melancarkan aksi protes atas kegagalan tersebut. Krisis beras pada tahun 1972 ini

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[47] Lailatul Muamaroh, "Pelaksanaan Program Bimbingan Massal (BIMAS) Padi di Kabupaten Tulungagung Tahun 1984-1998," *Jurnal Avatara* Vol 5 No 2, 2017

kemudian menjadikan runtuhnya stabilitas ekonomi yang sudah dimulai sejak 1969.[48]

Seluruh program yang dilakukan oleh pemerintah orde baru untuk menstabilkan pangan melalui modernisasi pertanian dibantu oleh alat modern pertanian, bibit yang unggul, pupuk, pestisida, dan irigasi yang baik merupakan penerapan dari Revolusi Hijau. Tetapi dari seluruh metode pelaksanaan Revolusi Hijau di Indonesia ternyata hasil yang diperoleh petani sebagai penghasil utama malah mengalami kerugian. Keuntungan hanya dapat dirasakan oleh para pengusaha, korporasi-korpoasi multinasional serta para importir yang mendapatkan keuntungan dari benih, pupuk, pestisida, alat pertanian seperti traktor, serta alat irigasi seperti pompa air yang diperoleh dari hasil impor. Pada pengaplikasiannya secara langsung di desa, program pemerintah seperti KUD lebih banyak dikuasai oleh kelompok tertentu desa yang terdiri dari petani kaya yang memiliki lahan yang luas, pejabat, pedagang dan lainnya yang mengontrol KUD sendiri sesuai dengan kemauan mereka tanpa ada rakyat yang berani mengeluh. [49]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

4. IGGI (*Inter-Government Group on Indonesia*)

Revolusi Hijau yang telah terlaksana di Indonesia mendapatkan sumbangan dana dari pinjaman serta hibah internasional serta pendapatan minyak bumi. Pinjaman didapatkan Indonesia melalui kelompok badan

[48] Fatih Gama Abisono N, "Dinaika Kebijakan Pangan Orde Baru: Otonomi Negara Vs Pasar Global," ISSN 141-4946, *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik* Vol 5 No 3, 2002, hlm 274

[49] Rahardjo Dawam M, *Transformasi Pertanian, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja*, (UI-Press Jakarta, 1984), 72

donor yang disebut *Inter-Government Group on Indonesia* (IGGI). IGGI sendiri merupakan organisasi Internasional yang dibentuk untuk mengkoordinir bantuan dana untuk Indonesia pada tahun 1967. Bantuan yang diberikan oleh IGGI bukan hanya mengenai sumbangan dana tetapi juga beberapa proyek pembangunan infrastruktur. IGGI kemudian aktif memberikan bantuan dana kepada Indonesia untuk membantu Indonesia keluar dari permasalahan ekonomi yang disebabkan oleh masa Pemerintah Soekarno. Tetapi IGGI tidak bertahan lama, setelah 25 tahun memberikan bantuan kepada Indonesia, IGGI akhirnya berhenti memberikan bantuan pada tahun 1992 karena alasan politik dari pemerintah orde baru. Setelah terlepas dari IGGI Indonesia kemudian memulai langkah baru dengan meminta bantuan pinjaman dana pada CGI (*Consultative Group on Indonesia*) yang tidak jauh berbeda sistemnya dengan IGGI, tetapi pada tahun-tahun selanjutnya Indonesia juga melepasakan diri dari CGI pada 2007.[50]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

5. AoA (*Agreement on Agriculture*) dalam WTO (*World Trade Organization*)

Sebagai negara agraria Indonesia memiliki kesempatan untuk bergabung dengan organisasi Internasional seperti AoA (*Agreement on Agriculture*) untuk membantu perdagangan luar negeri yang juga tergabung dalam WTO (*World Trade Organization*). Organisasi

[50] Prita Yolanda, "Latar Belakang Pembubaran CGI (*Consultative Group on Indonesia*) Oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono," (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2007), 9

perdagangan dunia ini atau WTO memiliki tujuan untuk mendorong arus perdagangan antar negara serta menfasilitasi perundingan dengan menyediakan forum negosiasi. Indonesia tergabung dengan WTO setelah meratifikasinya melalui Undang-undang (UU) Nomor 7 tahun 1994 tentang Pengesahan *Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Salah satu perjanjian yang ada dalam WTO adalah AoA yang terkhusus pada bidang pertanian saja, dengan adanya AoA Indonesia harus menyesuaikan kebijakan pertaniannya sesuai tiga pilar AoA yakni perluasan akses pasar, pengurangan subsisdi domestik dan penghapusan subsidi ekspor. Hal tersebut membuat Indonesia mengurangi proteksi dan subsidi yang selama ini diberikan pada petani. Selain itu, Impor beras Indonesia mengalami peningkatan drastis, sementara ekspor beras menurun tajam, hal tersebut mengancam ketahanan pangan dan pendapatan dari petani lokal.[51]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

C. Pelaksanaan Revolusi Hijau di Indonesia

Sebelum adanya pelaksanaan dari Revolusi Hijau, petani Indonesia menggunakan sistem bertani yang masih tradisional dan alami. Revolusi Hijau membawa perubahan yang besar terhadap sistem pertanian yang sudah ada sebelumnya. Penggunaan bibit unggul, pupuk, pestisida, sistem irigasi yang baik serta alat pertanian modern menggunakan mesin merupakan hal baru bagi

[51] Akbar Kurnia Putra, "Tinjauan Yuridis *Agreement on Agriculture* dalam WTO terhadap Kebijakan Ketahanan Pangan Indonesia," (Tesis Fakultas Hukum UI, 2012),76-82

petani yang terbiasa dengan sistem bertani secara tradisional. Petani yang sudah menerapkan teknologi pertanian merasakan berbagai dampak positif maupun sebaliknya.

Pemerintah juga menyuarakan panca usaha tani sebagai semboyan pertanian yang baru, panca usaha tani berisi lima langkah yang dilakukan untuk meningkatkan hasil pertanian diantaranya 1) irigasi, 2) pengolahan lahan, 3) pemilihan bibit yang unggul, 4) pemupukan, dan 5) pemberantasan hama.[52] Pertanian yang menggunakan sistem irigasi dan pengairan yang baik tentunya juga menghasilkan tanaman yang baik, seperti padi yang sangat membutuhkan air dalam masa tanamnya. Selain itu penggunaan bibit yang unggul juga menghasilkan tanaman dengan kualitas yang baik yang tahan penyakit dan hama, serta untuk mendukung hasil tanaman yang baik juga perlu dilakukan pemupukan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tanaman.

Langkah awal yang dilakukan petani dalam proses menanam adalah dengan menyiapkan lahan. Lahan yang akan ditanami haruslah gembur agar tumbuhan bisa tumbuh dengan baik. Masyarakat petani dulu menggunakan cangkul atau kerbau untuk membajak sawah, tetapi waktu yang digunakan masih terbilang lama dan karena membutuhkan beberapa kali membajak untuk hasil lahan yang baik. Untuk mengefisiensi pengolahan lahan pertanian pemerintah menganjurkan untuk menggunakan traktor sebagai teknologi baru dalam dunia pertanian menggantikan cara tradisional seperti dicangkul dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[52] Dewa Agung Gede Agung dan Aris Poniman, Sistem Subak, Panca Usaha Tani dan Perkembangan Pertanian di Kabupaten Bangli, https://lib.ui.ac.id/detail?id=75141&lokasi=lokal, 1999

menggunakan hewan.[53] Penggunaan traktor sudah dimulai sejak tahun 1970-an, namun penggunaannya terbatas.[54]

Penggunaan pupuk dalam penanaman padi juga sangat diperlukan karena dengan adanya pupuk, padi yang dihasilkan mendapat nutrisi yang sehingga hasil yang diperoleh saat panen juga meningkat. Pemupukan pada tanaman padi dilakukan tiga kali selama masa tanam. Pemupukan pertama dilakukan saat padi berumur 7-10 hari setelah masa tanam yang bertujuan untuk mendukung pertumbuhan akar dan batang. Pemupukan kedua dilakukan pada saat padi berumur 25-28 hari setelah masa tanam yang bertujuan untuk merangsang pembentukan anakan yang produktif. Pemupukan ketiga dilakukan saat padi berumur 38-42 hari setelah masa tanam, hal tersebut penting dilakukan untuk pembentukan bulir padi agar hasil panen melimpah. Sementara diluar itu pemupukan juga bisa dilakukan jika daun padi menguning atau tanaman kerdil serta jika tanaman kekurangan unsur hara.[55]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Penanaman bibit unggul kemudian dilakukan oleh petani untuk menghasilkan padi yang berkualitas. Proses penyaluran benih juga diatur oleh Dinas pertanian sebagai pihak yang bertanggung jawab pada program penyaluran benih. Dinas pertanian kemudian juga dibantu oleh KUD serta

---

[53] Nurvianto and Agus Trilaksana, "Intensifikasi Pertanian Tanaman Padi Dalam Rangka Swasembada Beras Provinsi Jawa Timur Tahun 1969 – 1984," *AVATARA E-Journal Pendidikan Sejarah* 2, no. 3 (2014): 598–608.

[54] Victor Manurung dkk, Ketersediaan dan Profitabilitas Pengusaha Traktor di Jawa Barat, Sumatera Utara dan Lampung, Forum Penelitian Agro Ekonomi 9(2-1):21, http://dx.doi.org/10.21082/fae.v9n2-1.1992.21-29, 2016

[55] Siti Nur Aeni dan Sakina Rakhma Diah Setiawan, "Jangan Asal Ini Cara Tepat Memupuk Tanaman Padi," diakses pada 26 April 2025 https://agri.kompas.com/read/2022/09/25/180226684/jangan-asal-ini-cara-tepat-memupuk-tanaman-padi?page=all,

Balai pengawas dan sertifikasi benih. Varietas benih unggul tersebut kemudian menghasilkan padi yang bagus.

Tabel 2.1

Hasil Produksi Padi Nasional Tahun 1982-1990

Tahun	Jawa & Madura	Sumatera	Kalimantan	Bali & Nusa Tenggara	Sulawesi	Total Nasional (Ton)
1982	20.805.803	5.748.183	1.779.283	1.894.803	2.367.308	33.563.677
1984	23.700.326	7.496.043	1.779.915	1.968.701	3.167.048	38.136.446
1985	24.225.280	7.664.398	1.837.443	1.955.033	3.327.089	39.032.945
1986	24.402.155	7.717.884	1.857.748	1.982.650	3.287.774	39.274.525
1987	24.543.526	8.223.008	1.912.876	2.056.564	3.317.880	40.078.195
1990	27.177.422	9.414.178	2.182.981	2.360.516	4.028.151	45.178.751

Sumber: Badan Pusat Statistika

Tabel di atas menunjukkan bahwa kenaikan hasil padi, pada 1982 menghasilkan 33 juta ton lalu pada 1990 mengalami kenaikan 36% menjadi 45 juta ton. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa program yang dilakukan oleh pemerintah mengalami keberhasilan, dengan menggunakan bibit unggul dan alat pertanian lainnya yang sangat mendukung hasil produksi padi. Sebagai salah satu program pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh REPELITA, Revolusi Hijau menjadi langkah pasti pemerintah bagi kemajuan di bidang pertanian. Revolusi Hijau dilaksanakan di berbagai wilayah Indonesia, dengan keyakinan untuk medukung program pemerintah serta ketersediaan pangan yang melimpah. Hal tersebut kemudian menjadikan Indonesia sebagai negara yang meraih Swasembada Beras pada 1984.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Gambar 2.1 Presiden Soeharto dan Ibu Negara melakukan panen raya di Lokasi Transmigrasi Tanah Miring III Manokwari, Irian Jaya Papua pada 7 Mei 1994
(Sumber: Tempo Doeloe, Facebook, 2024)

Pemerintah juga ikut berperan aktif mendukung melalui pelaksanaan program programnya dan juga dipantau langsung. Kerjasama yang baik antara pemerintah serta masyarakat petani menjadikan swasembada beras dapat tercapai. Pembentukan kelompok tani kemudian dilakukan sebagai upaya pemberdayaan petani. Peran kelompok tani semakin terasa sejak tahun 1979 yaitu ketika dilaksanakan pola intensifikasi khusus (INSUS) menggunakan pendekatan kelompok. Lalu pada tahun 1987, kelompok tani mulai bekerjasama atasa sesama kelompok tani menjadikan gabungan kelompok tani (Gapoktan) sebagai istilah gabungan bagi kelompok tani yang ada dala satu wilayah administratif. Selama masa-masa tersebut kelompok tani juga menjadi wadah bagi pemerintah untuk menyalurkan program-programnya. Pemerintah juga memberikan premi atau pinjaman lunak kepada kelompok tani melalui KUD.[56]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[56] Sri Nurhayati dan Dewa K.S. Swastika, Peran Kelompok Tani dalam Penerapan Teknologi Pertanian, Forum Penelitian Agro Ekonomi, Vol 29 No 2, 2011, hlm 117

Padi yang telah dipanen kemudian dijual ke pasaran dengan harga yang sudah ditentukan oleh pemerintah lewat BULOG. Harga jual yang dikeluarkan oleh BULOG berdasarkan kebijakan pemerintah yang terdiri dari dua tahap yakni 1) pembelian dari BULOG atau KUD kepada petani di desa, dan 2) pembelian dari BULOG ke BUUD atau KUD serta non KUD. Harga yang ditetapkan terkadang juga mengalami kenaikan karena inflasi yang terus melanda Indonesia.

Tabel 2.2

Harga padi pada tahun 1985-1995 (Rp./100 Kg.)

Tahun	Jawa Timur	Sumatera Barat	Kalimantan Barat	Bali	Sulawesi Selatan
1985	14.888	14.065	17.955	15.170	15.720
1986	16.018	15.274	18.825	15.680	15.625
1987	19.357	19.455	23.359	18.946	18.417
1988	25.049	22.190	27.929	23.069	19.850
1989	27.897	24.339	31.801	24.414	23.329
1990	30.469	23.453	32.373	25.225	23.450
1991	33.660	23.453	37.919	27.227	-
1992	35.928	29.908	37.620	27.926	-
1993	36.232	30.418	30.842	30.622	-
1994	46.912	40.572	42.315	46.432	33.083
1995	53.073	47.500	55.000	44.000	37.950

Sumber: Badan Pusat Statistika

Berdasarkan data diatas maka setiap tahun lonjakan harga padi yang disebabkan oleh inflasi sangatlah berpengaruh terhadap harga jual padi itu sendiri. Harga yang tertera dalam tabel diatas ialah harga yang diterima oleh konsumen sementara harga gabah di tingkat petani relatif lebih rendah. Hal ini juga berarti bahwa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah lebih condong dan berpihak pada konsumen daripada produsen. Tetapi yang perlu dicermati ialah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

bagaimana cara untuk menstabilkan harga gabah ketika musim panen tiba, karena dengan harga yang stabil petani dapat memperoleh keuntungan yang lebih.[57]

Daerah Jawa Barat menjadi salah satu daerah dengan tingkat produksi padi yang juga tinggi, intensifaksi juga terlaksana dengan baik. Pada tahun 1981 luas areal tanaman padi sawah yang diproyeksikan adalah 960.000 ha, lalu sampai Januari 1981 sudah terealisasi seluas 729.038 ha. Realisasi dari intensifikasi diatas terbagi lagi menjadi area Bimas seluas 205.701 ha dan Inmas seluas 523.337 ha. Melalui Surat Keputusan Gubernur dalam rangka meningkatkan produksi pangan maka Jawa Barat telah mengusahakan agar tanaman padi tidak terserang hama wereng dengan menanam padi jenis VUTW (Varietas Tahan Wereng) seluas-luasnya. Pemerintah juga turut bekerjasama lewat lembaga-lembaga nya seperti pemberian intensifikasi lewat INSUS, dan pemberian pinjaman lewat BIMAS, tetapi pinjaman lewat BIMAS memiliki kendala karena petani sulit menembalikan dana pinjaman. Lalu KUD yang juga turut serta dalam pengadaan pangan yang berhasil mengumpulkan 167.000 ton beras.[58]

Jawa Timur juga menjadi daerah yang berkontribusi pada hasil pertanian yang pada tahun 1984 menyumbang 40% hasil pertaniannya, dan target Swasembada Beras bisa terpenuhi. Jawa Timur sendiri pada masa REPELITA mengalami kenaikan yang cukup signifikan atas usaha pemerintah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[57] Suparmin, "Tingkat Stabilitas dan Fluktuasi Harga Gabah dan Beras di Indonesia," *Jurnal Agrimansion* Vol 7 No 1, 2006, hlm 72 DOI: https://doi.org/10.29303/agrimansion.v7i1.135
[58] Berita Yudha, "Derap Pembangunan di Jabar," 19 Maret 1981, hlm 5

dan masyarakat yang bekerja sama untuk menaikkan taraf hidup. Pemerintah berusaha meningkatkan hasil produksi dalam bidang pertanian dan pangan dengan cara intensifikasi maupun ekstensifikasi, intensifikasi dilakukan pada tanaman-tanaman padi, jagung, kacang-kacangan, umbi-umbian, sorgum, dan berbagai macam sayuran, sedangkan ekstensifikasi dilakukan dengan cara percetakan sawah baru.[59] Pada tahun 1984 Jawa Timur memiliki luas areal yang aktif menjadi lahan intensifikasi seluas 1.562.940 ha. Sementara Kabupaten-Kabupaten yang aktif memberikan kontribusinya pada produksi padi ialah Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Jember, dan Kabupaten Lamongan.

Hasil padi yang melimpah ternyata juga tidak selalu memberikan dampak positif pada kenaikan taraf kesejahteraan petani. Terdapat beberapa permasalahan mengenai kredit yang dilakukan oleh petani yang terkadang tidak terbayarkan menyebabkan tunggakan kredit pada petani itu sendiri serta beragam pula jumlah tunggakan mereka, mulai dari puluhan ribu hingga jutaan. Hal tersebut terjadi di daerah-daerah yang menyediakan kredit pada petani dengan KUD sebagai lembaga penyalurannya. Seperti yang terjadi pada daerah Subang yang sulit dalam permasalahan tunggakan kredit BIMAS[60], dan daerah Bali yang juga memiliki tunggakan kredit BIMAS yang besar.[61]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[59] Pelaksanaan REPELITA Tahun Kelima

[60] Berita Yudha, "Subang Tergolong Daerah Berat Dalam Masalah Bimas," 12 Nopember 1983, hlm 7

[61] Bali Post, "Tunggakan Kredit Bimas di Bali Rp 973 Juta Lebih," 10 November 1994, hlm 7

BAB III

PELAKSANAAN REVOLUSI HIJAU DI KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 1979-1998

A. Gambaran Umum Kabupaten Banyuwangi

Kabupaten Banyuwangi merupakan kabupaten yang terletak di paling ujung timur pulau Jawa, Kabupaten Banyuwangi berada dalam wilayah administratif provinsi Jawa Timur, dari timur berbatasan langsung dengan selat Bali, dari barat berbatasan dengan Kabupaten Jember dan Kabupaten Bondowoso, dari Utara berbatasan dengan Kabupaten Situbondo, dan dari selatan berbatasan langsung dengan Samudera Hindia. Luas wilayah Kabupaten Banyuwangi adalah 5.782,50 Km², dengan luas wilayah tersebut Kabupetan Banyuwangi menjadi Kabupaten dengan luas wilayah terbesar di Jawa Timur dan juga di Pulau Jawa. Suku asli yang mendiami wilayah Kabupaten Banyuwangi adalah Suku Osing yang sampai sekarang masih ada dan bertempat di wilayah utara Kabupaten Banyuwangi.[62]

Kabupaten Banyuwangi memiliki sejarah yang panjang dalam perkembangannya, Kabupaten ini awalnya adalah wilayah kekuasaan dari Kerajaan Blambangan yang sudah ada sejak abad ke-14, Kerajaan Blambangan merupakan kerajaan hindu yang erat kaitannya dengan Kerajaan Majapahit. Pada masa kejayaannya Kerajaan Blambangan ini menguasai wilayah Malang,

[62] BPK Jawa Timur, Kabupaten Banyuwangi, diakses pada 7 Mei 2025 https://jatim.bpk.go.id/kabupaten-banyuwangi/

Probolinggo hingga Banyuwangi. Kerajaan Blambangan mengalami kemunduran sejak abad ke-18, adanya konflik internal yang ada dalam kerajaan kemudian serangan-serangan yang dilakukan oleh VOC (*Vereenigde Oost-Indische Compagnie*) atau perusahaan dagang hindia timur milik Belanda pada Kerajaan Blambangan secara terus menerus berakibat kekalahan pada pertempuran terakhir yakni Perang Puputan Bayu, Kerajaan Blambangan yang kemudian jatuh ketangan VOC menandai berakhirnya kekuasaan Kerajaan tersebut di wilayah ujung pulau Jawa. Perang Puputan Bayu menjadi salah satu simbol perlawan masyarakat Blambangan terhadap penjajahan.[63]

Kekuasaan Belanda di Kabupaten Banyuwangi kemudian merubah seluruh tatanan politik yang ada dan menjadikan Kabupaten ini sebagai salah satu potensi besar dalam dunia perkebunan dan pertanian. Pengangkatan Tumenggung Wiroguno atau yang lebih dikenal dengan sebutan Mas Alit sebagai Bupati pertama di Kabupaten Banyuwangi menandai berlangsungnya kekuasaan Belanda terhadap Banyuwangi. Masa kekuasaan Belanda di Kabupaten Banyuwangi dimanfaatkan dengan perluasan daerah perkebunan, dengan luas wilayah yang besar Kabupaten Banyuwangi menjadi daerah strategis untuk tanaman perkebunan seperti kopi dan tebu. Dampak dari kekuasaan Belanda terhadap perkebunan di Kabupaten Banyuwangi masih dirasakan sampai sekarang, sebagian besar wilayah perkebunan yang awalnya milik Belanda kemudian berpindah tangan menjadi milik negara maupun

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[63] Nur Maria, "GERAKAN SOSIAL POLITIK DI BLAMBANGAN TAHUN 1767-1768," *Patanjala : Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya* 9, no. 3 (November 27, 2017): 407, https://doi.org/10.30959/patanjala.v9i3.26.

swasta, sedangkan penduduk asli memiliki luas perkebunan yang terbatas, hal tersebut menunjukkan adanya ketimpangan agraria di wilayah wilayah bekas kekuasaan Belanda. Daerah perkebunan di Kabupaten Banyuwangi yang masih memiliki kaitan erat dengan Belanda sampai sekarang adalah Kecamatan Kalibaru dan Kecamatan Glenmore dengan perkebunan yang masih aktif hingga kini.[64]

Pada perkembangannya permasalah mengenai ketimpangan agrarian tersebut kemudian membawa konflik baru pada masa Pemerintahan Soekarno di Kabupaten Banyuwangi. Presiden Soekarno yang memimpin pada masa itu kemudian mengeluarkan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) pada tahun 1960 yang mengatur mengenai kepemilikan tanah.[65] Tetapi realisasi dari UU tesebut masih mengalami masalah, hal tersebut kemudian memunculkan konflik yang berimbas pada sosial masyarakat. Pemilik tanah yang memiliki luas tanah pertanian lebih banyak dari yang diatur oleh UU tidak menyisakan tanah yang bisa dimiliki oleh petani yang sama sekali tidak memiliki tanah. Konflik kemudian menyebar sampai Banyuwangi, PKI yang pada saat itu memiliki kekuatan gabungan oleh Barisan Tani Indonesia (BTI) serta Pemuda Rakyat melakukan aksi sepihak sebagai bentuk perjuangan hak masyarakat petani kecil yang tidak memiliki tanah pada petani yang memiliki tanah lebih. Konflik terus memanas sampai puncaknya setelah peristiwa 30 September

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[64] Matali Matali, "CULTUURSTELSEL DI UJUNG TIMUR PULAU JAWA: STUDI KASUS PENERAPAN TANAM PAKSA DI BANYUWANGI," *Jurnal Sangkala* 4, no. 1 (April 25, 2025): 41–50, https://doi.org/10.62734/js.v4i1.584.

[65] BPK RI, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, diakses pada 7 Mei 2025 https://peraturan.bpk.go.id/Details/51310/uu-no-5-tahun-1960,

1965 yang disebut G30S/PKI, di Kabupaten Banyuwangi terjadi insiden Cemethuk dan Karangasem.[66]

Pada masa Orde Baru Kabupaten Banyuwangi secara sosial politiknya dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dengan menekankan pada stabilitas, pembangunan dan integrasi budaya. Seperti kesenian Gandrung yang pada tahun 1970 mulai dipopulerkan kembali atas keluarnya kebijakan Revitalisasi Kebudayaan Daerah, Gandrung kemudian menjadi sarana sosialisai program pemerintah dan pariwisata di Kabupaten Banyuwangi.[67] Begitupun juga dengan keadaan sosial ekonomi masyarakat pada masa orde baru juga lebih banyak dipengaruhi oleh kebijakan yang dikeluarkan oleh negara, seperti kebijakan pembangunan nasional dalam program REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun) yang berfokus pada pertanian, industri dan infrastruktur.

Kabupaten Banyuwangi merupakan kabupaten terluas yang ada di pulau Jawa sekaligus wilayah paling ujung timur, hal tersebut membuat wilayah Kabupaten Banyuwangi memiliki berbagai macam kondisi alam, mulai dari pegunungan hingga lautan yang tersedia membuat mata pencaharian masyarakat pun juga bermacam, tetapi wilayah dataran yang mendominasi Kabupaten ini membuat mata pencaharian utama masyarakatnya yakni bertani. Masyarakat yang mendiami wilayah Kabupaten Banyuwangi juga beragam, mulai dari masyarakat Osing sebagai penduduk asli daerah Banyuwangi yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[66] Hanif Risa Mustafa, "Pergolakan Agraria 1965-1966 Di Banyuwangi," *Heritage* 1, no. 1 (2020): 61–72, https://doi.org/10.35719/hrtg.v1i1.5.

[67] Bahagio Raharjo, "Dinamika Kesenian Gandrung Di Banyuwangi 1950-2013," *Humanis* 15, no. 2 (2016): 7–14. https://ojs.unud.ac.id/index.php/sastra/article/view/21328

mendiami wilayah bagian utara, sementara bagian selatan didominasi oleh suku Jawa Matraman yang merupakan penduduk yang dibawa pihak Belanda untuk memperkerjakan mereka di daerah Banyuwangi. Bagian pesisir diisi oleh suku Madura seperti Kecamatan Muncar dan Wongsorejo, kedatangan suku Madura di Banyuwangi didasari oleh Belanda, sementara daerah lain yang terdapat suku Madura adalah Kecamatan Kalibaru dan Glenmore.[68]

B. Kondisi Sosial Masyarakat Kabupaten Banyuwangi

Masyarakat Banyuwangi pada masa orde baru mengalami kenaikan yang cukup signifikan, dari data yang didapatkan dari Badan Pusat Stastistika Kabupaten Banyuwangi, dari tahun 1980 penduduk di Kabupaten Banyuwangi sebanyak 1.426.092 juta jiwa mengalai peningkatan menjadi 1.629.768 juta jiwa pada tahun 1990.[69] Perkembangan sumber daya manusia juga menjadi hal yang penting dalam pertumbuhan suatu penduduk. Salah satu hal yang penting dalam perkembangan sumber daya adalah pendidikan. Angka pendidikan di Kabupaten Banyuwangi juga mengalami peningkatan seiring dengan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dan ketersediaannya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Keberagaman suku dalam masyarakat menyebabkan masyarakat menjadi majemuk. Secara sosial keagamaan masyarakat Kabupaten Banyuwangi mayoritas menganut agama Islam, tetapi agama lain masih bisa berkembang

[68] Mahmudah Mahmudah and Muhammad Ali Mansyur, "Komunikasi Antar Budaya Masyarakat Jawa Dan Madura," *JKaKa:Jurnal Komunikasi Dan Konseling Islam* 1, no. 1 (2021): 1, https://doi.org/10.30739/jkaka.v1i1.805.

[69] BPS Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi dalam Angka Tahun 1990, hlm 38

dan mendapatkan kesempatan yang sama, toleransi antara umat beragama di Kabupaten Banyuwangi sangat tinggi, terlihat dan tercermin dari beberapa daerah yang bisa ditemui adanya berbagai macam tempat peribadatan yang berdiri saling berdampingan dan tidak ada konflik apapun antar masyarakatnya. Kabupaten Banyuwangi yang merupakan wilayah yang dahulunya adalah bekas Kerajaan Hindu terakhir yang ada di Pulau Jawa dan letaknya berdekatan dengan Bali sebagai pusat wilayah Hindu di Indonesia tentunya masih menerima pengaruh dari agama Hindu. Hindu menjadi agama kedua dengan penganut terbanyak di Kabupaten Banyuwangi setelah Islam, pada tahun 1990 sebanyak 40.051 orang penganut agama Hindu. Penganut agama hindu lebih mudah ditemui di daerah selatan Banyuwangi yakni di Kecamatan Pesanggaran yang pada tahun yang sama memiliki 9.885 orang penganut. Sementara agama Islam masih menjadi mayoritas di Kabupaten Banyuwangi dengan 1.377.786 orang yang menganut agama Islam.[70]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Kabupaten Banyuwangi juga terkenal akan kebudayaannya yang melimpah dengan masyarakat yang majemuk. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, dengan berbagai jenis suku dan agama yang mendiami kawasan Banyuwangi menjadi masyarakat yang kaya akan budaya. Kabupaten Banyuwangi jika dilihat dari segi wilayahnya merupakan kawasan strategis yang menjadi penghubung antara Pulau Jawa dan Bali, dari kawasan penghubung tersebut tentunya banyak pendatang yang memiki latar belakang

[70] BPS Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi dalam Angka Tahun 1990, hlm 97

yang berbeda memberikan jejak-jejak mereka disana. Sehingga Kabupaten Banyuwangi memiliki kebudayaan dan tradisi yang beragam, salah satu contohnya adalah Tari Gandrung yang menjadi simbol dan representasi dari Kabupaten Banyuwangi.[71] Selain itu terdapat banyak tradisi dan kebudayaan lainnya dari Kabupaten Banyuwangi seperti Tari Seblang, Kebo-keboan, Ider Bumi dan lainnya.

Wilayah Kabupaten Banyuwangi yang merupakan wilayah yang strategis untuk berbagai mata pencaharian yang memanfaatkan alam. Mata pencaharian masyarakat Kabupaten Banyuwangi juga beragam dipengaruhi oleh berbagai kondisi alam yang ada. Sebagai kabupaten terluas di Pulau Jawa dan sebagian besar wilayahnya merupakan lahan aktif pertanian maka mayoritas masyarakatnya adalah petani. Petani yang memiliki lahan pun juga beragam tanaman pertaniannya, diantaranya dari tanaman palawija, buah-buahan, hingga tanaman perkebunan. Jumlah masyarakat yang bermata pencaharian petani di Kabupaten Banyuwangi pada Tahun 1990 adalah 259.911 sementara buruh tani sebanyak 312.760 orang.[72]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[71] Ali Mursyid Azisi and M. Yusuf, "Konversi Agama Dari Hindu Ke Islam Pada Masyarakat Banyuwangi: Analisis Sejarah Kritis," *Tamaddun: Jurnal Kebudayaan Dan Sastra Islam* 21, no. 1 (2021): 59–74, https://doi.org/10.19109/tamaddun.v21i1.8615.

[72] BPS Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi dalam Angka Tahun 1990, hlm 45

Tabel 3.1

Pekerja Petani dan Buruh Tani menurut Kecamatan Terbesar di Kabupaten Banyuwangi Tahun 1990

No	Kecamatan	Pekerjaan	
		Petani	Buruh Tani
1	Pesanggaran	20.427	28.370
2	Gambiran	10.797	26.285
3	Singojuruh	6.551	15.650
4	Rogojampi	8.275	13.460
5	Srono	23.357	15.523
6	Tegaldlimo	21.277	21.159

Sumber: Badan Pusat Statistika Kabupaten Banyuwangi

Petani dan buruh tani adalah dua kelompok orang yang berbeda, meskipun keduanya bekerja pada bidang pertanian. Petani adalah pemilik lahan yang bertanggung jawab penuh terhadap pertaniannya sendiri mulai dari proses produksi hingga panen. Sementara buruh tani adalah pekerja yang ada dalam bidang pertanian yang bekerja untuk mengolah lahan milik orang lain dan diberikan upah atas pekerjaannya, upah yang diberikan bisa berupa upah harian, borongan atau bagi hasil. Tetapi seiring perkembangan teknologi dan modernisasi, kegiatan buruh tani menjadi lebih sedikit karena yang awalnya mereka bekerja pada musim menanam dan memanen padi menjadi tergantikan oleh teknologi pertanian yang lebih modern tetapi mempersempit kesempatan kerja oleh buruh tani.[73]

Modernisasi pada dunia pertanian tidak terlepas dari adanya Revolusi Hijau yang terlaksana di berbagai wilayah di Indonesia termasuk Kabupaten

[73] Wahyuni Apri Astuti, "Hubungan Kerja Petani-Buruh Tani Di Pedesaan Dan Faktor Yang Mempengaruhinya," *Forum Geografi* 7, no. 1 (2016): 64, https://doi.org/10.23917/forgeo.v7i1.4798.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Banyuwangi. Revolusi Hijau merupakan modernisasi dibidang pertanian untuk meningkatkan hasil produksi pada tanaman pangan. Jika pertanian tradisional hanya mengandalkan alam sebagai kunci utama dalam pertanian mereka, seperti penggunaan bibit lokal, pestisida alami dari kotoran hewan dan mengandalkan tenaga hewan untuk kegiatan bertani seperti membajak sawah, maka dalam Revolusi Hijau teknologi terbaru dilibatkan untuk mendorong hasil produksi menjadi lebih baik dan lebih banyak.[74] Revolusi Hijau menggunakan bibit unggul yang sudah terlebih dahulu diteliti dan diuji oleh para ahli dibidangnya, penggunaan pupuk kimia sintesis juga disesuaikan dengan kebutuhan tanaman, cara pengairan yang baik, penanganan hama pada tanaman, serta adanya teknologi modern dalam membajak sawah yakni traktor yang tidak memerlukan hewan lagi dalam penggunaannya.

C. Pelaksanaan Revolusi Hijau di Kabupaten Banyuwangi

Pertanian merupakan sektor andalan yang ada di Kabupaten Banyuwangi, sebagai sektor utama maka pemerintah juga memberikan perhatian ekstra, dengan lahan luas yang dimiliki oleh Kabupaten Banyuwangi maka memang sudah seharusnya dimanfaatan dengan baik sumber daya alam yang ada. Kehidupan masyarakatnya yang juga mayoritas bermata pencaharian petani membuat sektor pertanian menjadi perhatian utama sebagai penghasil pangan bagi masyarakat. Patut kita syukuri Indonesia berada pada garis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[74] Rahmi Aulia Hidayat, "Analisis Perubahan Sistem Pengelolaan Sawah Dusun Sindang, Desa Rancakalong Kabupaten Sumedang," (Tesis Universitas Padjadjaran Bandung, 2020), 2

khatulistiwa dengan itu membuat Indonesia menjadi negara tropis yang sangat baik iklim dan alamnya untuk berbagai jenis tanaman pertanian.

Kehidupan pertanian yang sudah terjadi dari masa ke masa terus dilakukan karena pertanian merupakan pendongkrak utama sumber pangan bagi masyarakat. Indonesia yang pernah mengalami krisis pangan pada masa Pemerintahan Soekarno tentu saja dikarenakan melemahnya sektor pertanian. Hal tersebut membuat Indonesia harus mengimpor beras dari negara lain untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya. Faktor yang menyebabkan pemerintah mengimpor kebutuhan beras adalah karena produksi beras dalam negeri yang kacau serta adanya perubahan iklim yang memicu serangan hama membuat produksi beras menurun. Kacaunya produksi beras juga berakibat buruk pada kesejahteraan petani.[75] Sektor pertanian kemudian menjadi perhatian utama pembangunan nasional pada masa pemerintahan selanjutnya yakni orde baru untuk menstabilkan negara. Berbagai kebijakan dikeluarkan untuk mendukung program tersebut di berbagai wilayah di Indonesia. Kabupaten Banyuwangi menjadi wilayah yang juga masuk pada sasaran pemerintah pada saat itu untuk memenuhi pangan nasional.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Pelaksanaan dari berbagai kebijakan di sektor pertanian membuat semua kegiatan pertanian dikontrol langsung oleh pemerintah. Pada tingkat kabupaten, kebijakan pertanian juga dipantau langsung oleh Bupati yang memimpin dan melakukan pemantauan. Intensifikasi dilakukan oleh

[75] Latifa Dinar dkk, "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Impor Beras di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertania*, E-ISSN: 2614-6053 Vol 8 No 3, 2023, hlm 137

pemerintah lewat lembaga-lembaga terkait. Salah satu hal yang digaungkan oleh pemerintah pada masa itu ialah pelaksanaan Panca Usaha Tani dimana berisi hal-hal yang dilakukan untuk meningkatkan pertanian yaitu penggunaan bibit yang unggul, pengairan atau irigasi yang baik, penggunaan teknik bercocok tanam, pemanfaatan pupuk serta pemberantasan hama dan penyakit pada tenaman. Revolusi Hijau yang terlaksana di Indonesia merupakan implementasi dari program Panca Usaha Tani tersebut.[76]

Sebagai usaha dari pelaksanaan Revolusi Hijau maka pemerintah mengeluarkan lembaga BIMAS (Bimbingan Massal) yang bertugas untuk memberikan bimbingan serta intensifikasi kepada para petani, lalu pada tahun 1983 dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 1983 yang berisi tugas pokok BIMAS untuk memberikan intensifikasi agar meningkatkan hasil dari program peningkatan hasil produksi tanaman pangan dan lainnya.[77] BIMAS memberikan pengawasan pada pertanian yang ada di setiap daerah agraris khususnya pada pertanian tanaman padi sebagai upaya untuk mencapai swasembada pangan di Indonesia. BIMAS juga terlaksana di Kabupaten Banyuwangi dengan cara memberikan intensifikasi seperti penyuluhan dan pelatihan pada petani setelah sebelumnya didata untuk mengikuti program, kemudian petani diberian sarana berupa kredit pada kebutuhan pertanian seperti bibit, pupuk, dan alat pertanian, petugas juga diberikan pada petani

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[76] Desma Yulia, "Revolusi Hijau Kebijakan Ekonomi Pemerintah Bidang Pertanian Di Kanagarian Selayo Tahun 1974-1998," *HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah* 4, no. 2 (2019): 78–89, https://doi.org/10.33373/hstr.v4i2.1931.

[77] BPK RI, Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1983, diakses pada 9 Mei 2025 https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/65606/keppres-no-62-tahun-1983

untuk mendampingi dalam masa tanam hingga panen, setelah panen petani mengembalikan kredit yang diberikan dengan hasil penjualan panen.[78]

BIMAS dalam masa kerjanya juga dibantu oleh beberapa lembaga pemerintahan lain seperti KUD (Koperasi Unit Desa). Peran dari BIMAS adalah untuk mengubah pertanian dari yang sebelumnya menggunakan cara tradisional menjadi lebih modern dengan menerapkan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Sasaran utama dari BIMAS tentu saja adalah petani. Pada 1978 Tim Penerangan BIMAS pusat datang ke Kabupaten Banyuwangi dalam rangka usaha untuk peningkatan pengadaan pangan khususnya pada wilayah Kabupaten Banyuwangi yang dihadiri oleh Bapel BIMAS tingkat kecamatan dan desa, penyuluh sampai petani.[79]

KUD yang sebelumnya lebih dulu dikenal dengan BUUD (Badan Usaha Unit Desa) dan kemudian menggantikan tugas dari BUUD secara lebih luas juga bertugas memberikan ruang untuk petani pasca panen, hasil dari pertanian tersebut kemudian ditapung oleh KUD yang kemudian didistribusikan ke BULOG untuk selanjutnya disalurkan ke seluruh wilayah Indonesia. Keberadaan KUD sangat memudahkan petani pada masa itu karena memberikan pinjaman dan pengkreditan agar selanjutnya digunakan untuk membeli pupuk dan bibit padi yang unggul, pembelian pupuk pada masa orde baru juga sangat mudah dilakukan karena merupakan program yang didukung oleh pemerintah.[80] Hal-hal terkait dengan pertanian pada masa itu sangat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[78] Muda'I, diwawancara oleh penulis, Banyuwangi, 10 April 2025
[79] Jawa Pos, Team Penerangan Bimas ke Kecamatan2, 13 Juni 1978, hlm 6
[80] Samhuri, diwawancaara oleh penulis, Banyuwangi, 21 April 2025

diperhatikan oleh pemerintah karena demi mendukung terlaksananya swasembada beras.

Kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh BIMAS kepada petani menghasilkan kelompok-kelompok petani yang bekerja secara bersamaan. Kelompok tani adalah sekumpulan orang-orang yang bermata pencaharian sebagai petani yang memiliki latar belakang lingkungan dan kepentingan yang sama berada dan memiliki tujuan untuk meningkatkan hasil pertanian dari anggotanya. Kelompok tani juga merupakan sebuah organisasi yang memiliki struktural didalamnya untuk mempermudah mobilitas kepentingan bersama. Kelompok tani biasanya sudah mendapatkan bekal penyuluhan terlebih dahulu sebelum praktek langsung bertani agar pengetahuan para petani lebih meningkat.[81] Para penyuluh tersebut biasanya telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh pemerintah sebelum diterjunkan langsung pada petani.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

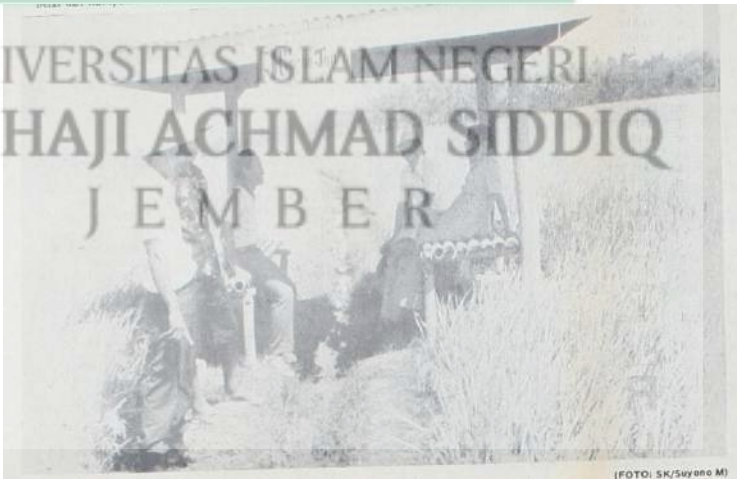

Gambar 3.1 Pengurus Kelompok Tani "Karya Tani" di Kecamatan Gambiran
(Sumber: Suyono M. dalam Berita Yudha, 16 Agustus 1980)

[81] Paul Adryani Moento et al., "Penguatan Kelompok Usaha Tani Berbasiskan Pemberdayaan Masyarakat Petani Padi," *Societas : Jurnal Ilmu Administrasi Dan Sosial* 9, no. 1 (2020): 25–34, https://doi.org/10.35724/sjias.v9i1.2782.

Peranan dari kelompok tani juga sangat penting dalam perkembangan dunia pertanian. Kelompok tani sangat mudah dijumpai pada masa orde baru karena juga merupakan salah satu program pemerintah pada saat itu. Keberlangsungan dari kelompok tani sendiri beragam disetiap daerahnya. Beberapa daerah memiliki kelompok tani yang ada disetiap dusunnya seperti di Kecamatan Singojuruh, dan daerah lain ada kelompok tani yang bergabung dengan daerah disampingnya seperti Kecamatan Gambiran yang dekat dengan Kecamatan Genteng, kelompok tani daerah tersebut tergabung menjadi satu gabungan kelompok tani karena pemilik lahan pertanian di Kecamatan Gambiran dimiliki oleh orang yang bertempat tinggal di Kecamatan Genteng dan para buruh biasanya berasal dari Kecamatan Gambiran, kemudian dibentuklah gabungan kelompok tani untuk mempermudah proses bertani.[82] Hasil produksi panen padi sebesar 11.798,30 ton gabah kering sawah dihasilkan dari sawah seluas 99,146 hektar pada kelompok tani "Karya Tani" di desa Yosomulyo Kecamatan Gambiran tahun 1980. Hal tersebut kemudian membuat kelompok tani tersebut memenangkan lomba yang diadakan oleh INSUS pada musim tanam berskala nasional. Lembaga nasional seeperti INSUS kerap melakukan lomba pada musim tanam untuk mendorong produksi tanaman khususnya padi.[83]

Penggunaan bibit unggul dalam pertanian sangatlah penting, bibit yang digunakan oleh petani merupakan bibit yang sudah diuji terlebih dahulu hasil

[82] Saiful, diwawancara oleh penulis, Banyuwangi, 10 April 2025

[83] Suara Karya, Gotong royong kunci sukses Kelompok Insus "Karya Tani" Banyuwangi, 16 Agustus 1980, hlm 5

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

dan ketahanannya sebelum disebarluaskan ke masyarakat. Varietas bibit unggul tersebut didapatkan dari Institut Pertanian Bogor (IPB) yang sudah bekerjasama dengan pemerintah. Bibit yang digunakan oleh petani bervariasi jenisnya diantaranya ada bibit jenis IR 36 dan IR 64 yang sudah terkenal di masyarakat karena menghasilkan rasa nasi yang enak serta produktivitas varietasnya yang tinggi sehingga mudah diterima oleh masyarakat. Sementara varietas yang sering digunakan oleh petani Kabupaten Banyuwangi pada tahun 1990 adalah varietas bibit jenis IR 64, sementara padi lokal Banyuwangi kurang diminati. Masa tanam padi selama satu tahun adalah dua kali, masa tanam pertama pada bulan Desember dan akan panen pada bulan Maret sampai April, kemudian lahan pertanian langsung ditanami kembali pada masa tanam kedua berlangsung dari bulan Mei dan puncak panen terjadi pada bulan Juli atau Agustus. Selama masa selesai panen kedua, lahan pertanian biasanya akan ditanami tanaman palawija seperti jagung dan kedelai sebelum kembali ditanami padi pada bulan Desember.[84]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Irigasi atau pengairan juga menjadi salah satu faktor dalam dunia pertanian. Jika pada pertanian periode sebelumnya pengairan belumlah sangat diperhatikan maka pada masa orde baru ini, hal tersebut menjadi perhatian khusus pemerintah. Beberapa bendungan dibanguna untuk memperlancar jalur air yang digunakan untuk pengairan. Wilayah-wilayah yang termasuk dalam program Revolusi Hijau di Kabupaten Banyuwangi dipastikan mendapatkan pengairan yang baik, irigasi dari sungai-sungai besar dibuat untuk

[84] Ahmad Sugiono, diwawancara oleh penulis, Banyuwangi, 7 Mei 2025

mempermudah petani dalam mengairi sawah yang jauh dari aliran air. Aliran air tersebut juga diperhatikan agar seluruh sawah yang ada mendapatkan air yang cukup.[85] Pengairan didapatkan dari daerah irigasi yang memiliki beberapa cabang di Kabupaten Banyuwangi berdasarkan PU Pengairan Daerah Pekalen Sampean Banyuwangi, cabang-cabangnya berada di daerah Banyuwangi, Genteng dan Benculuk, dari cabang-cabang tersebut kemudian nantinya akan mengairi sungai-sungai daerah sekitar hingga mencapai sawah-saawah masyarakat. Total sawah yang mendapat pengairan adalah 67.217 Ha pada tahun 1990.[86] Pembangunan Pengairan dan irigasi oleh prosida Pekalen Sampean juga telah dimulai dari tahun 1977, ditahun yang sama pula PU Pekalen Sampean telah mengairi 23.900 Ha sawah yang berarti masih berlansung 30% dari total sawah yang akan diairi. Lalu pada 1982 sesuai dengan perkiraan maka proyek pengairan oleh PU Pekalen Sampean telah selesai dan siap mengairi 67.217 Ha sawah di Kabupaten Banyuwangi.[87]

Sementara untuk mendukung pembibitan unggul yang sudah dilakukan maka perlu adanya faktor lain sebagai pendorong agar hasil padi menjadi bagus. Maka perlu dilakukan pemupukan pada tanaman padi sebagai pendukung pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman. Pemupukan perlu dilakukan karena hasil kurang maksimal jika hanya mengandalkan unsur alami pada alam. Pupuk bisa berasal dari organik alami seperti kotoran hewan dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[85] Ahmad Sugiono, diwawancara oleh penulis, Banyuwangi, 7 Mei 2025

[86] BPS Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi dalam Angka Tahun 1990, hlm 119

[87] Berita Yudha, Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani Banyuwangi, 23 Februari 1982, hlm 8

tanaman yang sudah mati tetapi juga ada pupuk lain yang berisi beberapa zat kimia khusus yang diperlukan oleh tanaman. Pupuk yang dibutuhkan dalam bertani berbeda tergantung waktu pemupukan pada tanaman, padi membutuhkan pupuk yang banyak selama masa produksinya, waktu pemupukan biasanya dimulai dari sebelum masa tanam, pemupukan selanjutnya pada 10 hari setelah masa tanam, pemupukan kedua dilakukan pada 21 hari setelah masa tanam, dan pemupukan terakhir dilakukan pada 42 hari setelah masa tanam. Pada setiap masa tanam kebutuhan pupuk juga beragam, pupuk yang digunakan juga beragam biasanya petani menggunakan Urea, SP 36, dan KCL selama masa produksi padi. Kebutuhan pupuk pada masa orde baru ditunjang oleh pemerintah dengan memberikan kredit pada pembeliannya. Pada tahun 1984 penyaluran pupuk di Kabupaten Banyuwangi mencapai 51.960,40 ton pupuk yang meliputi 75% Urea dan 15% TSP.[88]

Serangan hama tanaman pada padi juga menjadi salah satu tantangan dari para petani dalam usaha produksinya, untuk mengatasi serangan hama maka petani menggunakan pestisida. Pestida berasal dari bahan kimia yang digunakan dalam pertanian untuk mengatasi hama pada tanaman. Pada tanaman padi hama biasanya berupa wereng, walang sangit, keong, kepik dan lainnya. Hama pada tanaman padi tersebut meninggalkan masalah pada tanaman seperti daun yang menguning dan bolong, padi menjadi keriput, beras yang dihasilkan memiliki noda dan lainnya.[89] Pada tahun 1982 pertanian di

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[88] BPS Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi dalam Angka Tahun 1984, hlm 205

[89] Karmin, diwawancara oleh penulis, Banyuwangi, 21 April 2025

Kabupaten Banyuwangi mengalami permasalahan dengan adanya serangan hama Tungro pada tanaman padi, total sawah yang mendapat seerangan hama Tungro sebanyak 200 hektar. Padi yang terserang hama tungro pertumbuhannya kerdil, perkembangannya juga lambat serta produktivitasnya menurun menyebabkan produksi panen padi merosot.[90]

Pada tahun 1984 Kabupaten Banyuwangi menyalurkan Pestisida jenis Insektisida sebanyak 259.802 liter dan pestisida jenis Rodentibida sebanyak 1.299,01 Kg kepada petani sebagai sarana intensifikasi.[91] Lalu pada tahun 1986 Presiden mengeluarkan Surat Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1986 tentang peningkatan pengendalian hama wereng coklat pada tanaman padi, hal ini dilakukan untuk mengatasi serangan hama wereng di seluruh daerah agar tidak membahayakan usaha melestarikan swasembada pangan terutama beras. Berdasarkan Inpres tersebut maka pemerintah menginstruksikan untuk adanya sistem Pengendalian Hama Terpadu (PHT) dan penyuluhan pada petani dan masyarakat luas agar pengendalian hama dapat dilakukan secara efektif.[92]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Hasil dari pelaksanaan Revolusi Hijau di Kabupetan Banyuwangi adalah peningkatan hasil panen pada tanaman padi. Data produksi padi yang tertera pada tabel dibawah dalam bentuk produksi gabah kering giling. Kabupaten Banyuwangi menjadi Kabupaten penghasil beras terbesar di Indonesia seperti yang disampaikan oleh Gubernur Soenandar Prijosoedarmo ketika meresmikan

[90] Berita Yudha, 200 Hektar Tanaman Padi di Kabupaten Banyuwangi Mendapat Serangan Hama Tungro, 5 Februari 1982, hlm 4

[91] BPS Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi dalam Angka Tahun 1984, hlm 205

[92] BPK RI, Inpres Nomor 3 Tahun 1986, diakses pada 10 Mei 2025 https://peraturan.bpk.go.id/Details/315399/inpres-no-3-tahun-1986

proyek pompa air di Kecamatan Wongsorejo. Menurut Gubernur, Kabupaten Banyuwangi menjadi penumbang 21 persen produksi beras di Indonesia dari wilayah Jawa Timur.[93]

Tabel 3.2

Hasil Padi Kabupaten Banyuwangi Tahun 1979-1995

No	Tahun	Luas Panen (Ha)	Hasil (Kw/Ha)	Produksi (Ton)
1	1979	128.621	54,63	702.670
2	1980	114.731	54,91	630.031
3	1981	124.978	54,61	682.483
4	1982	117.111	55,28	647.483
5	1983	119.471	55,35	661.272
6	1984	132.642	57,95	779.636
7	1987	117.302	55,56	667.049
8	1988	119.273	55,18	668.226
9	1989	125.597	56,26	703.603
10	1990	120.962	56,46	682.903
11	1993	112.951	59,75	675.785
12	1994	110.622	56,65	626.627
13	1995	121.515	56,96	692.117

Sumber: Badan Pusat Statistika Kabupaten Banyuwangi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Data yang didapatkan diatas merupakan memberikan gambaran hasil produksi padi setiap tahunnya pada periode pemerintahan orde baru, yang juga terdapat kenaikan dan penurunan hasil produksi padi setiap tahunnya. Hasil produksi padi yang mengalami kenaikan dan penurunan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti iklim yang tidak menentu, serangan hama pada tanaman sampai pengalaman atau pengetahuan dari petani. Sementara peningkatan hasil padi merupakan dampak positif dari penerapan Revolusi Hijau di Kabupaten Banyuwangi. Hasil yang didapatkan oleh petani tentunya digunakan untuk

[93] Berita Yudha, Banyuwangi Tetap Penghasil Beras terbesar, 15 Januari 1982, hlm 4

memenuhi kebutuhan primer. Pada tahun 1993 di Kabupaten Banyuwangi harga jual beras per kilogram adalah, beras medium Rp. 551, jenis beras super 15 persen Rp. 580 dan jenis beras super 5 persen Rp. 610. Sedangkan harga jual gabah panen sampai Rp. 260, harga gabah kering simpan Rp 290, dan gabah kering giling Rp. 340, harga gabah dijual perkilogram.[94]

Keberhasilan dari Revolusi Hijau sendiri tidak terlepas dari faktor internal dan eksternal dari berbagai pihak yang terlibat diantaranya adalah[95]

1. Penggunaan varietas padi yang baik atau disebut HYV (*High Yielding Varieties*) yang juga dibantu dengan penerapan teknologi pertanian dengan input yang tinggi atau HEIA (*High External Input Agriculture*).
2. Kebijakan dan dorongan kuat dari pemerintah.
3. Dukungan dari kelembagaan seperti KUD, para penyuluh dan kelompok-kelompok tani daerah.
4. Adanya dukungan sarana dan prasarana seperti saluran irigasi, bendungan, subsidi pupuk dan kredit usaha tani.
5. Gerakan sosial seperti BIMAS (Bimbingan Massal) yang kemudian diperkhusus menjadi INSUS (Intensifikasi Khusus).
6. Kegiatan pasca panen dengan mendirikan usaha penggilingan padi di daerah-daerah produksi padi.
7. Jaminan atas harga pasar dari pemerintah pada petani dengan adanya BULOG (Badan Urusan Logistik).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[94] Bali Pos, Dolog Banyuwangi Tingkatkan Kualitas Beras yang ditampung, 17 Maret 1993, hlm 5

[95] Roedhy Poerwanto dan G.A. Wattimena, Belajar dari Revolusi Hijau dalam *Merevolusi Revolusi Hijau*, ed Roedhy Poerwanto dkk, (Bogor: IPB Press, 2012), 32

8. Serta dukungan dari pihak-pihak luar seperti para akademisi perguruan tinggi, lembaga penelitian, bank serta perusahaan-perusahaan pestisida dan teknologi pertanian.

Dampak-dampak yang dirasakan diatas merupakan dampak positif dari adanya Revolusi Hijau di wilayah-wilayah Indonesia. Petani yang merupakan agen utama dalam program Revolusi Hijau ini juga merasakan dampak lainnya, ketergantungan akan input dari luar dan penggunaan pestisida membuat petani merasa frustasi jika tidak ada pestisida untuk tanamannya, para petani berfikir bahwa jika tidak ada pestisida maka tidak bisa bercocok tanam.[96] Hal tersebut tentunya menimbulkan keresahan ketika terjadi kelangkaan pestisida, kemungkinan terjadi permasalahan yang lebih besar seandainya kelangkaan pestisida terjadi dan petani masih memiliki pemikiran yang sama.

Pengaruh dari Revolusi Hijau adalah perubahan sistem pertanian yang awalnya memanfaatkan alam secara tradisional menjadi sangat modern yang ketergantungan dengan input dari luar. Secara sosial, terjadi kesenjangan yang besar antara petani kaya yang memiliki lahan luas dan modal yang besar dengan petani kecil yang hanya mengandalkan lahan seadanya. Serta adanya pergeseran sistem nilai dan hubungan sosial diantara masyarakat dalam praktik pertanian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[96] Darto, diwawancara oleh penulis, Banyuwangi, 4 Mei 2025

BAB IV

DAMPAK REVOLUSI HIJAU PADA PERTANIAN PADI DI KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 1979-1998

Petani merupakan tulang punggung dalam kebutuhan pangan yang ada didalam negeri, dengan menjaga kestabilan pangan maka kesejahteraan dari masyarakatnya juga menjadi jaminan. Sehingga pertanian memegang peranan penting dalam menjaga kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sektor pertanian merupakan sektor yang menampung banyak tenaga kerja, melihat dari keadaan alam Indonesia yang tropis dan luas maka pertanian merupakan sebagian besar pilihan bagi para masyarakat Indonesia untu menggantungkan hidupnya. Padi menjadi tanaman pertanian yang mendominasi sektor ini karena telah menjadi makanan pokok bagi sebagian besar masyarakat Indonesia.[97]

Modernisasi dalam sektor pertanian telah membawa Pertanian Indonesia dalam tingkatan yang berbeda dari sebelumnya. Revolusi Hijau kemudian hadir membawa perubahan pertanian Indonesia kearah modernisasi, terutama di wilayah Kabupaten Banyuwangi sebagai salah satu Kabupaten dengan penghasil padi terbesar di Indonesia. Pembangunan pertanian lewat Revolusi Hijau pada dasarnya berusaha memperkuat ketahanan pangan negara dan membawa masyarakat keluar dari jalur kemiskinan. Revolusi Hijau yang terlaksana di wilayah-wilayah Indonesia tampaknya membawa masyarakat pada perubahan sosial, perubahan-perubahan

[97] Meilany Tulong, Mahyudin Damis, and Jenny Nelly Matheosz, "Kehidupan Sosial Ekonomi Petani Padi Di Tumani Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan," *Journal of Social and Culture*. 17, no. 1 (2024): 1–17.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

tersebut nampak dari lembaga-lembaga kemasyarakatan dan berdampak positif maupun negatif terhadap kehidupan sosial masyarakat.[98]

Perubahan menurut KBBI adalah keadaan yang berubah, yang berasal dari kata "ubah" yang memiliki arti berbeda dari semula. Sementara kata Sosial memiliki arti berkenaan dengan masyarakat. Perubahan sosial berarti perubahan yang terjadi dalam suatu cakupan sistem, atau terjadi perbedaan terhadap keadaan sistem tertentu dalam jangka waktu yang berbeda. Ibnu Khaldun menjelaskan perubahan sosial sebagai sebuah siklus yang akan terus berulang. Ia mencontohkan dengan perubahan pada masyarakat nomaden yang mampu menjadi masyarakat kota akibat solidaritas yang kuat. Namun ketika menjadi masyarakat kota solidaritas yang dimiliki sebelumnya hilang sehingga mudah terpecah belah dan akhirnya kembali lagi menjadi masyarakat nomaden. Lalu menurut Durkheim perubahan sosial merupakan akibat dari bertambahnya jumlah penduduk. Kepadatan penduduk menyebabkan bertambahnya pada pembagian kerja yang lebih spesifik serta terjadinya perubahan solidaritas sosial dari setiap individu.[99]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Sementara menurut Selo Soemardjan dalam buku Perubahan Sosial di Yogyakarta mengartikan perubahan sosial sebagai segala perubahan yang mempengaruhi nilai sosial suatu masyarakat yang didalamnya terdapat nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku dari masyarakat tersebut. Perubahan sosial bisa berasal dari mana saja, seperti pertumbuhan penduduk yang pastinya menimbulkan perubahan

[98] Ferdi Gultom and Sugeng Harianto, "Revolusi Hijau Merubah Sosial-Ekonomi Masyarakat Petani," *TEMALI : Jurnal Pembangunan Sosial* 4, no. 2 (2021): 145–54, https://doi.org/10.15575/jt.v4i2.12579.

[99] Nanang Martono, Sosiologi Perubahan Sosial: Perspekif Klasik, Modern, Postmodern, dan Kolonial, Depok: Rajawali Press, 2018, hlm 65

ekologis, lalu perubahan tersebut akan mempengaruhi hubungan antara kelompok-kelompok sosial. Sumber-sumber perubahan sosial kuncinya terletak pada lingkup biologi, teknologi, dan ideologi dari masyarakat. Asumsi dasar dari perubahan adalah dalam proses perubahan keputusan untuk menentukan suatu perubahan ada dalam masyarakat yang berkeinginan untuk terjadinya perubahan tersebut. Jika perubahan tidak didasarkan pada kemauan bebas rakyat maka perubahan yang terjadi hanya berlangsung di permukaan dan bersifat sementara.[100]

Selo Soemardjan atau dengan nama asli Prof. Dr. Kanjeng Pangeran Haryo Selo Soemardjan merupakan tokoh pendidikan dan pemerintahan Indonesia yang besar dala lingkungan abdi dalem Kasultanan Yogyakarta Hadiningrat. Selo Soemardjan dikenal sebagai bapak Sosiologi Indonesia, ia pernah meraih gelar doktor daro Cornell University pada tahun 1959, dan kemudian mengajar sosiologi di Universitas Indonesia, ia juga dikenal atas kontribusi dalam studi perubahan sosial. Perubahan sosial menurut Selo Soemardjan merupakan perubahan yang mencakup sistem sosial, bukan hanya struktur sosial saja tetapi juga perubahan dalam aspek budaya dan interaksi sosial yang membentuk masyarakat.[101] Pada penelitian ini maka Revolusi Hijau yang diterapkan di Kabupaten Banyuuwangi atas kebijakan-kebijakan dari pemerintaha pusat membawa beberapa dampak positif serta negatif.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[100] Selo Soemardjan, *Perubahan Sosial di Yogyakarta*, (Jakarta: Komunitas Bambu, 2009) ,447

[101] "Pengertian Perubahan Sosial Menurut Selo Soemardjan", Kompas, diakses pada 19 Mei 2025 https://kumparan.com/sejarah-dan-sosial/pengertian-perubahan-sosial-menurut-selo-soemardjan-23DVroowvvP/full,

A. Dampak Positif

1. Peningkatan Mutu dan Kualitas Petani

Revolusi Hijau hijau membawa perubahan terhadap pertanian dengan penggunaan bibit yan unggul, pupuk kimia sintesis, pestisida dan cara pertanian yang lebih modern, hal tersebut tentunya mengubah sistem pertanian yang awalnya secara tradisional menjadi lebih modern dan ilmiah. Petani yang menjadi sasaran utama tentunya perlu pengenalan terhadap sistem pertanian baru lewat Revolusi Hijau ini, maka dilakukan penyuluhan agar petani bisa dapat merasakan perubahan terhadap pertaniannya. Pengenalan dan penyuluhan tersebut tentunya menambah pengetahuan dari petani. Kualitas petani juga meningkat seiring dengan pengenalan-pengenalan inovasi terbaru pada pertanian. Revolusi Hijau memberikan petani pemahaman mengenai modernisasi dari pertanian, dari pertanian tradisional mereka yang sangat mengandalkan faktor alam menjadi lebih modern dengan adanya pengenalan teknologi seperti irigasi modern, pestisida dan lainnya. Tujuan dari penyuluhan sendiri adalah untuk pemberdayaan petani, serta agar petani tau, mau dan mampu untuk mengatasi masalahnya dengan baik dengan kata lain menghasilkan petani yang mandiri.[102]

Pendidikan yang diberikan kepada petani lewat penyuluhan bukan hanya berupa teori saja, tetapi juga praktik langsung lewat demonstrasi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[102] Dwi Sadono, "Pemberdayaan Petani: Paradigma Baru Penyuluhan Pertanian di Indonesia", *Jurnal Penyuluhan* Vol 4 No 1, 2008, https://doi.org/10.25015/penyuluhan.v4i1.2170

lapangan. Hal tersebut tentunya memudahkan petani dalam memahami manfaat dari penggunaan teknologi dari Revolusi Hijau serta meningkatkan kualitas mereka dalam mengelola lahan pertanian. Penyuluhan dilakukan oleh lembaga pemerintah khusus yang telah melalui pelatihan terlebih dahulu sebelum turun langsung memberikan penyuluhan kepada petani. Sebelum melaksanakan penerangan ke kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Banyuwangi, terlebih dahulu mengadakan rapat kerja yang diikuti oleh para Kepala Desa, pimpinan BUUD/KUD, para penyuluh, Kepala dinas dan lainnya yang bertempat di Sabha Swagata Blambangan atau yang sekarang dikenal sebagai Pendopo Blambangan dan dipimpin langsung oleh Bupati.[103]

Petani yang telah melaksanakan Revolusi Hijau berarti adalah petani yang telah mendapatkan pengarahan dari pemerintah mengenai perkembangan dalam dunia pertanian. Petani yang telah mendapat penyuluhan seperti bagaimana cara menanam bibit yang unggul, berapa banyak pupuk yang digunakan serta berapa kali pengairan pada sawah. Hal tersebut tentunya juga meningkatkan hasil produksi pada tanaman. Peningkatan hasil produksi padi juga membawa dampak pada kesejahteraan masyarakat petani. Kesejahteraan petani dilihat berdasarkan sebesar apa penghasilan yang didapatkan petani dari hasil panennya. Pada awal pelaksanaan dari Revolusi Hijau petani merasakan hasil panen mereka yang sangat besar dan menguntungkan. Karena keterjaminan harga

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[103] Jawa Pos, Raker Tehnis Penerangan Bimas se Kabupaten, 1 Juni 1978, hlm 6

pasar oleh pemerintah lewat BULOG yang bertugas untuk menyerap dan menyalurkan hasil panen memberikan rasa aman bagi petani Hal tersebut memberikan petani peluang besar untuk memulai pertanian yang lebih besar dengan harapan hasil yang besar pula. Hasil dari pertanian tersebut disamping digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok, digunakan juga untuk memenuhi kebutuhan primer lainnya serta untuk mendapatkan akses pendidikan yang layak bagi anak-anak mereka.[104]

Modernisasi dunia pertanian lewat Revolusi Hijau memunculkan varietas tanaman jenis baru pada pertanian. Teknologi pertanian seperti varietas bibit unggul merupakan bibit yang telah diteliti dan diuji terlebih dahulu sebelum diedarkan pada masyarakat. Varietas pertama yang mulai tersebar di Indonesia meggantikan varietas bibit tradisional adalah varietas IR 8 yang juga tersebar di berbagai negara pada awal tahun 1970. Ciri utama dari varietas jenis IR 8 adalah batang pendek, anakannya banyak, daun tegak, dan responsive terhadap pupuk serta umurnya yang pendek yaitu hanya 125-135 hari, maka dari itu varietas bibit ini juga disebut sebagai padi modern.[105] Selain itu ada juga varietas bibit IR 36 yang popular pada akhir tahun 1970an, yang membuat Kabupaten Banyuwangi menanam varietas bibit ini pada musim tanam 1977/78, dianjurkan kepada petani Kabupaten Banyuwangi untuk menana bibit padi jenis ini karena selain umurnya yang pendek hasilnya juga memuaskan. Pada pertengahan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[104] Muda'I, diwawancara oleh penulis, Banyuwangi, 10 April 2025

[105] Sriani Sujiprihati dan Muhammad Syukur, Pemuliaan Tanaman dalam Merevolusi Revolusi Hijau dalam *Merevolusi Revolusi Hijau*, (Bogor: IPB Press, 2012), 265

Desember 1977 bahkan diadakan training kepada petani Kecamatan Cluring untuk lebih meningkatkan pengetahuan dalam penanaman bibit jenis ini. [106]

Pada tahun 1986, varietas padi baru yakni IR 64 diperkenalkan dan dilepaskan pada masyarakat sebagai varietas unggul di Indonesia. Varietas padi ini lebih digemari oleh masyarakat karena rasa nasi yang enak. [107] IR 64 menjadi varietas padi yang paling luas ditanam di Indonesia selama beberapa tahun. Karakteristik dari verietas padi IR 64 yakni umurnya yang sedang yakni berkisar antara 100-125 hari setelah di semai, postur tanaman yang pendek sampai sedang berkisar antara 95-115 cm, bentuk tanaman yang tegak, jumlah anakannya sedang berkisar 20-25 anakan/rumpun dengan anakan yang produktif 15-16 anakan/rumpun, responsif terhadap pemupukan, tahan rebah, daya hasil yang agak tinggi yakni berkisar 5-6 ton/ha, tahan ham penyakit utama, hasil gilingannya baik, serta rasa nasi yang enak. [108]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2. Peningkatan Produksi Padi

Revolusi Hijau memberikan hasil yang sangat signifikan terhadap kenaikan padi. Sebagai makanan pokok bagi masyarakat Indonesia maka peningkatan hasil produksi berarti pengamanan pangan nasional. Peningkatan hasil padi pada masa orde baru merupakan pengaruh dari Revolusi Hijau yang membawa modernisasi pertanian lewat pembibitan

[106] Jawa Pos, Banyuwangi Diharapkan Tanam Padi Jenis IR 36, 9 Januari 1978, hlm 8
[107] Misban, diwawancara oleh penulis, Banyuwangi, 12 April 2025
[108] Sriani Sujiprihati dan Muhamad Syukur, Pemuliaan Tanaman dalam Merevolusi Revolusi Hijau, dalam *Merevolusi Revolusi Hijau*, (Bogor: IPB Press, 2012) 265

yang unggul, pupuk kimia sintesis, pestisida, serta penyuluhan intensif kepada petani yang memberikan dampak signifikan pada kenaikan hasil produksi padi.

Produksi padi yang baik meningkatkan ketahanan pangan serta memenuhi swasembada beras di Indonesia. Swasembada beras berhasil diraih oleh Indonesia pada Tahun 1984 dengan produksi beras nasional mencapai 26 juta ton.[109] Hal tersebut membuktikan bahwa ketahanan pangan nasional menjadi lebih terjamin, sehingga masyarakat tidak lagi mengalami krisis pangan seperti yang terjadi pada awal tahun 1960 pada masa pemerintahan Soekarno. Ketersediaan bahan pangan haruslah bersumber dari produksi sendiri yang berasal dari semua tingkat produksi masyarakat daerah maupun desa. Terdapat tiga komponen utama dalam membangun ketahanan pangan yakni produksi sendiri (*self production*), cadangan (*stock*) dan pendapatan (*income*).[110] Pada saat itu maka produksi yang besar dari sektor pertanian serta cadangan yang mumpuni dari BULOG serta pendapatan negara Indonesia yang baik membuat ketahanan pangan nasional menjadi terpenuhi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Pada tingkat Provinsi, Jawa Timur berhasil meningkatkan jumlah produksi hingga dapat memenuhi permintaan pinjaman beras sebesar 12.000 Ton ke Zansibar, Afrika. Pinjaman ini ternyata bukanlah pinjaman pertama yang diberikan Jawa Timur pada suatu negara, Vietnam dan

[109] Kurniawan Ivan, Presiden Soeharto dan Swasembada Pangan, Museum Kepresidenan, diakses pada 19 Mei 2025, https://museumkepresidenan.id/artikel/swasembada-pangan/

[110] Achmad Suryana, "Menelisik Ketahanan Pangan Kebijakan Pangan dan Swasembada Beras," *Pengembangan Inovasi Pertanian* 1(1), 2008: 1-16, hlm 11

Kenya Afrika terlebih dahulu telah menerima pinjama beras dari Jawa Timur sebanyak 150.000 ton beras. Hal tersebut merupakan salah satu dampak dari produksi berlebih beras di Jawa Timur, di tahun ini juga suplai beras Jawa Timur menerima sebanyak 307.000 ton beras yang membuat Jawa Timur menyangggupi pinjaman beras sekaligus untuk mengurangi beban biaya penyimpanan.[111]

Pada tingkat Kabupaten, Kabupaten Banyuwangi juga mengalami peningkatan hasil padi pada tahun 1979/1980 tecatat dengan total 8.129.109,71 kwintal (896.080 ton) padi kering giling atau setara dengan beras sebesar 4.227.137 kwintal (465.962 ton). Hal tersebut merupakan peningkatan dari tahun sebelumnya yang sebesar 7.723.766,88 kwintal (851.399 ton) atau setara dengan beras sebesar 4.106.358,84 kwintal (452.648 ton). Maka produksi pada tahun tersebut mengalami peningkatan sebesar 5,25%. Berdasarkan angka produksi tahun 1979/1980 tersebut, dengan jumlah penduduk pada akhir tahun 1979 sebanyak 1.349.129 jiwa, hasil produksi beras perkapita di Kabupaten Banyuwangi mencapai 313 kg.[112] Hasil padi yang besar dari Kabupaten Banyuwangi membawa daerah ini menjadi daerah penghasil beras terbesar di Indonesia. Sebanyak 21% hasil produksi beras di Indonesia berasal dari Kabupaten Banyuwangi pada tahun 1982.[113]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[111] Bali Pos, Jatim Berikan Pinjaman 12.000 Ton Beras ke Zansibar, 15 Mei 1993, hlm 8
[112] Suara Karya, Produksi Padi Kab Banyuwangi Meningkat, 21 April 1980, hlm 5
[113] Berita Yudha, Kabupaten Banyuwangi Penghasil Beras Terbesar di Indonesia, 19 Januari 1982, hlm 8

B. Dampak Negatif

1. Perubahan pada Lembaga Kemasyarakatan dan Sistem Sosial

Perubahan sistem pada pertanian lewat Revolusi Hijau membawa dampak yang terasa bagi para petani sebagai pelaku utama dari Revolusi Hijau ini, di Kabupaten Banyuwangi sendiri petani merasakan dampak diantaranya:

a) Hubungan Petani dengan Buruh Tani

Petani merupakan mata pencaharian individu yang memiliki lahan dan dimanfaatkan untuk menanam tanaman pangan maupun lainnya. Petani bertanggungjawab atas seluruh pekerjaan pada lahan pertaniannya, petani juga terbagi menjadi empat golongan dengan kategori sebagai berikut: petani kaya yang memiliki lahan lebih dari 2 hektar, petani kecil yang memiliki lahan 1-2 hektar, petani gurem atau petani yang miskin memiliki lahan kurang dari 1 hektar serta petani buruh yang tidak memiliki lahan sama sekali. Petani terkadang dalama masa kerjanya membutuhkan buruh tani sebagai tenaga tambahan. Sementara buruh tani adalah individu yang bekerja di lahan milik orang lain untuk memperoleh upah baik secara harian, borongan maupun bagi hasil. Buruh tani memiliki status yang terbilang rendah karena mereka bukanlah pemilik lahan, buruh tani juga hidup pada keadaan ekonomi yang memprihatinkan.[114]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[114] Agung Nugroho, Pengamat UGM: Hari Buruh, Jangan Lupakan Nasib para Buruh Tani, 2024, https://ugm.ac.id/id/berita/pengamat-ugm-hari-buruh-jangan-lupakan-nasib-para-buruh-tani/

Hubungan sosial yang terjalin antara petani dan buruh tani mengalami beberapa pengaruh atas terlaksananya Revolusi Hijau di Kabupaten Banyuwangi. Petani sebagai pemilik lahan serta buruh tani sebagai pengolah lahan. Sistem pertanian tradisional masih menggunakan pola kekerabatan, tolong menolong, dan gotong royong antara petani dan juga buruh tani. Maka pada sistem pertanian yang lebih modern hubungan antara petani dan buruh tani menggunakan pola transaksional, petani lebih mengedepankan keuntungan yang kemudian membuat hubungan sosial yang dulu terjalin secara kekerabatan perlahan memudar.[115]

Petani membutuhkan buruh tani sebagai pekerja untuk lahan mereka, karena dirasa petani tidak mampu jika bekerja sendirian, maka dibantu oleh buruh tani, buruh tani kemudian mendapatkan upah atas hasil kerja membantu petani tersebut. Sistem upah juga berbeda tergantung kontrak yang sudah disepakati oleh petani dan buruh tani. Masa waktu kerja buruh tani juga beragam, kembali lagi sesuai dengan kontrak yang sudah disepakati, waktu kerja buruh tani berkisar mulai dari jam 6 pagi sampai 12 siang. Upah yang diberikan kepada buruh tani berbeda-beda setiap daerahnya tetapi pada tahun 1980 di Kabupaten Banyuwangi berkisar antara Rp.1000 sampai Rp.2000 perhari.[116] Selain itu biasanya buruh tani juga mendapatkan tambahan berupa jatah makan dari petani yang memperkerjakannya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[115] Wahyuni Apri Astuti, "Hubungan Kerja Petani-Buruh Tani Di Pedesaan Dan Faktor Yang Mempengaruhinya," *Forum Geografi* 7, no. 1 (2016): 64, https://doi.org/10.23917/forgeo.v7i1.4798.

[116] Jamroni, diwawancara oleh penulis, Banyuwangi, 12 April 2025

Tetapi ada juga petani yang membayar hasil kerja buruh tani dengan hasil panen mereka yang disebut sebagai sistem bagi hasil, hal ini disampaikan oleh salah satu informan. Jika petani sudah mengontrak kerja buruh tani dari awal masa tanam hingga panen, tetapi tidak sudah disepakati bahwa upah menggunakan sistem bagi hasil, maka sebagai gantinya petani memberikan 1 karung padi dari total 4 karung padi yang dihasilkan pada proses panen. Hal tersebut dinyatakan informan sebagai kesepakatan yang sebelumnya sudah dilakukan dan disepakati antara petani dengan buruh.[117] Hubungan sosial antara petani dan buruh tani merupakan hubungan timbal balik yang saling menguntungkan, pemilik lahan membutuhkan buruh tani untuk mengelola dan merawat lahan pertaniannya, sementara buruh tani membutuhkan pekerjaan untuk mencukupi hidupnya.

Keuntungan yang dihasilkan oleh kedua belah pihak sebenarnya jika dilihat lebih lanjut maka juga bisa disebut memiliki ketimpangan, karena meskipun buruh tani yang mendapatkan upah atas pekerjaannya dan petani yang mendapatkan untung atas hasil panennya yang kemudian uang hasil penjualan panen diperlukan untuk membayar buruh serta untuk keperluan pertanian dikemudian hari. Buruh tani yang bekerja dibawah matahari langsung dari jam 6 sampai jam 12 dengan upah harian sebesar Rp.2000 belum tentu cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, hal tersebut tentunya menimbulkan tekanan ekonomi pada buruh tani. Bahkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[117] Muda'I, diwawancara oleh penulis, Banyuwangi, 10 April 2025

terkadang para buruh tani juga ada beberapa yang memiliki lahan tetapi masih menjadi buruh karena hasi dari lahan mereka yang terbilang kecil tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan menjadikan mereka mencari tambahan lain sebagai buruh pada petani yang memiliki lahan dan modal yang lebih besar. Sementara ada buruh tani perempuan yang berisi ibu-ibu rumah tangga yang biasanya dikontrak petani untuk menanam padi selama masa tanam.[118]

Partisipasi perempuan dalam dunia kerja memunculkan peran ganda bagi perempuan, yakni peran domestik yang didalamnya perempuan memiliki tugas untuk mengurus rumah tangga serta peran publik yang memiliki tugaas untuk bekerja dan memenuhi kebutuhan hidup bagi keluarga. Penyebab perempuan masih bekerja dan ikut andil menopang kebutuhan keluarga tentunya beragam, tetapi dalam konteks buruh tani maka bukanlah hal yang tabu bagi perempuan jika bekerja sebagai buruh. Tentunya alasan utama bagi buruh perempuan yang masih bekerja adalah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Seperti yang diketahui bahwa seorang buruh tani apalagi perempuan tidak memiliki lahan untuk dikelola, sehingga mau tidak mau mereka bekerja sebagai buruh. Upah yang didapatkan pun tidak sebesar itu karena biasanya buruh tani perempuan hanya bekerja pada musim tertentu seperti musim tanam padi.[119]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[118] Darto, diwawancara oleh penulis, Banyuwangi, Mei 2025

[119] Rezki Andayani, Fatmawati Fatmawati, and Nursini Nursini, "Peran Buruh Tani Perempuan Dalam Ekonomi Keluarga: Studi Kasus Desa Majannang," *Development Policy and Management Review (DPMR)* 2, no. 1 (2022): 66–84, https://doi.org/10.61731/dpmr.vi.20916.

b) Permasalahan pada Kelompok Tani

Pemberdayaan dan peningkatan pengetahuan kepada petani dilakukan sebagai usaha pemerintah untuk menaikkan taraf pembangunan pertanian. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk memberdayakan petani adalah dengan penguatan sistem kelembagaan kelompok tani. Kelompok tani dianggap memiliki lebih banyak pengetahuan karena program pemerintah seperti penyuluhan dan bimbingan pertanian diberikan langsung pada kelompok tani. Maka diperlukan penguatan kelompok tani untuk mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat petani.[120] Kelompok tani merupakan salah satu lembaga masyarakat yang dibentuk oleh pemerintah untuk memudahkan pekerjaan pertanian. Kelompok tani mendapatkan bantuan dari pemerintah lewat lembaga pemerintah yang berada di daerahnya seperti KUD.

Kelompok tani memiliki tugas untuk memberikan wadah bagi para petani agar memperoleh bantuan dari pemerintah dalam hal sarana produksi petani, jika kelompok tani tidak ada maka bantuan dari pemerintah juga tidak bisa turun. Pupuk yang diperoleh pun tidak diedarkan di pasaran jadi petani yang tidak tergabung kedalam kelompok tani maka tidak mendapatkan pupuk dari pemerintah. Masalah yang ditemui dalam kelompok tani ini adalah petani yang sudah memesan pupuk dalam kelompok tani terkadang tidak memiliki uang untuk

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[120] Paul Adryani Moento et al., "Penguatan Kelompok Usaha Tani Berbasiskan Pemberdayaan Masyarakat Petani Padi," *Societas : Jurnal Ilmu Administrasi Dan Sosial* 9, no. 1 (2020): 25–34, https://doi.org/10.35724/sjias.v9i1.2782.

membayarkannya jadi pupuk tidak terpakai lagi sampai petani sanggup membayar, hal tersebut berakibat pada penumpukan pupuk di gudang petani di beberapa daerah.[121]

Konflik internal antar anggota kelompok tani juga menjadi permasalah ketika beberapa anggota menganggap bahwa kelompok tani hanyalah organisasi formalitas untuk menerima bantuan dari masyarakat. Hal ini disampaikan juga oleh salah satu informan bahwa beliau dulunya merupakan bendahara dari kelompok tani di desanya, tetapi setelah bergabung selama empat tahun beliau mengundurkan diri sebab konflik antar anggota dan pergantian pengurus yang menurut beliau kurang tepat, serta informan juga menerangkan bahwa banyak bantuan dari pemerintah yang turun pada kelompok tani tetapi beberapa anggota yang serakah hanya ingin bantuan tersebut untuk dirinya sendiri.[122]

Hal tersebut tentunya menjadi permasalahan ketika kemudahan pupuk didapatkan dalam kelompok tani tetapi disisi lain internal kelompok tani mengalami kekacauan. Petani yang seharusnya merasa aman terhadap ketersediaan bahan produksi pertanian masih harus mengalami kesulitan dalam kelompok yang dianggap paling kecil di masyarakat.

c) Ketergantungan Petani terhadap Input Eksternal

Akibat dari modernisasi pertanian, petani yang terus menerus dijejali oleh bahan-bahan kimia merasakan ketergantungan terhadap bahan kimia

[121] Karmin, diwawancara oleh penulis, Banyuwangi, 21 April 2025
[122] Saiful, diwawancara oleh penulis, Banyuwangi, 10 April 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

tersebut. Hasil yang didapatkan petani dari Revolusi Hijau memberikan dampak positif pada kenaikan hasil panen tanaman mereka. Hal tersebut yang kemudian membawa petani untuk terus melangsungkan metode pertanian dari Revolusi Hijau. Petani kemudian merasa bahwa hasil tanaman kurang maksimal jika tidak memanfaatkan keuntungan dari modernisasi pertanian, dari hal tersebutlah kemudian timbul rasa ketergantungan petani terhadap modernisasi pertanian.[123]

Rasa ketegantungan tesebut timbul akibat dari rendahnya keberdayaan masyarakat di sektor pertanian. Akibat dari rendahnya keberdayaan masyarakat telah melemahkan tingkat kemandirian, keterlibatan, dan kemampuan dalam beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi. Rendahnya keberdayaan masyarakat dapat dilihat dari lemahnya tingkat percaya diri masyarakat dalam menghargai produk lokal. Masyarakat lebih memilih untuk menjadi konsumen bagi produk luar yang mereka rasa lebih bergengsi dan berakibat pada produk lokal yang terpinggirkan. Hal tersebut memunculkan rasa penasaran bagi beberapa pengamat yang kemudian menyebutkan kondisi seperti ini sebagai sindrom bangsa jajahan.[124]

Kesimpulannya adalah petani menganggap bahwa hasil panen mereka yang besar dan melimpah merupakan berkat dari pupuk, pestisida, dan benih yang unggul dari Revolusi Hijau, sementara pupuk, pestisida,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[123] Ahmad Sugiono, diwawancara oleh penulis, Banyuwangi, 7 Mei 2025

[124] Sumardjo, "Kelembagaan Masyarakat Tani" dalam *Merevolusi Revolusi Hijau*, ed. Roedhy Poerwanto dkk, Bogor: IPB Press, hlm 679

dan benih tradisional tidak memberikan hasil yang sama besar dengan Revolusi Hijau. Hal tersebut kemudian menimbulkan permasalahan bagi pemerintahan selanjutnya karena produk lokal menjadi kalah saing dengan produk luar. Tetapi, sejak awal sektor pertanian yang digaungkan dengan istilah Revolusi Hijau ini juga menghadapi tantangan berupa cara untuk menjaga keberlangsungan dari Revolusi Hijau ini. Melihat dari kebutuhan pangan yang terus mengalami kenaikan karena jumlah penduduk yang semakin naik. Sedangkan disisi lain lahan yang mulai berkurang, pengairan yang buruk, produktifitas dari tanaman yang terus menurun serta iklim yang tidak menentu membuat produksi pertanian berkurang sehingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan yang terus bertambah.[125]

Isu lingkungan yang terjadi akibat adanya Revolusi Hijau masih menjadi perhatian dari para peneliti dan pengamat lingkungan, karena efek yang ditimbulkan oleh Revolusi Hijau tidak sedikit yang memberikan dampak buruk terhadap lingkungan. Penggunaan pupuk kimia sintesis sintesis dan pestisida menyebabkan pencemaran pada tanah, udara, dan air. Bahan kimia yang terdapat dalam pupuk dan pestisida mengurangi kesuburan tanah jika digunakan dalam jangka panjang karena menurunnya unsur organik alami dari tanah itu sendiri. Pada Revolusi Hijau praktik menanam dengan satu jenis tanaman secara luas menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem dan menyebabkan tanaman lebih

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[125] Rokhimin Dahuri, "Pembangunan Pertanian Berkelanjutan: dalam Perspektif Ekonomi, Sosial dan Ekologi," *Agrimedia* Vol 4 No 1, http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/29161, 1998, hlm 5

rentan terhadap hama dan penyakit. Serta lebih lanjut peneliti mulai menyadari bahaya dari penggunaan bahan kimia pada tanaman juga berdampak bagi yang mengkonsumsinya.[126] Efek jangka panjang yang diakibatkan oleh Revolusi Hijau ternyata memberikan permasalahan bagi generasi dikemudian hari.

2. Dampak Sosial Ekonomi pada Masyarakat

Revolusi Hijau bukan hanya membawa dampak sosial tetapi juga pada perekonomian dari masyarakat petani. Perekonomian masyarakat petani sangat bergantung pada hasil tani yang dilakukan.

a) Penghasilan Petani Padi

Kehidupan masyarakat desa biasa dipandang dengan kesederhanaan dan ketentraman karena dekat dengan alam, yang sejatinya merupakan definisi pandangan orang awam dalam melihat kehidupan desa. Sebaliknya, masyarakat pedesaan adalah masyarakat yang harus bekerja keras untuk dapat bertahan hidup. Hozelitz dalam buku Sosiologi Pedesaan Sajogyo mengatakan bahwa untuk membangun masyarakat yang memiliki ekonomi terbelakang haruslah menyediakan sistem yang dapat merangsang dan menarik aktivitas warga masyarakat. Sistem rangsangan yang diperlukan haruslah memiliki sehingga berdampak besar pada kegiatan bekerja masyarakat, cara menghemat uang, dan memperbesar keinginan masyarakat untuk merubah cara-cara lama.[127]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[126] Fathnur dkk, "Revolusi Hijau dan Modernisasi Teknologi Pertanian Untuk Pengembangan Pertanian Organik," Seminar Nasional TREnD FTI Universitas Jayabaya, 2023, hlm 126

[127] Sajogyo, *Sosiologi Pedesaan* (Yogyakarta: UGM Press, 1995), 26

Berdasarkan hal diatas, sejatinya untuk mendorong masyarakat menjadi lebih maju maka perubahan pada masyarakat perlu dilakukan. Kehidupan di daerah pedesaan yang tidak memiliki banyak pilihan pekerjaan menjadikan pertumbuhan daerah pedesaan sangatlah lambat. Masyarakat pedesaan yang telah melek akan hal ini akan meninggalkan desa dengan bekal pengetahuan yang diharap memberikan perubahan. Sementara masyarakat pedesaan yang hanya memiliki kualifikasi keahlian pekerjaan dengan tingkat pendidikan yang rendah membuat mereka tersisihkan dan yang tersisa hanyalah beralih pada pekerjaan informal.[128]

Daerah pedesaan yang sebagian besar kawasannya merupakan lahan pertanian menjadikan masyarakatnya mau tidak mau menjadi petani seperti yang telah dilakukan para pendahulu mereka. Sistem bertani yang diwariskan juga merupakan sistem tradisional. Revolusi Hijau kemudian hadir membawa banyak perubahan pada masyarakat khususnya petani. Memberikan modernisasi pertanian pada sistem tradisional masyarakat petani yang sudah berlalu dari waktu ke waktu. Kehidupan pertanian yang dilakukan sehari-hari oleh petani membawa dampak yang seharusnya didapatkan oleh petani yakni kesejahteraan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Namun tidak semua petani mendapatkan keuntungan, masih ada petani yang masih memiliki keterbatasan akses pada pasar yang kemudian membawa petani pada tengkulak untuk menjual hasil panen. Meskipun

[128] Muhammad Zid dan Ahmad Tarmiji Alkhudri, *Sosiologi Pedesaan* (Depok: Rajawali Pers, 2022), 94

pemerintah melalui BULOG sudah menetapkan harga dasar untuk komiditi seperti beras, tetapi mekanisme penerapannya masih lemah dan kurang pengawasan. Hal tersebut memunculkan celah bagi tengkulak untuk mengakali harga. Petani yang menjual hasil panen pada tengkulak biasanya adalah petani kecil yang tidak memiliki fasilitas penyimpanan dan sedang terikat dengan hutang sehingga membutuhkan uang dengan cepat.[129] Hal tersebut menyebabkan petani terjebak dalam kemiskinan yang terus berlanjut.

Keberhasilan pemerintah orde baru dalam pembangunan pertanian ternyata tidak berlangsung lama, pada pertengahan tahun 1997 hingga tahun 1999 Indonesia menghadapi krisis ekonomi. Krisis ekonomi pada 1998 menjadi masa-masa tersulit yang dialami oleh petani. Akibat penuruan ekonomi, pemerintah kemudian mencabut kredit yang diberikan pada petani dan karena hal tersebut harga pupuk melonjak naik.[130] Harga kebutuhan petani yang semakin naik membuat petani merasa tercekik, sementara pekerjaan utama mereka adalah bertani yang mengandalkan lahan dan tanaman, jika kebutuhan utama dari pertanian tidak terpenuhi lalu bagaimana pertanian bisa berjalan. Kehidupan ekonomi petani yang sedari awal tidak memiliki hasil yang besar dipaksa berfikir keras untuk menutupi kekurangan pada kebutuhan pokok mereka. Hal ini selaras dengan salah satu informan yang mengatakan bahwa selama masa tahun

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[129] Jamroni, diwawancara oleh penulis, Banyuwangi, 12 April 2025

[130] Shinta Utiyah Syah, Kegagalan Peningkatan Kesejahteraan Petani Pangan di Indonesia, Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Riau https://jurnal.riau.go.id/iptekin/article/view/111, hlm 75

1998 keadaan petani memprihatinkan, semua harga produksi pertanian melonjak naik, bahkan ada yang sampai menjual lahan pertaniannya untuk memenuhi kebutuhan pokok.[131]

Meskipun swasembada pangan telah dirasakan oleh Indonesia tetapi kesejahteraan tidak dirasakan oleh sebagian petani seiring dengan produksi yang meningkat. Pemerintah orde baru terlalu fokus pada cara peningkatan produksi daripada peningkatan kesejahteraan petani. Biaya produksi yang besar, resiko gagal panen dan keterbatasan akses pada pasar menjadi permasalahan dalam meningkatkan kesejahteraan petani.

b) Kredit pada Lembaga Pemerintah

Selama masa Revolusi Hijau berlangsung, petani mendapatkan bantuan yang berasal dari pemerintah berupa kredit dengan tujuan untuk memudahkan petani dalam mendapatkan kebutuhan pertanian seperti bibit, pupuk, dan pestisida. Kredit tersebut tersedia pada lembaga pemerintahan seperti KUD. KUD (Koperasi Unit Desa) bertugas menjalankan perannya sebagai wadah perekonomian masyarakat pedesaan khususnya petani. KUD juga bekerja sama dengan beberapa lembaga lain dalam menjalankan tugasnya. Penyaluran kebutuhan masyarakat petani misalnya, KUD bekerjasama dengan TPK (Tempat Pelayanan Koperasi) dengan harga jual barang kredit yang sudah ditentukan terlebih dahulu oleh KUD.[132] KUD juga bertugas untuk menyalurkan hasil panen dari

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[131] Samhuri, diwawancara oleh penulis, Banyuwangi, 21 April 2025

[132] Wawancara Pak Saiful sebagai salah satu pemilik TPK, diwawancara oleh penulis, Banyuwangi, 10 April 2025

petani pada masyarakat dan DOLOG. KUD bekerjasama dengan tengkulak untuk jual beli gabah dari hasil panen petani.

Kredit yang diterima oleh petani biasanya menggunakan prosedur melalui KUD dan kelompok tani, jadi dana diperoleh dari pemerintah yang kemudian turun pada Bank, Bank kemudian menunjuk KUD untuk memberi bantuan pada kelompok tani yang selanjutnya disalurkan ke petani yang menjadi anggota dari kelompok tani. Pengembalian kredit yang diperoleh petani kemudian diserahkan setelah masa panen, dengan masa pinjaman satu tahun dan bunga sebesar 10%.[133] Setelah memperoleh pinjaman kredit dari pemerintah, petani menggunakannya untuk kepentingan pertanian. Pengembalian kredit setelah masa panen juga memudahkan petani, karena beban pinjaman menjadi lebih ringan.

Tetapi kendala yang dialami adalah petani tidak mampu membayarkan dana kredit yang sudah dipakai, petani menganggap bahwa pinjaman yang diperoleh merupakan bantuan dari pemerintah. Sehingga petani menyepelekan pinjaman untuk mereka.[134] Kredit yang diberikan pada petani miskin tidak sampai karena rendahnya tingkat pengembalian kredit oleh masyarakat petani miskin. Dana yang diberikan pada lembaga pemerintah yang kemudian disalurkan pada petani sangatlah besar, besarannya meningkat dari Rp. 300 miliar pertahun. Sementara besaran pembayaran kredit yang kembali pada lembaga pemerintah hanya sekitar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[133] Dahlia Ningrum, "Nasib Petani dalam hal Kebijakan Pangan dari Orde Baru dan Reformasi Studi Kasus: Petani Desa Suruh Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang," (Skripsi Sosiologi FISIP UI, 2011) 110

[134] Saiful, diwawancara oleh penulis, Banyuwangi, 10 April 2025

> 25% dari sejak program kredit ini dilaksanakan. Padahal tingkat bunga sudah diturunkan menjadi 10,5% pada tahun 1995-1998 dari besar bunga 14% pada tahun 1985-1995. Permasalahan ternyata masih tetap sama, tingkat pengembalian dari petani kepada lembaga masyarakat hanya sebesar 25%.[135]

Pelaksanaan Revolusi Hijau pada Kabupaten Banyuwangi menimbulkan banyak polemik yang masih bisa dirasakan dampak positif dan negatifnya hingga saat ini. Meningkatnya produksi padi merupakan pengaruh utama dari pelaksanaan Revolusi Hijau, tetapi dilain sisi harga yang harus dibayar oleh masyarakat adalah hilangnya produk pertanian lokal, kapitalisme dalam pertanian, menurunnya kualitas lingkungan dan kesejahteraan petani yang terancam. Revolusi Hijau juga berhasil membawa masyarakat petani pada modernisasi pertanian lewat pembibitan unggul, pupuk dan pestisida kimia. Maka dengan demikian, Revolusi Hijau yang digaungkan untuk mendongkrak pembangunan pertanian bersifat sentralistik (top down), hegemonisasi, dipaksakan dan melepaskan sumber daya lokal yang dirasa tidak meningkatkan kesejahteraan petani.[136]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Setelah penerapan Revolusi Hijau di Indonesia, banyak pihak yang diuntungkan dalam hal ini. Pemerintah berhasil mendapatkan titel swasembada beras pada tahun 1984 dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat karena keberhasilan program Revolusi Hijau dalam mewujudkan swasembada beras serta

---

[135] Ashari, "Optimalisasi Kebijakan Kredit Program Sektor Petanian Di Indonesia (Policy Optimization of Credit Program for Agricultural Sector in Indonesia)," *Analisis Kebijakan Pertanian* 7, no. 1 (2009): 21–42. https://doi.org/10.21082/akp.v7n1.2009.21-42

[136] Kadarisno, Keberlanjutan Usaha Tani Padi Sawah di Kampung Kuta Desa Karangpaningal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis, Tesis Ilmu Lingkungan Universitas Padjadjaran Bandung, 2019, hlm 3

memberikan ketahanan pangan pada negara. Sementara petani mendapatkan keuntungan dari bantuan modal dan sarana produksi untuk pertanian mereka berupa bibit, pupuk dan lainnya, mengingat petani belum mengenal mengenai modernisasi pertanian, maka petani sangat terbantu dengan hal tersebut.[137]

Maka berdasarkan perubahan sosial menurut Selo Soemardjan yang terjadi pada Revolusi Hijau adalah perubahan yang dipengaruhi oleh adanya faktor eksternal. Perubahan yang terjadi akibat dari arah kebijakan pemerintah terhadap pertanian di Indonesia dan diterapkan di seluruh wilayah. Kemudian perubahan yang terjadi diikuti oleh petani sebagai sasaran utama dari kebijakan pemerintah, petani yang menjadi mayoritas mata pencaharian di Indonesia tentu saja merasakan berbagai dampak. Dampak tersebut kemudian menyebabkan perubahan pada sistem sosial masyarakat petani di desa. Seperti perubahan hubungan antara petani dan buruh menjadi lebih formal dan terjalin secara transaksional.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[137] Dahlia Meiningrum, "Nasib Petani dalam hal Kebijakan Ketahanan Pangan dari Orde Baru dan Reformasi Studi Kasus: Petani Desa Suruh Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang", (Skripsi Sosiologi FISIP UI, 2011), 117

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, pelaksanaan Revolusi Hijau di Kabupaten Banyuwangi lewat berbagai kebijakan yang berasal dari pemerintah pusat telah membawa pertanian Kabupaten Banyuwangi pada tingkatan yang berbeda. Kabupaten Banyuwangi merupakan sasaran yang baik bagi Revolusi Hijau karena luas wilayahnya yang besar dan strategis. Revolusi Hijau di Kabupaten Banyuwangi mendapat sambutan hangat dari masyarakat, dengan memperkenalkan modernisasi pada para petani membuat hasil panen padi di Kabupaten Banyuwangi mengalami peningkatan. Sistem pelaksanaanya melalui penyuluhan-penyuluhan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah kepada petani, kemudian petani juga mendapatkan pinjaman modal untuk pertanian mereka. Pengawasan dari para penyuluh juga dilakukan selama masa produksi mulai dari masa tanam hingga panen. Padi menjadi komoditi utamanya, mengingat hasil padi yang berupa beras menjadi makanan pokok bagi masyarakat.

Kedua, selain itu dampak dari terlaksananya Revolusi Hijau di Kabupaten Banyuwangi dirasakan oleh para petani sebagai peran utama yang disorot. Dampak positif yang dirasakan adalah petani mendapatkan hasil

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

produksi padi yang meningkat serta pengetahuan petani akan pertanian semakin meningkat lewat penyuluhan dari pemerintah mengenai modernisasi pertanian pada Revolusi Hijau. Sementara dampak negatif yang dirasakan mulai dari adanya perubahan sistem sosial hingga perekonomian mereka. Hasil padi yang meningkat menjadi dampak utama pelaksanaan Revolusi Hijau sementara disisi lain harga yang harus dibayar oleh masyarakat adalah hilangnya produk pertanian lokal, kapitalisme dalam pertanian, ketergantungan petani terhadap input luar, menurunnya kualitas lingkungan dan kesejahteraan petani yang terancam.

B. Saran

Setelah menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi yang berjudul "Kebijakan Revolusi Hijau dan Dampaknya pada Pertanian Padi di Kabupaten Banyuwangi Tahun 1979-1998". Penelitian yang dilakukan oleh penulis masih jauh dari kata sempurna baik dari segi penulisan maupun pembahasan, maka diharapkan bagi peneliti-peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini dengan lebih baik. Serta dapat mengembangkan penelitian ini kearah pertanian berkelanjutan (*sustainability agriculture*) dan pertanian organik. Penulis berharap kajian mengenai kesejarahan terus berkembang seiring dengan berjalannya waktu.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Abdurrahman, Dudung. *Metode Penelitian Sejarah*. Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1999

Bernstein, Henry dan Dianto Bachriadi. *Tantangan Kedaulatan Pangan*. Bandung: ARCBooks, 2014

Daliman, A. *Metode Penelitian Sejarah*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012

Dawam, Rahardjo. *Transformasi Pertanian, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja*. Jakarta: UI-Press, 1984

Herlina, Nina. *Metode Sejarah*. Bandung: Satya Historika, 2020

Kuntowijoyo. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Penerbit Tiara Wacana, 2013

Martono, Nanang. *Sosiologi Perubahan Sosial Perspektif Klasik Modern, Posmodern dan Poskolonial*. Depok: Rajawali Pers, 2018

Sajogyo. Sosiologi Pedesaan. Yogyakarta: UGM Press, 1995

Setiawan, Bonnie. *Globalisasi Pertanian*. Institute for Global Justice, 2003

Soemardjan, Selo. *Perubahan Sosial di Yogyakarta*. Jakarta: Komunitas Bambu, 2009

Sulasman. *Metodologi Penelitian Sejarah*. Bandung: Pustaka Setia, 2014

Merevolusi Revolusi Hijau. Bogor: IPB Press, 2012

Wasino dan Endah Sri Hartatik. *Metode Penelitian Sejarah dari Riset hingga Penulisan*. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2018

Zid, Muhammad dan Ahmad Tarmiji Alkhudri. *Sosiologi Pedesaan*. Depok: Rajawali Pers, 2022

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH. HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

2. Skripsi dan Tesis

Hidayat, Rahmi Aulia. "Analisis Perubahan Sistem Pengelolaan Sawah Dusun Sindang, Desa Rancakalong Kabupaten Sumedang". *Tesis*, Universitas Padjadjaran Bandung, 2020

Putra, Akbar Kurnia. "Tinjauan Yuridis *Agreement on Agriculture* dalam WTO terhadap Kebijakan Ketahanan Pangan Indonesia". *Tesis*, Universitas Indonesia, 2012

Kadarisno. "Keberlanjutan Usaha Tani Padi Sawah di Kampung Kuta Desa Karangpaningal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis" *Tesis*, Universitas Padjadjaran Bandung. 2019

Lulu, Liani. "Rubrik Moerangkalih dalam Surat Kabar Sipatahoenan Sebagai Sarana Edukasi pada Tahun 1935." *Skripsi*, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020

Meiningrum, Dahlia. "Nasib Petani dalam hal Kebijakan Ketahanan Pangan dari Orde Baru dan Reformasi Studi Kasus: Petani Desa Suruh Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang." *Skripsi*, Universitas Indonesia, 2011

Mufti, Hikmah Rafika. "Kebijakan Pangan Pemerintah Orde Baru dan Nasib Kaum Petani Produsen Beras Tahun 1969-1988." *Skripsi*, Universitas Indonesia, 2009

Nurin, Hajarani Sabrina. "REPELITA dalam Bidang Pertanian di Pacitan Tahun 1994-1998." *Skripsi*, STKIP PGRI Pacitan, 2020

Widyanto, Aloysius Bram. "Masa Akhir Kepemimpinan Sukarnoo 1965-1968." *Skripsi*, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, 2010

Yolanda, Prita. Latar Belakang Pembubaran CGI (*Consultative Group on Indonesia*) Oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. *Skripsi* Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 2007

3. Jurnal dan Artikel Ilmiah

Abisono, Fatih Gama. "Dinamika Kebijakan Pangan Orde Baru: Otonomi Negara Vs Pasar Global." ISSN 141-4946. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik* Vol 5 No 3. 2002.

Alya, Desi Dkk. "Krisis Ekonomi dan Kondisi Masyarakat Tahun 1965-1966." *Jurnal Sindoro Cendikia Pendidikan* ISSN: 3025-6488 Vol.5 No.3 Tahun 2024

Andayani, Rezki, Fatmawati Fatmawati, and Nursini Nursini. "Peran Buruh Tani Perempuan Dalam Ekonomi Keluarga: Studi Kasus Desa Majannang." *Development Policy and Management Review (DPMR)* 2, no. 1 (2022): 66–84. https://doi.org/10.61731/dpmr.vi.20916.

Anisa, Nova dan Siti Tiara Maulia. "Peran Pemerintah Orde Baru dalam Pembangunana Nasional." *Jurnal Causa* ISSN 3031-0369 Vol. 4 No. 7 Tahun 2024

Ashari. "Optimalisasi Kebijakan Kredit Program Sektor Petanian Di Indonesia (Policy Optimization of Credit Program for Agricultural Sector in Indonesia)." *Analisis Kebijakan Pertanian* 7, no. 1 (2009): 21–42. https://doi.org/10.21082/akp.v7n1.2009.21-42

Astuti, Wahyuni Apri. "Hubungan Kerja Petani-Buruh Tani Di Pedesaan Dan Faktor Yang Mempengaruhinya." *Forum Geografi* 7, no. 1 (2016): 64. https://doi.org/10.23917/forgeo.v7i1.4798.

Azisi, Ali Mursyid, and M. Yusuf. "Konversi Agama Dari Hindu Ke Islam Pada Masyarakat Banyuwangi: Analisis Sejarah Kritis." *Tamaddun: Jurnal Kebudayaan Dan Sastra Islam* 21, no. 1 (2021): 59–74. https://doi.org/10.19109/tamaddun.v21i1.8615.

Azahra, Jihan Nasywa dkk. *Revolusi Hijau Masa Orde Baru*. Jurnal Sindoro Cendikia Pendidikan Vol. 5 No. 3 Tahun 2024 https://doi.org/10.9644/sindoro.v5i3.3999

Borlaug, Norman E. "The Green Revolution Revisited and The Road Ahead," Special 30 Anniversary Lecture, The Norwegian Noble Institute, Oslo, September 8, 2000.

Borlaug, Norman E. "Wheat Breading and its Impact on World Food Supply," Third International Wheat Genetic Symposium, Australian Academy of Science, Canberra, August 5-9, 1968.

Dahuri, Rohimin. Pembangunan "Pertanian Berkelanjutan: dalam Perspektif

Ekonomi, Sosial dan Ekologi." *Agrimedia* Vol 4 No 1, http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/29161. 1998

Davies, W. Paul. "An Historical Perspective from the Green Revolution to the Gene Revolution." *Nutrition Reviews* 61, no. 6 II (2003). https://doi.org/10.1301/nr.2003.jun.s124-s134.

Dinar, Latifa dkk. "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Impor Beras di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertania*n, E-ISSN: 2614-6053 Vol 8 No 3, 2023

Dwi Ramadhani, Wahyu. "Mengatasi Masalah Dengan Transformasi Teknologi Di Sektor Pertanian Untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional Yang Berkelanjutan." *Journal of Economics Development Issues* 6, no. 2 (2023): 87–94. https://doi.org/10.33005/jedi.v6i2.143.Andayani, Rezki, Fatmawati Fatmawati, and Nursini Nursini. "Peran Buruh Tani Perempuan Dalam Ekonomi Keluarga: Studi Kasus Desa Majannang." *Development Policy and Management Review (DPMR)* 2, no. 1 (2022): 66–84. https://doi.org/10.61731/dpmr.vi.20916.

Dwi Ramadhani, Wahyu. "Mengatasi Masalah Dengan Transformasi Teknologi Di Sektor Pertanian Untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional Yang Berkelanjutan." *Journal of Economics Development Issues* 6, no. 2 (2023): 87–94. https://doi.org/10.33005/jedi.v6i2.143.

Eliazer Nelson, Ann Raeboline Lincy, Kavitha Ravichandran, and Usha Antony. "The Impact of the Green Revolution on Indigenous Crops of India." *Journal of Ethnic Foods* 6, no. 1 (2019): 1–10. https://doi.org/10.1186/s42779-019-0011-9.

Gultom, Ferdi, and Sugeng Harianto. "Revolusi Hijau Merubah Sosial-Ekonomi Masyarakat Petani." *TEMALI : Jurnal Pembangunan Sosial* 4, no. 2 (2021): 145–54. https://doi.org/10.15575/jt.v4i2.12579.

Mahmudah, Mahmudah, and Muhammad Ali Mansyur. "Komunikasi Antar Budaya Masyarakat Jawa Dan Madura." *JKaKa:Jurnal Komunikasi Dan Konseling Islam* 1, no. 1 (2021): 1. https://doi.org/10.30739/jkaka.v1i1.805.

Maria, Nur. "GERAKAN SOSIAL POLITIK DI BLAMBANGAN TAHUN 1767-1768." *Patanjala : Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya* 9, no. 3 (November 27, 2017): 407. https://doi.org/10.30959/patanjala.v9i3.26.

Matali, Matali. "CULTUURSTELSEL DI UJUNG TIMUR PULAU JAWA: STUDI KASUS PENERAPAN TANAM PAKSA DI BANYUWANGI." *Jurnal Sangkala* 4, no. 1 (April 25, 2025): 41–50. https://doi.org/10.62734/js.v4i1.584.

Meilany Tulong, Oleh, Mahyudin Damis, and Jenny Nelly Matheosz. "Kehidupan Sosial Ekonomi Petani Padi Di Tumani Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan." *Journal of Social and Culture*. 17, no. 1 (2024): 1–17.

Moento, Paul Adryani, Rangga Kusumah, Apolus Betaubun, and Hubertus Oja. "Penguatan Kelompok Usaha Tani Berbasiskan Pemberdayaan

Masyarakat Petani Padi." *Societas : Jurnal Ilmu Administrasi Dan Sosial* 9, no. 1 (2020): 25–34. https://doi.org/10.35724/sjias.v9i1.2782.

Mustafa, Hanif Risa. "Pergolakan Agraria 1965-1966 Di Banyuwangi." *Heritage* 1, no. 1 (2020): 61–72. https://doi.org/10.35719/hrtg.v1i1.5.

Nurvianto and Agus Trilaksana. "Intensifikasi Pertanian Tanaman Padi Dalam Rangka Swasembada Beras Provinsi Jawa Timur Tahun 1969 – 1984." *AVATARA E-Journal Pendidikan Sejarah* 2, no. 3 (2014): 598–608.

Raharjo, Bahagio. "Dinamika Kesenian Gandrung Di Banyuwangi 1950-2013." *Humanis* 15, no. 2 (2016): 7–14.

Rahmawati, Rizki. "Repelita : Sejarah Pembangunan Nasional Di Era Orde Baru." *ETNOHISTORI: Jurnal Ilmiah Kebudayaan Dan Kesejarahan* IX, no. 2 (2022): 36–42.

Rinardi, Haryono, Noor Naelil Masruroh, Nazala Noor Maulany, and Yety Rochwulaningsih. "Dampak Revolusi Hijau Dan Modernisasi Teknologi Pertanian: Studi Kasus Pada Budi Daya Pertanian Bawang Merah Di Kabupaten Brebes." *Jurnal Sejarah Citra Lekha* 4, no. 2 (2019): 125–36. https://doi.org/10.14710/jscl.v4i2.21936.

Sadono, Dwi. "Pemberdayaan Petani: Paradigma Baru Penyuluhan Pertanian Di Indonesia." *Jurnal Penyuluhan* 4, no. 1 (2008). https://doi.org/10.25015/penyuluhan.v4i1.2170.

Styawan, Aris Agus. "Pengaruh Revolusi Hijau Terhadap Perubahan Sosial Ekonomi Petani Kabupaten Karanganyar Tahun 1969-1998." *Jurnal Kalpataru* Vol.8 No. 1. 2022

Suparmin. "Tingkat Stabilitas dan Fluktuasi Harga Gabah dan Beras di Indonesia.". *Jurnal Agrimansion* Vol 7 No 1. (2006). DOI: https://doi.org/10.29303/agrimansion.v7i1.135

Yulia, Desma. "Revolusi Hijau Kebijakan Ekonomi Pemerintah Bidang Pertanian Di Kanagarian Selayo Tahun 1974-1998." *HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah* 4, no. 2 (2019): 78–89. https://doi.org/10.33373/hstr.v4i2.1931.

4. Website

"Inpres Nomor 3 Tahun 1986" BPK RI. Diakses pada 10 Mei 2025. https://peraturan.bpk.go.id/Details/315399/inpres-no-3-tahun-1986

"Kabupaten Banyuwangi" BPK Jawa Timur. Diakses pada 7 Mei 2025 https://jatim.bpk.go.id/kabupaten-banyuwangi/

"Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1983" BPK RI. Diakses pada 9 Mei 2025. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/65606/keppres-no-62-tahun-1983

"Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1997 tentang Badan Pengendali Bimbingan Massal" BPK RI. Diakses pada 25 April 2025 https://peraturan.bpk.go.id/Details/59618/keppres-no-40-tahun-1997

"Keputusan Presiden No 95 Tahun 1969." BPK RI. Diakses pada 25 April 2025 https://peraturan.bpk.go.id/Details/105484/keppres-no-95-tahun-1969

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

"Mengampu Ekonomi Masyarakat" Media Keuangan Kemenkeu. Diakses pada 25 April 2025https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/mengampu-ekonomi-masyarakat-desa

"Norman E. Borlaug Ph.D Biography" Academy of Achievement. Diakses pada 25 Juni, 2025, https://achievement.org/achiever/norman-e-borlaug/

"Perwujudan Panca Usaha Pertanian." BIMAS. diakses pada 25 April 2025 https://pengabdian.ugm.ac.id/2020/03/27/BIMAS/

"Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996" BPK RI. diakses pada 4 Desember 2024 https://peraturan.bpk.go.id/Details/46097/uu-no-7-tahun-1996

"Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960" BPK RI. Diakses pada 7 Mei 2025 https://peraturan.bpk.go.id/Details/51310/uu-no-5-tahun-1960,

Briney, Amanda. "History and Overview of the Green Revolution." https://www.thoughtco.com/green-revolution-overview-1434948

Dewa Agung Gede Agung dan Aris Poniman. Sistem Subak. "Panca Usaha Tani dan Perkembangan Pertanian di Kabupaten Bangli" https://lib.ui.ac.id/detail?id=75141&lokasi=lokal. 1999

Ivan, Kurniawan. "Presiden Soeharto dan Swasembada Pangan Museum Kepresidenan." https://museumkepresidenan.id/artikel/swasembada-pangan/

Nugroho, Agung. "Pengamat UGM: Hari Buruh, Jangan Lupakan Nasib para Buruh Tani" 2024, https://ugm.ac.id/id/berita/pengamat-ugm-hari-buruh-jangan-lupakan-nasib-para-buruh-tani/,

Rosset, Peter. "Lessons from the Green Revolutin." https://towardfreedom.org/wp-content/uploads/2015/08/greenrevolution.pdf,

Siti Nur Aeni dan Sakina Rakhma Diah Setiawan, "Jangan Asal Ini Cara Tepat Memupuk Tanaman Padi" https://agri.kompas.com/read/2022/09/25/180226684/jangan-asal-ini-cara-tepat-memupuk-tanaman-padi?page=all,

.

5. Arsip

Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia didepan Sidang DPR-GR 16 Agustus 1970 tentang Pelaksanaan Tahun Pertama REPELITA (1 April 1969 s/d 31 Maret 1970)

Rencana Pembangunan Lima Tahun Keempat 1979/80-1983/84 Lampiran Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1979 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Ketiga (REPELITA III)

BPS Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi dalam Angka Tahun 1990

Badan Pusat Statistik. *Produksi Padi di Jawa Timur 1971-1985*

Badan Pusat Statistik. Statistika Indonesia 1980-1981. Jakarta: BPS. 1982

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BPS Kabupaten Banyuwangi. Kabupaten Banyuwangi dalam Angka Tahun 1984

Jawa Pos. Team Penerangan Bimas ke Kecamatan2. 13 Juni 1978. hlm 6

Jawa Pos. Raker Tehnis Penerangan Bimas se Kabupaten. 1 Juni 1978. hlm 6

Jawa Pos. Banyuwangi Diharapkan Tanam Padi Jenis IR 36. 9 Januari 1978. hlm 8

Suara Karya. Gotong royong kunci sukses Kelompok Insus "Karya Tani" Banyuwangi. 16 Agustus 1980. hlm 5

Suara Karya. Produksi Padi Kab Banyuwangi Meningkat. 21 April 1980. hlm 5

Berita Yudha. Banyuwangi Tetap Penghasil Beras terbesar. 15 Januari 1982. hlm 4

Berita Yudha. Kabupaten Banyuwangi Penghasil Beras Terbesar di Indonesia. 19 Januari 1982. Hlm 8

Berita Yudha. Subang Tergolong Daerah Berat Dalam Masalah Bimas. 12 Nopember 1983. Hlm 7

Berita Yudha. Derap Pembangunan di Jabar 19 Maret 1981. hlm 5

Berita Yudha. 200 Hektar Padi di Kabupaten Banyuwangi Mendapat Serangan Hama Tungro. 5 Februari 1982. Hlm 4

Berita Yudha. Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani Banyuwangi. 23 Februari 1982. hlm 8

Bali Pos. Dolog Banyuwangi Tingkatan Kualitas Beras yang ditampung. 17 Maret 1993. hlm 5

Bali Pos. Jatim Berikan Pinjaman 12.000 Ton Beras ke Zansibar. 15 Mei 1993. hlm 8

Bali Post. Tunggakan Kredit Bimas di Bali Rp 973 Juta Lebih. 10 November 1994. Hlm 7

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 1997
TENTANG
BADAN PENGENDALI BIMBINGAN MASSAL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa seiring dengan perubahan pendekatan dan kebijaksanaan pembangunan pertanian, kebijaksanaan otonomi daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II, serta dalam rangka pencapaian swasembada pangan menuju ketahanan pangan nasional, dipandang perlu menata kembali susunan organisasi Badan Pengendali Bimbingan Massal dengan Keputusan Presiden;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3135);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);

5. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen, sebagaimana telah duapuluh sembilan kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 76 Tahun 1997;

MEMUTUSKAN :...

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Gambar lampiran 1, Keppres Nomor 40 Tahun 1997
(Sumber: website BPK RI)

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 1996
TENTANG PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a. bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya menjadi hak asasi setiap rakyat Indonesia dalam mewujudkan sumber daya manusia berkualitas untuk melaksanakan pembangunan nasional;

b. bahwa pangan yang aman, bermutu, bergizi, beragam, dan tersedia secara cukup merupakan persyaratan utama yang harus dipenuhi dalam upaya terselenggaranya suatu sistem pangan yang memberikan perlindungan bagi kepentingan kesehatan serta makin berperan dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat;

c. bahwa pangan sebagai komoditas dagang memerlukan dukungan sistem perdagangan pangan yang jujur dan bertanggung jawab sehingga tersedia pangan yang terjangkau oleh daya beli masyarakat serta turut berperan dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional;

d. bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada butir a, butir b, dan butir c, serta untuk mewujudkan sistem pengaturan, pembinaan, dan pengawasan yang efektif di bidang pangan, maka perlu dibentuk Undang-undang tentang Pangan;

Mengingat:
Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Gambar lampiran 2, UU No 7 Tahun 1996
(Sumber: Website BPK)

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 95 TAHUN 1969
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERDJA BIMAS

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk lebih mensukseskan pelaksanaan dari pada peningkatan produksi pertanian, chususnja Pangan dalam rangka Projek BIMAS, dipandang perlu meninjau kembali organisasi dan tata-kerdja BIMAS dalam hubungannja dengan tata-kerdja Sektor A Pertanian, guna disesuaikan dengan sasaran-sasaran projek Pembangunan Lima Tahun.

Mengingat : 1. Pasal 4 ajat (1) Undang-undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 183 tahun 1968;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 1969.

M E N E T A P K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERDJA BIMAS.

B A B I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1.

(1). Menteri Pertanian/Ketua Sektor A bertugas koordinasi [illegible] perentjanaan, [illegible] pengawasan dan penilaian atas pelaksanaan projek-projek BIMAS.

(2). Sektor A Pertanian, chususnja Sub Sektor Pangan mempunjai tugas pokok dan bertanggung djawab atas keberhasilan pelaksanaan peningkatan produksi pangan, sesuai dengan sasaran-sasaran jang telah ditetapkan dalam Rentjana Pembangunan Lima Tahun.

Gambar lampiran 3, Keppres No 9 Tahun 1969
(Sumber: Website BPK)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 62 TAHUN 1983
TENTANG
BADAN PENGENDALIAN BIMAS

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk lebih mensukseskan peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, perikanan serta peternakan, dipandang perlu untuk meningkatkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi antara beberapa bidang kegiatan, baik pada tingkat pemikiran, tingkat perencanaan maupun tingkat pelaksaan, dan tingkat pengawasannya;
b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu mencabut Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1979 dan menetapkan pembentukan Badan Pengendali Bimas.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
3. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1983;
4. Keputusan Presiden Nomor 45/M Tahun 1983 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan IV;
5. Keputusan Presiden Nomor 45/M Tahun 1983 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Menteri Muda serta Susunan Organisasi Staf Menteri Muda.

MEMUTUSKAN:

Dengan mencabut Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1979,

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG BADAN PENGENDALIAN BIMAS.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Keputusan Presiden ini yang di maksud dengan :
a. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang pertanian yang memegang koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kebijaksanaan, program dan pelaksanaan di bidang produksi pertanian yang bertindak selaku Ketua Badan Pengendalian Bimas;

b. Menteri Muda ...

Gambar lampiran 4, Keppres No 62 Tahun 1983
(Sumber: Website BPK)

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 1986
TENTANG
PENINGKATAN PENGENDALIAN HAMA WERENG COKLAT PADA TANAMAN PADI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melestarikan swasembada pangan terutama beras, masalah pengendalian hama wereng coklat pada tanaman padi adalah sangat penting.

b. bahwa pada dewasa ini terdapat perkembangan populasi hama wereng coklat di beberapa daerah yang dapat membahayakan usaha melestarikan swasembada pangan, terutama beras.

c. bahwa untuk mengendalikan hama wereng coklat sebagaimana dimaksud pada huruf b serta untuk lebih menjamin kesinambungan efektivitas, perlu segera menerapkan sistem pengendalian hama terpadu.

d. bahwa untuk melaksanakan sistem pengendalian hama terpadu tersebut, diperlukan langkah-langkah terkoordinasi antara berbagai instansi yang bersangkutan.

e. bahwa untuk mewujudkan koordinasi sebagaimana tersebut di atas, dipandang perlu mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Peningkatan Pengendalian Hama Wereng Coklat pada Tanaman Padi.

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : 1. Menteri Pertanian.
2. Menteri Dalam Negeri.
3. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas.
4. Menteri Penerangan.
5. Menteri Muda Urusan Peningkatan Produksi Pangan.

Untuk :

Pertama : Menyelenggarakan kerjasama dan koordinasi sebaik-baiknya untuk meningkatkan pengendalian hama wereng coklat pada tanaman padi dalam rangka melestarikan swasembada pangan, terutama beras.

Kedua : Dalam rangka kerjasama dan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama :

1. Menteri Pertanian melaksanakan pengendalian hama dan penyakit padi dengan menerapkan sistem pengendalian hama terpadu, mengatur penyediaan dan penyaluran benih padi dari varietas unggul tahan wereng, dan merencanakan kebutuhan dan mengatur penggunaan insektisida dengan memperhatikan dampak penggunaannya terutama terhadap kemungkinan terjadinya resurjensi dan resistensi.

2. Menteri Dalam Negeri memberi petunjuk dan pengarahan kepada Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I dan para Bupati/Kepala Daerah Tingkat II dalam mengkoordinasikan langkah-langkah yang diperlukan untuk peningkatan pengendalian hama dan penyakit padi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Gambar lampiran 5, Inpres No 3 Tahun 1986
(Sumber: Website BPK)

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 1960

TENTANG

PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa didalam Negara Republik Indonesia yang susunan kehidupan rakyatnya, termasuk perekonomiannya, terutama masih bercorak agraris, bumi, air dan ruang angkasa, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa mempunyai fungsi yang amat penting untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur;
b. bahwa hukum agraria yang masih berlaku sekarang ini sebagian tersusun berdasarkan tujuan dan sendi-sendi dari pemerintahan jajahan dan sebagian dipengaruhi olehnya, hingga bertentangan dengan kepentingan rakyat dan Negara didalam menyelesaikan revolusi nasional sekarang ini serta pembangunan semesta;
c. bahwa hukum agraria tersebut mempunyai sifat dualisme, dengan berlakunya hukum adat disamping hukum agraria yang didasarkan atas hukum barat;
d. bahwa bagi rakyat asli hukum agraria penjajahan itu tidak menjamin kepastian hukum;

Berpendapat :

a. bahwa berhubung dengan apa yang tersebut dalam pertimbangan-pertimbangan diatas perlu adanya hukum agraria nasional, yang berdasar atas hukum adat tentang tanah, yang sederhana dan menjamin kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan tidak mengabaikan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama;
b. bahwa hukum agraria nasional harus memberi kemungkinan akan tercapainya,fungsi bumi, air dan ruang angkasa, sebagai yang dimaksud diatas dan harus sesuai dengan kepentingan rakyat Indonesia, serta memenuhi pula keperluannya menurut permintaan zaman dalam segala soal agraria;
c. bahwa hukum agraria nasional itu harus mewujudkan penjelmaan dari pada Ketuhanan Yang Maha Esa, Perikemanusiaan, Kebangsaan, Kerakyatan dan Keadilan Sosial, sebagai azas kerokhanian Negara dan cita-cita bangsa, seperti yang tercantum didalam Pembukaan Undang-undang Dasar.
d. bahwa hukum agraria tersebut harus pula merupakan pelaksanaan dari pada Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, ketentuan dalam pasal 33 Undang-undang Dasar dan Manifesto Politik Republik Indonesia, sebagai yang ditegaskan dalam pidato Presiden tanggal 17 Agustus 1960, yang mewajibkan Negara untuk mengatur pemilikan tanah dan memimpin penggunaannya, hingga semua tanah diseluruh wilayah kedaulatan bangsa dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, baik secara perseorangan maupun secara gotong-royong;
e. bahwa berhubung dengan segala sesuatu itu perlu diletakkan sendi-sendi dan disusun ketentuan-ketentuan pokok baru dalam bentuk Undang-undang yang akan merupakan dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional tersebut diatas;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Gambar lampiran 6, UU No 5 Tahun 1960
(Sumber: Website BPK)

SABTU, 16 AGUSTUS 1980

Gotong royong, kunci sukses Kelompok Insus "Karya Tani" Banyuwangi

LAPORAN SUYONO M

Gambar lampiran 7, Kelompok Tani Gambiran menang lomba INSUS nasional
(Sumber: Koran Suara Karya, 16 Agustus 1980)

BERITA YUDHA – KAMIS, 19 MARET 1981

HALAMAN V

Mengintip

Derap Pembangunan di Jabar

Laporan: Iman Handiman

KONSULTASI KB: Asuhan Team Dokter BKKBN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Gambar lampiran 8, Keadaan Jabar saat Revolusi Hijau
(Sumber: Koran Berita Yudha, 19 Maret 1981)

Banyuwangi Tetap Penghasil Beras Terbesar

Banyuwangi, Januari (BY).

Produksi beras terbesar di seluruh Kabupaten se-Indonesia menurut Gubernur tetap di tangan Kab. Banyuwangi. Tercatat 21 persen produksi beras di Indonesia dari Jatim, dan Kab. Banyuwangi merupakan penghasil terbesar. Gubernur Soenandar Prijosoedarmo menegaskan hal ini baru2 ini ketika meresmikan proyek pompa air di Kec. Wongsorejo, Banyuwangi. Keberhasilan pertanian di Jatim mengandung konsekuensi berat, pemerintah Pusat tetap menugaskan Jatim untuk meningkatkan produksi bersanya, katanya.

Juga produksi palawija ditugaskan meningkatkan, 40 persen produksi palawija di Indonesia berasal dari Jatim. Juga pabrik gula yang di Indonesia jumlah 54 buah, di Jatim saja 33 buah, produksi gulanya harus ditingkatkan di samping yang lain seperti tembakau, kapas dll. ''Padahal jumlah areal tanah yang ditanami itu-itu juga,'' katanya.

Oleh karenanya dengan peresmian pompa air untuk lahan kering ini Gubernur menilai sangat menolong usaha-usaha yang dibebankan kepada Jatim tadi. Abdul Kamar kepada Gubernur melapor, tanahnya seluas 2 ha dulu hanya ditanami jagung dan kacang hijau. Hasil jagung dulu Rp 180 ribu setahun, kacang hijau Rp 240 ribu per ha setahun. Sekarang diharapkan hasilnya berlipat, disewa untuk tanaman tebu saja dalam dua kali musim Rp 760, ribu.

Bupati Banyuwangi Susilo Suharto, SH menyatakan, di Banyuwangi ini untuk mengairi lahan kering sudah dibangun 14 pompa yang dapat mengairi pompa yang dapat mengairi sawah seluas 960 hektar. Dengan sistem pompa di Wongsorejo ini lahan kering yang akan dialiri seluas 1.300 hektar.

Tahap pertama ini memompa air dari Muara Andalan II untuk mengairi tanaman tebu musim tanam 81-82 seluas 470 hektar. Tahap selanjut memasang 8 pompa dengan debit 800 liter per detik, memompa air buangan dari Bajulmati untuk mengairi tanah tebu musim tanam 82-83 seluas 830 hektar.

Ir. Darsono Ariadi, Administratur PG Asembagoes melapor, usaha ini sejalan dengan program pemerintah peningkatan produksi gula dipercepat. Pabrik menempuh salah satu cara memanfaatkan lahan kering yang di Wongsorejo ini terdapat cukup luas. Dijelaskan, biaya membangun pompa ini cukup besar dan uangnya asal dari Pemerintah. Karena pengembaliannya harus ditanggung oleh pabrik, maka diadakan kerjasama saling menguntungkan antara Pabrik dengan rakyat pemilik lahan. Kerja sama berbentuk, dua tahun pertama setelah pabrik untuk ditanami tebu dengan sistem sewa. Setelah tahun-tahun berikutnya barulah petani sendiri yang mengusahakan lahan itu menanam tebu dengan sistem Trit. Manfaatnya: Pabrik mendapat tambahan lahan untuk perluasan tanaman tebu sebagai penunjang program Pemerintah menambah produksi gula.

Petani juga untuk, tanah yang selama ini kurang berproduksi semakin meningkat produksinya, sehingga dapat menanam tebu dan tanaman pangan secara terpadu. Juga masyarakat sekitarnya dapat menikmati air bersih serta membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitarnya. Pompa air yang akan dipasang di wilayah Kec. Wongsorejo, utara Kab. Banyuwangi ini jumlahnya 4 buah di empat lokasi lahan kering. Untuk tahap pertama tahun 81-82 ini meliputi luas 470 hektar sedang tahap kedua direncanakan sudah selesai semuanya dan mampu mengairi tanah seluas 1.300 hektar. Harga sebuah pompa Rp 150 juta. (R-60)

Gambar lampiran 9, Banyuwangi menjadi penghasil beras terbesar
(Sumber: Koran Berita Yudha, 15 Januari 1982)

Dolog Banyuwangi Tingkatkan Kualitas Beras yang Ditampung

Banyuwangi (Bali Post) -

Sub-Dolog Wilayah IX Banyuwangi kini mulai meningkatkan kualitas beras yang ditampung. Mutu dari tiga jenis beras yang akan diterima oleh Dolog akan semakin ditingkatkan. Untuk beras medium yang dulunya harus memiliki drajat sosoh 90 persen, kini harus 95 persen. Begitu juga untuk beras super 15 persen dan super 5 persen harus memiliki drajat sosoh 100 persen.

"Peningkatan mutu beras ini juga akan diikuti dengan kenaikan harga tentunya. Apabila para petani bisa meningkatkan kualitasnya, secara tidak langsung mereka juga akan mendapatkan nilai tambah," tutur Kepala Sub-Dolog Wilayah IX Banyuwangi Mochammad Ramelan di ruang kerjanya, Selasa.

Harga beras yang telah disepakati oleh pihak Dolog sampai saat ini, untuk jenis beras medium Rp 551, jenis super 15 persen Rp 580 dan untuk jenis super 5 persen Rp 610. Semua pengadaan beras di Dolog Banyuwangi itu, menurut Ramelan melalui KUD-KUD yang ada di Banyuwangi. "Jumlah KUD di Banyuwangi sebanyak 87, 33 diantaranya KUD Mina. Dari 54 sisanya, yang sudah bekerja sama kontrak dengan kami baru 26 KUD," tuturnya.

Rencana jumlah pengadaan beras untuk tahun ini, ada tiga alternatif yang akan disesuaikan dengan situasi panen. "Kalau panen kurang baik, kami rencanakan jumlah pengadaan beras di Banyuwangi sampai 25 ribu ton. Bila panen normal bisa mencapai 30 ribu ton. Dan kalau panen baik, kami yakin mampu menampung sampai 40 ribu ton," katanya.

Gabah

Sampai saat ini, pengadaan beras yang sudah terealisasi di gudang Sub-Dolog Banyuwangi mencapai 995 ton. "Jumlah itu terhitung pengadaan sampai Senin kemarin. Yang 525 ton jenis medium, sedangkan sisanya jenis super," katanya.

Jumlah pengadaan yang 995 ton itu merupakan hasil masukan dari 10 KUD di antara 26 KUD yang telah bekerja sama dengan pihak Sub Dolog Banyuwangi. "Kemungkinan dalam minggu-minggu ini akan banyak beras masuk," tandasnya.

Menanggapi pertanyaan mengenai operasi pasar, Ramelan menjelaskan, pihak Sub-Dolog Banyuwangi sampai saat ini masih belum melaksanakan operasi pasar. Hal ini disebabkan harga beras masih dianggap relatif stabil. "Kita hanya akan menyedot dari pasar untuk ikut berusaha menaikkan harga, agar petani tidak terlalu dirugikan," ujarnya.

Menurut Ramelan, sampai saat ini harga gabah kering di Banyuwangi masih dianggap stabil. Khususnya harga gabah kering panen masih di atas harga dasar. "Harga gabah kering panen Rp 245 sedangkan yang berlaku sekarang antara Rp 255 sampai Rp 260. Harga gabah kering simpan Rp 290, dan gabah kering giling Rp 340," tuturnya.

Pembelian harga gabah kering ini, akan diusahakan untuk tidak di bawah harga dasar, sebab hal itu akan merugikan petani. (oye).

ditingkatkan, terutama meningkatkan kualitas dan dedikasi. Hal tersebut merupakan faktor utama, karena mustahil NTT dengan alam yang keras dan prasarana fisik terbatas bisa dibangun oleh mereka yang bekerja tanpa motivasi dan dedikasi yang tinggi.

Dalam sambutan pengarahan, pada pembukaan Rapat Kerja Kesehatan Daerah (Rakerkesda) di Kupang, Selasa kemarin, Gubernur NTT, dr. Hendrikus Fernandez menegaskan, semua masyarakat NTT terutama angkatan kerja dapat secara aktif terlibat dalam berbagai bidang pembangunan dengan produktivitas yang tinggi. Karena itu, selain kuantitas dan kualitas, tenaga kesehatan di wilayah NTT dalam Repelita VI perlu juga di-

Asviiik ! BELI SATU DAP

Gambar lampiran 10, Dolog Banyuwangi meningkatkan kualitas Beras yang ditampung
(Sumber: Koran Bali Post, 17 Maret 1993)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

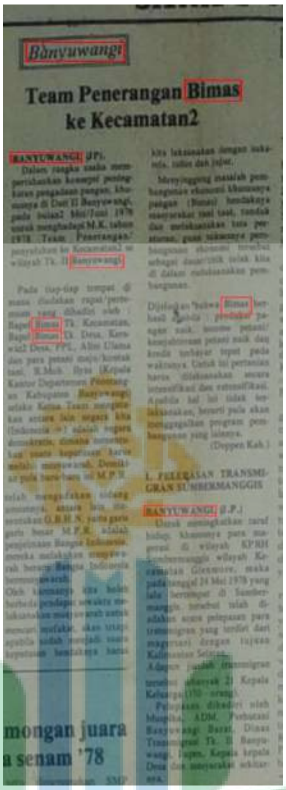

Banyuwangi

Team Penerangan Bimas ke Kecamatan2

BANYUWANGI (JP).

(Deppen Kab.)

I. PELEPASAN TRANSMIGRAN SUMBERMANGGIS

BANYUWANGI (J.P.)

mongan juara
a senam '78

Gambar lampiran 11, Team Bimas ke Kecamatan di Banyuwangi
(Sumber: Koran Jawa Pos, 13 Juni 1978)

Kamis Pon, 10 November 1994

Tunggakan Kredit Bimas di Bali Rp 973 Juta Lebih

Denpasar (Bali Post) -

Tunggakan kredit Bimas di Bali akhir tahun 1993 mencapai Rp 973.726.000. Jumlah tersebut menurun 10 persen jika dibandingkan 31 Desember 1990 sebesar Rp 1.075.967.000. Tunggakan terbanyak di Kabupaten Jembrana dan Tabanan.

"Tunggakan tersebut tetap akan ditagih pemerintah. Yang namanya utang, harus dibayar dong," kata Kakanwil Pertanian Bali Drh. Nyoman Saba, kepada *Bali Post*, Rabu (9/11) kemarin, seusai melantik Ir. I Wayan Sudika sebagai Sekretaris Pembina Harian Bimas Bali menggantikan Drs. Made Arnawa yang mendapat tugas baru sebagai Widyaswara pada Diklat Pertanian Bali. Sebelumnya Sudika bertugas sebagai Sekretaris Harian Pembina Bimas Jembrana.

Dikatakan, pemerintah tidak akan memutihkan kredit Bimas yang telah diterima petani, meski tunggakan tersebut kecil jika dibandingkan kredit macet yang diterima Edy Tansil. "Pemutihan kredit Bimas memang ada, tetapi itu harus melalui keputusan presiden," ujarnya.

Macetnya kredit Bimas tersebut, kata dia, disebabkan banyak faktor, seperti serangan hama, bencana alam, dll. Untuk membantu petani di wilayah yang terkena serangan hama maupun bencana alam tersebut, pemerintah memberikan keringanan penangguhan pembayaran kredit. Tetapi kalau sudah panen, kredit yang diterima tersebut harus dibayar kembali.

Ketika ditanyakan kemungkinan untuk menagih tunggakan kredit Bimas tersebut menggunakan jasa 'debt colector', Sekretaris Pembina Harian Bimas Bali I Wayan Sudika menambahkan, tidak perlu. Menurut dia, mekanisme penagihan tunggakan kredit tersebut sudah ada. Untuk bisa mengurangi tunggakan tersebut, petani juga harus memiliki tanggung jawab untuk mengembalikan uang yang dipinjamnya.

Menurut Sudika, tunggakan kredit Bimas di Bali termasuk kecil jika dibandingkan dengan tunggakan yang sama di daerah lainnya di Indonesia. "Kita akan terus upayakan penagihannya sehingga tunggakan tersebut dapat diperkecil," paparnya.

Sementara itu, tahun 1993/94 plafon kredit Bimas ditargetkan Rp 200.000.000 dengan luas areal 400 hektar. Realisasinya hingga Maret 1994 sebesar Rp 135.308.000.

Kecil Rangsangan Petani

Soal kesiapan petani menghadapi pasar global pasca GATT, Nyoman Saba mengakui kualitas sumber daya manusia di sektor petanian masih rendah. Hal tersebut terjadi karena kecilnya rangsangan insentif yang diterima petani. Jika masalah ini tidak segera diperbaiki dikhawatirkan produk-produk pertanian akan sulit bersaing di pasar.

Melihat kenyataan tersebut, kata Saba, Kanwil Pertanian Bali telah menyiapkan program agribisnis untuk mengantisipasi perdagangan bebas. Selain itu, juga telah dilaksanakan berbagai pelatihan, temu usaha, dll yang sasarannya untuk meningkatkan produktivitas kerja petani.

"Kalau produktivitas kerjanya sudah baik, saya yakin kualitas produknya juga akan baik sehingga kompetitif menghadapi pesaing sejenis di pasar internasional," ujarnya.

Menurut dia, peluang untuk berusaha pada bidang agribisnis masih terbuka lebar. Hal ini dapat dilihat dari usaha petani ternak di Bali yang setiap bulan mendatangkan jagung sekitar 1.000 ton dari Jawa. **(027)**

Gambar lampiran 12, Tunggakan Kredit Bimas di Bali Rp 973 Juta Lebih
(Sumber: Bali Post, 10 November 1994, hlm 7)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

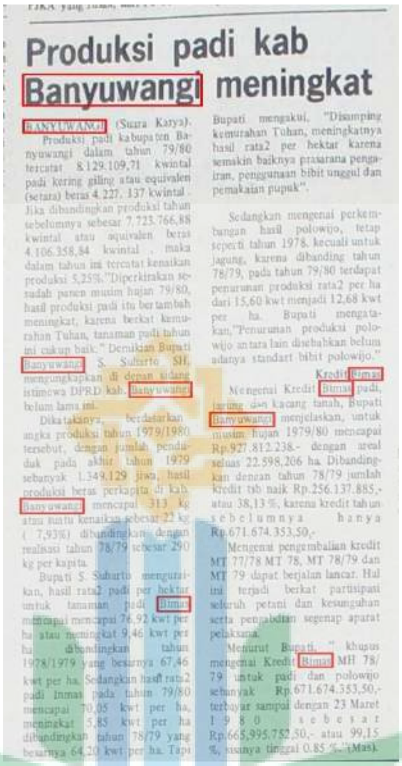

Produksi padi kab Banyuwangi meningkat

BANYUWANGI (Suara Karya). Produksi padi kabupaten Banyuwangi dalam tahun 79/80 tercatat 8.129.109,71 kwintal padi kering giling atau equivalen (setara) beras 4.227. 137 kwintal. Jika dibandingkan produksi tahun sebelumnya sebesar 7.723.766,88 kwintal atau aquivalen beras 4.106.358,84 kwintal, maka dalam tahun ini tercatat kenaikan produksi 5,25%."Diperkirakan sesudah panen musim hujan 79/80, hasil produksi padi itu bertambah meningkat, karena berkat kemurahan Tuhan, tanaman padi tahun ini cukup baik." Demikian Bupati Banyuwangi S. Suharto SH, mengungkapkan di depan sidang istimewa DPRD kab. Banyuwangi belum lama ini.

Dikatakannya, berdasarkan angka produksi tahun 1979/1980 tersebut, dengan jumlah penduduk pada akhir tahun 1979 sebanyak 1.349.129 jiwa, hasil produksi beras perkapita di kab. Banyuwangi mencapai 313 kg atau suatu kenaikan sebesar 22 kg (7,93%) dibandingkan dengan realisasi tahun 78/79 sebesar 290 kg per kapita.

Bupati S. Suharto menguraikan, hasil rata2 padi per hektar untuk tanaman padi Bimas mencapai mencapai 76,92 kwt per ha atau meningkat 9,46 kwt per ha dibandingkan tahun 1978/1979 yang besarnya 67,46 kwt per ha. Sedangkan hasil rata2 padi Inmas pada tahun 79/80 mencapai 70,05 kwt per ha, meningkat 5,85 kwt per ha dibandingkan tahun 78/79 yang besarnya 64,20 kwt per ha. Tapi Bupati mengakui, "Disamping kemurahan Tuhan, meningkatnya hasil rata2 per hektar karena semakin baiknya prasarana pengairan, penggunaan bibit unggul dan pemakaian pupuk".

Sedangkan mengenai perkembangan hasil polowijo, tetap seperti tahun 1978, kecuali untuk jagung, karena dibanding tahun 78/79, pada tahun 79/80 terdapat penurunan produksi rata2 per ha dari 15,60 kwt menjadi 12,68 kwt per ha. Bupati mengatakan,"Penurunan produksi polowijo antara lain disebabkan belum adanya standart bibit polowijo."

Kredit Bimas

Mengenai Kredit Bimas padi, jagung dan kacang tanah, Bupati Banyuwangi menjelaskan, untuk musim hujan 1979/80 mencapai Rp.927.812.238.- dengan areal seluas 22.598,206 ha. Dibandingkan dengan tahun 78/79 jumlah kredit tsb naik Rp.256.137.885,- atau 38,13 %, karena kredit tahun sebelumnya hanya Rp.671.674.353,50,-

Mengenai pengembalian kredit MT 77/78 MT 78, MT 78/79 dan MT 79 dapat berjalan lancar. Hal ini terjadi berkat partisipasi seluruh petani dan kesungguhan serta pengabdian segenap aparat pelaksana.

Menurut Bupati, " khusus mengenai Kredit Bimas MH 78/79 untuk padi dan polowijo sebanyak Rp.671.674.353,50,- terbayar sampai dengan 23 Maret 1980 sebesar Rp.665.995.752,50,- atau 99,15 %, sisanya tinggal 0,85 %." (Mas).

Gambar lampiran 13, Produksi padi Kab Banyuwangi meningkat
(Sumber: Suara Karya, 21 April 1980, hlm 5)

Jatim Berikan Pinjaman 12.000 Ton Beras ke Zansibar

Surabaya (Bali Post) - Jawa Timur akan memberikan pinjaman beras sebanyak 12.000 ton ke negara Zansibar, Afrika, sesuai permintaan delegasi negara itu yang [illegible] tahun depan. Bahkan, propinsi ini bersedia menerima petani Zansibar untuk menimba pengalaman dan belajar tentang teknologi pertanian.

Hal ini sebagaimana diharapkan Bapak Presiden beberapa waktu lalu, sebagai salah satu cara yang akan meningkatkan kerja sama negara Selatan-Selatan, tutur Gubernur Jatim Soelarso usai menerima delegasi negara Zansibar, yang mengadakan kunjungan kerja ke Jatim, di Surabaya, Rabu malam.

Delegasi yang dipimpin Menteri Perdagangan, Industri dan Pemasaran Zansibar, Amani A Karome, dengan anggota 4 orang termasuk Kabulog Zansibar, Sekretaris Menteri serta pengusaha setempat akan mengadakan kunjungan selama 2 hari, de-

[illegible] ekspor di Probolinggo dan Sidoarjo."

Pinjaman beras sebanyak itu, [illegible] mengingat pinjaman sebelumnya pernah diberikan ke negara Vietnam [illegible], sebanyak 150[illegible] ton beras [illegible] itu bukan ekspor beras melainkan pinjaman. Karena, apabila ekspor beras maka kita akan rugi, sebab harganya di pasaran itu merosot atau lebih murah di luar negeri," tambahnya.

Over Produksi

Di sisi lain, pinjaman ini sekaligus untuk mengurangi beban biaya penyimpanan yang sangat tinggi, apabila akhir-akhir ini suplai beras Jatim mengalami over produksi sebanyak 307.000 ton." Sistem pengembaliannya akan dibicarakan antar departemen," katanya.

Sedangkan untuk mensupiai kebutuhan dalam negeri, seperti memasok di daerah lahan kering wilayah NTT dan Indonesia Bagian Timur lainnya, sudah dipasok sekitar 10.000 ton setiap tahunnya."

Gubernur mengatakan, meski Jatim berhasil meningkatkan produksi berasnya, namun tetap berupaya meningkatkan kualitas produksinya. Hal ini dikarenakan setiap saat harus mampu bersaing dengan negara-negara lain. Juga konsumsi masyarakat [illegible] beras [illegible] meningkat.

Sementara itu, Menteri Perdagangan, Industri dan Pemasaran Zansibar, Amani A Karome mengakui bahwa keberhasilan Jatim dalam teknologi pertanian sangat bagus, dibanding di negaranya. Apalagi, kapasitas produksi beras di propinsi ini sangat melimpah. Karenanya, negara Zansibar ingin belajar masalah teknologi pertanian di propinsi ini.

Diakuinya, perkembangan pertanian di negara Zansibar, yang walaupun telah menggunakan ahli-ahli Eropa tapi hasilnya tidak begitu memuaskan dan tidak berhasil. Diharapkan hasil kunjungan ini, akan meningkatkan produksi pertanian di negaranya. (E).

khusus karena banyak Kades yang sebenarnya kurang mampu tapi dipaksakan menempati posisi kunci penggerak kemajuan desa itu. Langkah lain yang diambil Pemda melalui perampingan dalam tubuh instansi Pemda, agar jumlah sarjana lebih banyak yang turun ke desa, kecamatan dan kabupaten bukan menumpuk di propinsi. (072).

Kupang -

Gading yang sudah dibentuk menjadi perhiasan buat dijadikan syarat pelengkap mas kawin (belis) guna dipersembahkan calon pengantin pria kepada calon pasangannya dalam adat perkawinan di Flores, bukan berasal dari Sumatera, tetapi dari Afrika.

"Di Nusa Tenggara Timur khususnya di Pulau Flores tidak ada Gajah, tetapi di sebagian masyarakat NTT justru menjadikan gading sebagai belis dan telah berlaku turun temurun," kata Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) VII NTT Ir. Dodi Mochtar di Kupang, Kamis. (Ant)

Gambar lampiran 14, Jatim Berikan Pinjaman Beras pada Zansibar
(Sumber: Bali Pos, 15 Mei 1993, hlm 8)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

200 Hektar Tanaman Padi Di Kabupaten Banyuwangi Mendapat Serangan Hama Tungro

Sidoarjo Pebruari (BY).

Dirjen Tanaman Pangan Ir. Wardoyo mengungkapkan mulai akhir Januari lalu team penanggulangan hama Dept. Pertanian telah melakukan pemberantasan "Hama Tungro" (virus Wereng Hijau) di beberapa tempat di Jawa Timur masing-masing di Kabupaten Pasuruan, Probolinggo, Banyuwangi dan Kabupaten Jember.

Untuk melihat dari dekat sampai sejauh mana akibat negatif dari hama yang membayangkan bagi tanaman padi itu, sehari sebelum pelaksanaan pemberantasan hama. Dirjen Tanaman Pangan Ir. Wardoyo berkesempatan mengadakan pengecekan langsung di tempat.

Hal itu diungkapkan oleh Dirjen ketika memberikan sambutan pengarahan pada pembukaan Pertemuan Kontak Tani-Nelayan Andalan Tk.I & II se Jatim di Desa Wirobiting, Kec. Prambon, Kabupaten Sidoarjo Senin lalu.

Menurut Dirjen, hama tungro yang menyerang tanaman padi itu sepintas lalu memang tidak kelihatan. Namun setelah melalui penelitian mikroskopis pada potongan sebuah penampang batang padi maka terungkaplah jenis hama yang menyerang tanaman itu.

Tanaman padi yang terserang hama tungro pertumbuhannya kerdil, perkembangan biaknya lamban dan warnanya kekuning-kuningan. Produksivitas tanaman padi yang terserang hama tersebut akan merosot total.

Lewat para Kontak Tani Andalan yang mengikuti pertemuan, Dirjen Tanaman Pangan menyerukan hendaknya para petani dipedesaan yang mengetahui tanaman padinya terserang hama demikian segera saja melaporkan kepada Dinas Pertanian setempat.

Menjawab pertanyaan Wartawan seusai memberikan pengarahan, Dirjen menjelaskan, areal tanaman padi yang mendapat serangan hama tungro terberat seluas 200 ha keseluruhannya di Kabupaten Banyuwangi. Sementara di Kabupaten Pasuruan, Probolinggo, dan

Bantuan Presiden

Anggrek Raksasa Mulai Berkembang

Gambar lampiran 15, Sawah di Kab Banyuwangi mendapat serangan Tungro
(Sumber: Berita Yudha, 5 Februari 1982, Hlm 4)

Banyuwangi

Diharapkan tanam padi jenis IR 36

BANYUWANGI, JP.– Diharapkan para petani di dalam Musim Tanam 1977/1978 ini menggunakan bibit padi jenis IR 36 dimana bibit padi jenis ini [illegible]

Dianjurkan kepada [illegible] Idaman (MUI), agar kesejahteraan petani [illegible] meningkat. Demikian dinyatakan Camat Cluring dalam sambutannya pada Training Kontak Tani Kec. Cluring baru2 ini.

Pada pertengahan Desember 1977 yang lalu di Kecamatan Cluring telah diadakan semacam training terhadap para kontak tani dan petani maju di wilayah Kecamatan Cluring tersebut dengan maksud agar para petani lebih meningkatkan lagi pengetahuannya dengan demikian maka produksi akan menjadi bertambah.

Hadir pada saat itu Muspika Cluring. Jupen. (Bersambung hal 7 kol ...)

Gambar lampiran 16, Banyuwangi menanam padi jenis IR 36
(Sumber: Jawa Pos, 9 Januari 1978, hlm 8)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Pembangunan
Jaringan Irigasi
Tingkat Usaha
Tani
Banyuwangi

Gambar lampiran 17, Jaringan Irigasi di Banyuwangi
(Sumber: Berita Yudha, 23 Februari 1982, hlm 8)

Banyuwangi
Raker tehnis penerangan
Bimas se Kabupaten

Gambar lampiran 18, Raker tehnis Bimas di Banyuwangi
(Sumber: Jawa Pos, 1 Juni 1978, hlm 6)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Kabupaten Banyuwangi Penghasil Beras Terbesar Di Indonesia

Banyuwangi, Jan(BY).

21% dari produksi total beras Indonesia berasal dari daerah Propinsi Jawa Timur. 21% tersebut sebagian besar dihasilkan oleh Kabupaten Banyuwangi. Demikian juga halnya dengan total pengadaan beras untuk stok Nasional Jatim dimana dari tahun ketahun selalu meningkat. Untuk tahun 1981 lalu dari pengadaan beras untuk stok Nasional Jatim yang berjumlah 925.000 ton sebagian besar juga berasal dari Kabupaten Banyuwangi. Dengan demikian Kabupaten Banyuwangi (Ujung Timur Prop. Jatim) merupakan daerah Tk. II di Indonesia yang menghasilkan beras terbanyak.

Demikian diungkapkan oleh Gubernur Jatim Soenandar Prijosoedarmo dalam peresmian proyek pompanisasi Gotong Royong untuk memanfaatkan lahan tanah kering di Desa Wonguerejo, Kec. Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi dalam rangkaian kunjungan kerja meresmikan berbagai proyek di daerah Eks. Karesidenan Besuki pekan lalu.

Menurut Gubernur Soenandar Prijosoedarmo, keberhasilan peningkatan pengadaan produksi beras tersebut yang utama adalah berkat jasa besar para petani di pedesaan. Karenanya pada tempat-tempat apabila kita berterimakasih dan memberikan penghargaan kepada mereka. Para petani patut diberi nama "Pahlawan-pahlawan Pembangunan" walaupun tanpa tanda jasa!, katanya tandas.

Kepada seluruh aparat Pemerintahan khususnya aparat Pemda dimanapun berada, Gubernur Soenandar minta hendaknya seluruh kegiatan-kegiatannya lebih diarahkan pada peningkatan kesejahteraan para petani!

PRIHATIN

Kendati Gubernur Soenandar menyatakan petani berjasa besar dalam pembangunan dan patut diberi nama sebagai Pahlawan-Pahlawan Pembangunan namun ia menyatakan keprihatinannya atas semakin berkurangnya tenaga kerja dan para petani generasi muda di pedesaan dewasa ini.

"Saya prihatin terhadap adanya kenyaan para pemuda yang enggan bekerja diswah seperti Bapak-bapak petani Orang Tua mereka sehingga disementara daerah mengakibatkan langkanya tenaga kerja diswah", katanya.

Menurut Soenandar, ternyata para pemuda desa sekarang ini banyak pergi ke kota bekerja di pabrik-pabrik sekalipun dengan upah rendah dari pada bekerja diswah yang nota benenya selalu berleputan dengan lumpur. Para pemuda pedesaan kurang menghayati betul-betul hasil dari pada bekerja disektor pertanian. "Justru disektor pertanian inilah kita akan dapat secara nyata mengabdikan diri dalam pembangunan Bangsa dan Negara", katanya tandas.

Sebagai jalan keluar untuk mengupayakan supaya para pemuda pedesaan tetap menyenangi/meneruskan pekerjaan orang tuanya sebagai petani, Gubernur Jatim menggemukakan khirnya tradisi penampilan petani dimuka umum ataupun ditempat-tempat apacara tertentu dan pawai-pawai pembangunan dengan pakaian jelek-jelek penuh lumpur diganti saja dengan pakaian necis dilengkapi dasi dan sepatu. Sehingga dengan demikian penampilan seorang petani akan tampak tegap, gagah dan membanggakan sesuai dengan jasa besarnya, tambahnya.

Sementara itu Bupati Banyuwangi Soesilo Soeharto SH menyatakan proyek pompanisasi lahan kering didaerahnya dikerjakan secara gotong-royong antara Dinas Pemda Tk. II dengan Dinas PTP XXIV-XXV (P.G. Asembagus). Proyek gotong royong tersebut telah menghasilkan pompa 14 buah (150,- juta perbuah) yang dapat mengairi sawah/lahan kering seluas 960 Ha, dan tanaman tebu seluas 1.300 ha.

Dengan Pompanisasi lahan kering diharapkan dapat mencapai tujuan: Peningkatan pendapatan petani dengan meningkatkan produktifitas tanah yang ditanami tebu dan tanaman pangan secara terpadu. Memperoleh tambahan lahan untuk perluasan tanaman tebu sesuai program Pemerintah untuk peningkatan produksi gula dipercepat; Masyarakat setempat dapat menikmati air bersih bagi kebutuhan sehari-hari dan memberikan tambahan lapangan kerja baru. (031).—

Bupati Banyuwangi Soesilo Soeharto SH (kiri) menjelaskan manfaat lain air dari proyek pompanisasi lahan kering kepada Gubernur Jatim Soenandar Prijosoedarmo (kanan). Tampak di tengah Administratur PG Asembagus I, Durono Arladi (Foto BY/031)

Gambar lampiran 19, Kabupaten Banyuwangi Penghasil Beras Terbesar di Indonesia.

(Sumber: Berita Yudha, 19 Januari 1982, hlm 8)

Berita Yudha — Sabtu, 12 Nopember 1983

Halaman VII

Subang Tergolong Daerah Berat Dalam Masalah Bimas

Oleh: Sugeng Purnomo, Koresponden "BY"

Gambar lampiran 20, Subang Tergolong Daerah Berat Dalam Masalah Bimas

(Sumber: Berita Yudha, 12 Nopember 1983, hlm 7)

TABEL : 5.3.1. LUAS PANEN, HASIL PER HEKTAR DAN PRODUKSI TANAMAN PADI SAWAH TAHUN 1990

NO.	KECAMATAN	LUAS PANEN (Ha)	PRODUKSI RATA-RATA (KW/Ha)	PRODUKSI (TON)
1	2	3	4	5
1.	Pesanggaran	7.089	59,30	41.838
2.	Bangorejo	6.926	56,23	38.645
3.	Purwoharjo	5.823	59,78	33.009
4.	Tegaldlimo	4.901	59,85	29.132
5.	M u n c a r	3.586	57,25	20.530
6.	Cluring	6.721	58,25	39.058
7.	Gambiran	8.463	57,25	48.251
8.	Glenmore	5.286	55,60	29.290
9.	Kalibaru	2.625	56,80	14.900
10.	Genteng	12.508	58,20	72.586
11.	Srono	6.025	57,75	34.594
12.	Singojuruh	8.881	56,50	50.077
13.	Rogojampi	9.971	57,10	56.734
14.	K a b a t	8.043	56,20	45.102
15.	Songgon	7.417	55,00	40.494
16.	Glagah	8.512	53,75	45.552
17.	Banyuwangi	1.706	50,50	8.615
18.	G i r i	3.685	53,77	19.800
19.	Wongsorejo	2.794	52,60	14.696
	JUMLAH TAHUN 1990	120.962	56,46	682.903
	JUMLAH TAHUN 1989	125.597	56,26	703.603
	JUMLAH TAHUN 1988	119.273	55,18	668.266

Gambar lampiran 21, hasil padi di Kecamatan-kecamatan Banyuwangi tahun 1990
(Sumber: BPS Kabupaten Banyuwangi 1990)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

RANGKAIAN III Lampiran : 1

LUAS PANEN, HASIL PER HEKTAR DAN PRODUKSI PADI DI INDONESIA TAHUN 1986

PROPINSI	PADI SAWAH			PADI LADANG			PADI (SAWAH + LADANG)		
	Luas Panen (Ha)	Hasil/Ha (Kw)	Produksi (Ton)	Luas Panen (Ha)	Hasil/Ha (Kw)	Produksi (Ton)	Luas Panen (Ha)	Hasil/Ha (Kw)	Produksi (Ton)
1. Daerah Istimewa Aceh	253 351	35,94	910 540	8 308	12,09	14 335	261 739	35,34	924 878
2. Sumatera Utara	514 853	37,79	1 945 135	86 846	19,17	166 484	601 699	35,09	2 111 599
3. Sumatera Barat	324 571	41,98	1 362 549	13 294	19,91	26 468	337 865	41,11	1 389 017
4. R i a u	90 048	30,10	271 044	45 758	14,81	67 768	135 806	24,95	338 812
5. J a m b i	151 732	30,15	457 472	28 256	14,36	40 519	179 988	27,67	497 991
6. Sumatera Selatan	324 750	31,87	1 034 978	107 511	15,96	171 588	432 261	27,91	1 206 566
7. Bengkulu	62 775	34,06	213 812	19 311	15,10	29 160	82 086	29,60	242 972
8. Lampung	206 912	40,48	837 580	96 821	17,40	168 469	303 733	33,12	1 006 049
SUMATERA	1 928 592	36,46	7 033 093	406 185	16,86	684 791	2 335 177	29,05	7 717 884
9. D.K.I. Jakarta	9 488	37,72	35 793	-	-	-	9 488	37,72	35 793
10. Jawa Barat	1 914 016	45,61	8 729 693	143 088	22,45	321 176	2 057 104	44,00	5 050 869
11. Jawa Tengah	1 422 791	47,74	6 793 019	64 847	23,45	152 037	1 487 638	46,69	6 945 056
12. D.I. Yogyakarta	102 275	50,39	528 369	36 352	23,96	87 099	139 627	43,51	601 468
13. Jawa Timur	1 489 406	50,76	7 560 957	84 716	23,85	202 012	1 574 122	49,32	7 762 969
JAWA	4 938 976	47,66	23 639 831	229 003	23,17	262 324	5 167 979	46,72	24 602 155
14. B a l i	164 078	46,50	762 963	2 771	16,01	4 436	166 849	45,80	767 399
15. Nusatenggara Barat	234 835	39,66	931 356	14 868	16,47	24 488	249 703	38,28	955 844
16. Nusatenggara Timur	60 648	31,47	190 859	55 325	12,39	68 548	115 973	22,27	259 407
17. Timor Timur *)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BALI & NUSATENGGARA	459 561	41,02	1 885 178	72 964	13,36	97 472	532 525	37,23	1 982 650
18. Kalimantan Barat	102 594	24,22	442 485	110 610	13,78	152 421	293 304	20,28	594 906
19. Kalimantan Tengah	77 597	21,63	167 842	46 389	14,21	63 077	121 986	18,93	230 919
20. Kalimantan Selatan	291 259	27,65	805 331	36 451	16,11	58 723	327 710	26,37	864 054
21. Kalimantan Timur	42 901	24,31	104 292	42 216	15,06	63 577	85 117	19,72	167 869
KALIMANTAN	594 451	25,57	1 519 950	233 666	14,46	337 798	828 117	22,43	1 857 748
22. Sulawesi Utara	61 649	41,13	253 562	14 700	15,86	24 764	76 349	36,46	278 326
23. Sulawesi Tengah	78 369	29,22	228 904	23 162	14,84	34 372	101 531	25,94	263 366
24. Sulawesi Selatan	651 883	40,08	2 612 747	18 688	17,26	32 255	670 571	39,66	2 645 002
25. Sulawesi Tenggara	22 474	30,90	69 445	19 934	15,86	31 615	42 408	23,83	101 060
SULAWESI	814 375	38,86	3 164 748	76 484	16,09	123 026	890 859	36,91	3 287 774
26. M a l u k u	3 324	23,14	7 229	5 523	13,01	12 309	12 647	15,53	19 518
27. Irian Jaya	2 432	22,83	5 552	836	13,68	1 144	3 268	20,49	6 696
MALUKU & IRIAN JAYA	5 756	23,00	12 781	10 359	13,06	13 533	15 915	16,53	26 314
JUMLAH LUAR JAWA	3 802 935	35,80	13 615 250	799 658	15,71	1 256 670	4 602 593	12,31	14 872 370
I N D O N E S I A	8 741 911	42,62	37 253 581	1 128 661	17,89	2 018 944	9 870 572	39,79	39274 525

*) Data belum tersedia
Catatan : Luas Panen "kering", bentuk Produksi Gabah Kering Giling.-

Beras : 26 706 677 ton

Gambar lampiran 22, hasil padi di Indonesia tahun 1986
(Sumber: BPS Produsi Padi/Beras di Indonesia 1986)

Gambar 23, Wawancara dengan Bapak Muda'I
(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 13 April 2025)

Gambar 24, Wawancara dengan Bapak Karmin dan Bapak Suhaemi
(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 21 April 2025)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Gambar lampiran 25, Wawancara dengan Bapak Darto
(Sumber: dokumentasi pribadi, 7 Mei 2025)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bersedia menjadi informan dalam penelitian yang dilakukan oleh saudari Izza Ilma Maula Zain dengan judul penelitian "**Kebijakan Revolusi Hijau dan Dampaknya Terhadap Pertanian Padi di Kabupaten Banyuwangi Tahun 1979-1998**".

Saya memahami bahwa penelitian ini tidak akan berakibat negatif terhadap semua hal, dan informasi yang saya kemukakan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Oleh karena itu, saya bersedia menjadi informan dalam penelitian yang berjudul "**Kebijakan Revolus Hijau dan Dampaknya Terhadap Pertanian Padi di Kabupaten Banyuwangi Tahun 1979-1998**" yang ditulis oleh saudari Izza Ilma Maula Zain.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Banyuwangi, 07 Mei 2025

Mengetahui,

(AHMAD SUBIONO)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bersedia menjadi informan dalam penelitian yang dilakukan oleh saudari Izza Ilma Maula Zain dengan judul penelitian "**Kebijakan Revolusi Hijau dan Dampaknya Terhadap Pertanian Padi di Kabupaten Banyuwangi Tahun 1979-1998**".

Saya memahami bahwa penelitian ini tidak akan berakibat negatif terhadap semua hal, dan informasi yang saya kemukakan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Oleh karena itu, saya bersedia menjadi informan dalam penelitian yang berjudul "**Kebijakan Revolus Hijau dan Dampaknya Terhadap Pertanian Padi di Kabupaten Banyuwangi Tahun 1979-1998**" yang ditulis oleh saudari Izza Ilma Maula Zain.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Banyuwangi, 13 April 2025

Mengetahui,

(Mudai)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bersedia menjadi informan dalam penelitian yang dilakukan oleh saudari Izza Ilma Maula Zain dengan judul penelitian "**Kebijakan Revolusi Hijau dan Dampaknya Terhadap Pertanian Padi di Kabupaten Banyuwangi Tahun 1979-1998**".

Saya memahami bahwa penelitian ini tidak akan berakibat negatif terhadap semua hal, dan informasi yang saya kemukakan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Oleh karena itu, saya bersedia menjadi informan dalam penelitian yang berjudul "**Kebijakan Revolus Hijau dan Dampaknya Terhadap Pertanian Padi di Kabupaten Banyuwangi Tahun 1979-1998**" yang ditulis oleh saudari Izza Ilma Maula Zain.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Banyuwangi, 21 April 2025

Mengetahui,

KARMIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bersedia menjadi informan dalam penelitian yang dilakukan oleh saudari Izza Ilma Maula Zain dengan judul penelitian "**Kebijakan Revolusi Hijau dan Dampaknya Terhadap Pertanian Padi di Kabupaten Banyuwangi Tahun 1979-1998**".

Saya memahami bahwa penelitian ini tidak akan berakibat negatif terhadap semua hal, dan informasi yang saya kemukakan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Oleh karena itu, saya bersedia menjadi informan dalam penelitian yang berjudul "**Kebijakan Revolus Hijau dan Dampaknya Terhadap Pertanian Padi di Kabupaten Banyuwangi Tahun 1979-1998**" yang ditulis oleh saudari Izza Ilma Maula Zain.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Banyuwangi, 21 April 2025

Mengetahui,

(Semadi)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Izza Ilma Maula Zain
NIM	: 214104040005
Program Studi	: Sejarah dan Peradaban Islam
Fakultas	: Ushuluddin, Adab dan Humaniora
Institusi	: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 22 Mei 2025

Saya yang menyatakan

Izza Ilma Maula Zain
NIM 214104040005

BIOGRAFI PENULIS

A. Identitas Diri

Nama	: Izza Ilma Maula Zain
Tempat/Tanggal Lahir	: Banyuwangi, 04 Maret 2003
Jenis Kelamin	: Perempuan
Alamat	: Dsn Krajan Rt.01/Rw.01 Desa Seneporejo, Kec. Siliragung, Kabupaten Banyuwangi
Fakultas	: Ushuluddin, Adab dan Humaniora
Program Studi	: Sejarah dan Peradaban Islam
NIM	: 214104040005

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Riwayat Pendidikan

1. SD/MI : MI Miftahul Huda Seneporejo
2. SMP/MTs : MTsN 02 Banyuwangi
3. SMA/MA : MAN 02 Banyuwangi

C. Pengalaman Organisasi

1. Wakil Ketua Divisi Bahasa Inggris ICIS UIN KHAS Jember Masa Khidmat 2022/2023
2. Ketua Divisi Bahasa Inggris ICIS UIN KHAS Jember Masa Khidmat 2023/2024